



Katalog BPS: 4104001

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA INDONESIA 20II



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA INDONESIA 2011



STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2011

ISSN. 2086–1036

No Publikasi : 04220.1202
Katalog BPS : 4104001
Ukuran Buku : 28 Cm x 21 Cm
Jumlah Halaman : xviii + 148 Halaman

Naskah :

Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Gambar Kulit :

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak oleh :

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Semakin maju suatu negara maka semakin banyak penduduknya yang mencapai usia lanjut, lebih dari 60 tahun atau yang dikenal dengan sebutan lansia. Bangsa yang semakin sehat berarti masyarakatnya semakin panjang umur. Persentase penduduk lanjut usia di Indonesia diperkirakan sudah mencapai 7,5 persen, berarti sudah mulai memasuki struktur umur tua. Kelompok penduduk ini mempunyai ciri sosial ekonomi yang berbeda dengan kelompok umur yang lebih muda, sehingga kebijakan pembangunan untuk melayaninya tentu juga berbeda.

Publikasi ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk lansia di Indonesia. Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2011 ini menyajikan data antara lain ciri-ciri demografi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor tahun 2011 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2011.

Kepada semua pihak dan Tim Penyusun yang telah memberikan kontribusinya dalam proses penyusunan publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang sangat diharapkan.

Jakarta, Oktober 2012
KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK

Dr. Suryamin, M.Sc.

GLOSSARY (Singkatan)

1. ART: Anggota Rumah Tangga
2. APS : Angka Partisipasi Sekolah
3. BPS: Badan Pusat Statistik
4. KF: Keaksaraan Fungsional
5. KRT: Kepala Rumah Tangga
6. Lansia: Lanjut usia
7. PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
8. PT: Perguruan Tinggi
9. Pustu: Puskesmas Pembantu
10. Sakernas: Survei Angkatan Kerja Nasional
11. SBA: Survei Buta Aksara
12. SD: Sekolah Dasar
13. SDM: Sumber Daya Manusia
14. SMA: Sekolah Menengah Atas
15. SMP: Sekolah Menengah Pertama
16. SMK: Sekolah Menengah Kejuruan
17. SP 2010 : Sensus Penduduk Tahun 2010
18. Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional
19. TPAK: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
20. UU: Undang-undang
21. VSEN2011.K: Kuesioner Kor

Ringkasan Eksekutif

Salah satu dampak dari perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat adalah meningkatnya usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan hidup tercermin dari semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk lansia sekitar 18,27 juta orang atau 7,58 persen dari total penduduk Indonesia.

Persentase penduduk lansia yang telah mencapai angka di atas tujuh persen, menunjukkan bahwa negara Indonesia sudah mulai masuk ke kelompok negara berstruktur tua (*ageing population*). Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional, khususnya sebagai cerminan dari semakin panjangnya rata-rata usia penduduk Indonesia.

Jika dilihat menurut provinsi, provinsi yang persentase penduduk lansianya sudah berada di atas 7 persen, adalah DI Yogyakarta (12,99 persen), Jawa Timur (10,40 persen), Jawa Tengah (10,34 persen), Bali (9,78 persen), Sulawesi Utara (8,45 persen), Sulawesi Selatan (8,34 persen), Sumatera Barat (8,09 persen), Nusa Tenggara Timur (7,58 persen), Nusa Tenggara Barat (7,23 persen), Lampung (7,20 persen), dan Jawa Barat (7,05 persen).

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan. Hasil Susenas menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan penduduk lansia pada tahun 2011 sebesar 12,01. Angka rasio sebesar 12,01

menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 12 orang penduduk lansia.

Bila dilihat dari segi pendidikan lansia, hasil Susenas 2011 menunjukkan pendidikan penduduk lansia relatif masih rendah, dimana penduduk lansia yang berpendidikan rendah persentasenya relatif masih tinggi. Mereka yang berpendidikan tamat SD sebesar 23,39 persen. Bahkan mereka yang tidak menamatkan SD dan yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi lagi persentasenya yaitu 60,35 persen. Di sisi lain, persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi relatif rendah. Persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan sampai jenjang SMP hanya sebesar 6,25 persen, dan SM ke atas sebesar 10,02 persen.

Rendahnya pendidikan penduduk lansia tersebut memperlihatkan kualitas SDM lansia secara umum masih rendah. Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan akibat sisa-sisa penjajahan pada masa kemerdekaan menjadi salah satu faktor penyebab tingkat pendidikan lansia yang masih sangat rendah.

Kondisi ini hampir berlaku di semua provinsi. Persentase tertinggi lansia yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (53,94 persen), sebaliknya persentase penduduk lansia terendah yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara (2,18 persen).

Sejalan dengan tingginya lansia yang tidak menamatkan SD dan yang tidak/belum pernah sekolah, angka buta huruf penduduk lansia pun relatif cukup tinggi yaitu sebesar 30,19 persen dari total keseluruhan penduduk lansia. Angka buta huruf lansia tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (56,52 persen) dan terendah berada di Provinsi Sulawesi Utara (3,07 persen).

Dari sisi kesehatan, secara umum derajat kesehatan penduduk lansia cenderung masih rendah. Bila dilihat berdasarkan kelompok umur, semakin tinggi kelompok umur lansia maka persentase yang mengalami keluhan kesehatan semakin besar, yaitu kelompok umur 45-59 tahun (36,50 persen), 60-69 tahun (48,51 persen), 70-79 tahun (58,08 persen) dan 80 ke atas (63,42 persen).

Tingginya persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan (sekitar separuh dari populasi lansia) ditemukan hampir di semua provinsi. Persentase tertinggi berada di Provinsi Aceh (65,73 persen) dan terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau (42,75 persen).

Bila dilihat perkembangannya, derajat kesehatan penduduk lansia mengalami peningkatan. Angka kesakitan penduduk lansia pada tahun 2007 sebesar 31,11 persen turun pada tahun 2009 menjadi 30,46 persen, dan angkanya menurun lagi pada tahun 2011 menjadi 27,80 persen. Dari seluruh penduduk lansia yang sakit, sebagian besar mengalami sakit tidak lebih dari seminggu, yaitu 40,10 persen menderita sakit selama 1–3 hari dan 33,58 persen selama 4–7 hari. Dilihat dari jenis obat yang digunakan, untuk mengobati sendiri sakitnya, terlihat bahwa obat modern menjadi pilihan utama sebagian besar penduduk lansia (58,08 persen), sedangkan mereka yang memakai obat tradisional sekitar 10,41 persen.

Selain mengobati sendiri, cara pengobatan lain yang juga dilakukan oleh penduduk lansia yang sakit adalah dengan berobat jalan. Bila dilihat dari urutannya, fasilitas pelayanan kesehatan yang paling diminati oleh penduduk lansia untuk berobat jalan adalah praktik tenaga kesehatan puskesmas/pustu menempati urutan pertama dengan proporsi sebesar 32,07 persen, kemudian diikuti oleh praktik puskesmas/puskesmas pembantu sebesar 30,89 persen dan praktik dokter sebesar 30,22 persen.

Berdasarkan data hasil Sakernas Agustus 2011, masih banyak penduduk lansia yang tergolong produktif. Dari keseluruhan penduduk lansia sekitar 45,41 persen diantaranya masih bekerja. Kondisi yang sama terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan yaitu masing-masing 38,99 persen dan 51,46 persen. Mayoritas penduduk lansia yang bekerja adalah lansia laki-laki, sedangkan lansia perempuan lebih banyak yang mengurus rumah tangga.

Penduduk lansia yang terlibat kegiatan ekonomi tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu perbandingan antara angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja. Pada tahun 2011, TPAK penduduk lansia relatif cukup besar yaitu sebesar 47,07 persen. TPAK penduduk lansia tertinggi

terdapat di Provinsi Papua (58,78 persen) dan terendah terdapat di DKI Jakarta (37,00 persen).

Dari tiga kelompok sektor yang ada, sebagian besar penduduk lansia bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 60,92 persen. Sementara itu, hanya sebagian kecil dari lansia yang bekerja di sektor jasa-jasa (28,80 persen) dan sektor industri (10,28 persen). Tingginya persentase lansia yang bekerja di sektor pertanian antara lain terkait dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih rendah. Lebih dari 90 persen penduduk lansia yang berpendidikan SD ke bawah bekerja di sektor pertanian. Di sisi lain, penduduk lansia yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai SMA ke atas hanya sekitar 3,21 persen yang bekerja di sektor pertanian.

Bila dilihat dari status pekerjaan, sebagian besar lansia bekerja dengan berusaha dibantu buruh yaitu sebesar 42,24 persen, sedangkan lansia yang berusaha sendiri sebesar 24,46 persen dan yang bekerja dengan tidak dibayar sebesar 14,87 persen. Sementara itu, penduduk lansia yang bekerja dengan status pekerjaan lainnya masih dibawah 10 persen yaitu berturut-turut sebagai pekerja bebas (9,74 persen) dan buruh/karyawan (8,68 persen).

Produktifitas tinggi yang dialami pekerja lansia tercermin pula dari jumlah jam kerja yang dilakukan yaitu 35 jam ke atas selama seminggu terakhir. Persentase penduduk lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh tersebut sebesar 42,51 persen. Sementara itu, lansia yang bekerja dengan jumlah jam kerja antara 15-34 jam seminggu sebesar 41,01 persen dan sisanya adalah mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu yaitu sebesar 16,48 persen.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
GLOSSARY (Singkatan)	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	xv
DAFTAR ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Sistematika Penyajian	4
BAB II METODOLOGI	7
2.1. Sumber Data	7
2.2. Ruang Lingkup	8
2.3. Konsep dan Definisi	9
2.4. Keterbatasan Data	14
2.5. Metode Analisis	14
BAB III STRUKTUR DEMOGRAFIS PENDUDUK LANSIA	17
3.1. Struktur Penduduk Indonesia	19
3.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia	21
3.3. Distribusi dan Komposisi Penduduk Lanjut Usia	22
3.4. Peranan Penduduk Lansia di Dalam Rumah Tangga	25
BAB IV PENDIDIKAN PENDUDUK LANSIA	31
4.1. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	32

	Halaman
4.2. Kemampuan Membaca dan Menulis	36
BAB V KESEHATAN PENDUDUK LANSIA	43
5.1. Keluhan Kesehatan	46
5.2. Angka Kesakitan	49
5.3. Lama Sakit	51
5.4. Cara Berobat	52
BAB VI KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK LANSIA	59
6.1. Partisipasi Angkatan Kerja	60
6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64
6.3. Lapangan Usaha	65
6.4. Status Pekerjaan	69
6.5. Jumlah Jam Kerja	70
TABEL LAMPIRAN	75
ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING (SAMPLING ERROR ESTIMATES)	123
DAFTAR PUSTAKA	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Persentase Penduduk Lansia menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2011	26
4.1	Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011	35
4.2	Persentase Penduduk Lansia yang Buta Aksara menurut Jenis Kelamin, 2007, 2009, dan 2011	38
5.1	Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kelompok Lansia dan Jenis Kelamin, 2011	47
5.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, 2007, 2009 dan 2011	50
6.1	TPAK Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	65
6.2	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2011	71

http://www.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Lansia (Tahun), 2011	20
3.2 Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	22
3.3 Perkiraan Jumlah dan Proporsi Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2011	23
3.4 Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2011	24
3.5 Persentase Penduduk 10 – 59 Tahun dan Penduduk 60 Tahun Ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, 2011	27
4.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2007, 2009, dan 2011	33
4.2 Persentase Penduduk 15-59 Tahun, 15 Tahun Ke Atas dan Lansia yang Buta Aksara menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	37
5.1 Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kelompok Lansia, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan, 2011	48
5.2 Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, 2011	51
5.3 Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Tipe Daerah, Lamanya Sakit, dan Jenis Obat yang Digunakan, 2011	53
5.4 Persentase Penduduk Semua Umur dan Penduduk Lansia yang Sakit dan Berobat Sendiri menurut Jenis Obat yang Digunakan dan Tipe Daerah, 2011	54
5.5 Proporsi Penduduk Semua Umur dan Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah, 2011	55

Tabel		Halaman
6.1	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Kegiatan Utama Seminggu Terakhir, 2011	62
6.2	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2011	66
6.3	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kelompok Lapangan Usaha, 2011	68
6.4	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan, 2011	69
6.5	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2011	72

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel		Halaman
3.1.1 - 3.1.3	Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur (Tahun), 2011	75 - 77
3.2	Rasio Ketergantungan Penduduk Tua menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin , 2011	78
3.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	79
3.4.1 – 3.4.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2011	80 - 82
3.5.1 – 3.5.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2011	83 - 85
4.1.1 – 4.1.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011	86 - 88
4.2.1 – 4.2.9	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2011	89 - 97
5.1	Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin , 2011	98
5.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	99
5.3.1 – 5.3.3	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Sakit (hari), 2011	100 - 102
5.4	Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	103
5.5.1 – 5.5.3	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan, 2011	104 -106
5.6	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	107

Tabel		Halaman
5.7.1 – 5.7.3	Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan , 2011	108 - 110
6.1	TPAK Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	111
6.2.1 – 6.2.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2011	112 - 114
6.3.1 – 6.3.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2011	115 - 117
6.4.1 – 6.4.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir, 2011	118 - 120

DAFTAR ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING

Tabel		Halaman
9.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	125
9.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011	126
9.3	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tidak/Belum Tamat Sekolah Dasar menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	127
9.4	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tidak/Belum Tamat Sekolah Dasar menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011	128
9.5	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Dasar menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	129
9.6	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Dasar menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011	130
9.7	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Menengah Pertama menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	131
9.8	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Menengah Pertama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011	132
9.9	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Menengah menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	133
9.10	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Menengah menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011	134
9.11	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Perguruan Tinggi menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	135

Tabel		Halaman
9.12	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Perguruan Tinggi menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011	136
9.13	<i>Sampling Error</i> Angka Buta Huruf Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	137
9.14	<i>Sampling Error</i> Angka Buta Huruf Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011	138
9.15	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	139
9.16	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011	140
9.17	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	141
9.18	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011	142
9.19	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	143
9.20	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011	144

PENDAHULUAN



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Salah satu sasaran dalam pembangunan di Indonesia adalah peningkatan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat, termasuk kelompok lanjut usia (lansia). Hal ini ditandai dengan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan yaitu semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Selain keberhasilan dibidang kesehatan, peningkatan usia harapan hidup juga karena tingkat pendidikan, pengetahuan, dan tingkat pendapatan yang semakin meningkat. Tingkat pendidikan ini mempunyai hubungan dengan tingkat pengetahuan, serta tingkat pendapatan seseorang. Orang yang mempunyai pendidikan dan pengetahuan cenderung akan meningkat penghasilannya

sehingga jika mereka sakit akan memilih sarana kesehatan yang lebih baik. Oleh karenanya semua ini saling terkait dan akan berdampak terhadap adanya usia harapan hidup yang semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, hal ini berdampak pada peningkatan jumlah atau pertumbuhan penduduk lansia setiap tahunnya.

Disisi lain, peningkatan jumlah penduduk lansia akan membawa dampak terhadap sosial ekonomi baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam negara. Implikasi ekonomis yang penting dari peningkatan jumlah penduduk lansia adalah peningkatan dalam ratio ketergantungan lanjut usia (*old age dependency ratio*). Setiap penduduk usia produktif akan menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut. Ketergantungan lansia disebabkan kondisi mereka banyak mengalami kemunduran baik fisik maupun psikis. Sejalan dengan itu, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dapat menunjang derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia agar tetap sehat, mandiri dan berdaya guna sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat.

Menjadi tua merupakan suatu fase kehidupan yang dialami oleh setiap manusia. Secara fisik orang lanjut usia mengalami kemunduran fungsi alat tubuh, atau disebut juga dengan proses degenerative sehingga diperlukan perhatian dan penanganan yang lebih baik. Pemerintah memberikan perhatian terhadap lansia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Selain dari pada itu perhatian terhadap lansia diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menjadikan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Lansia Sedunia yang tertuang dalam resolusi PBB No. 045/206 Tahun 1991. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti resolusi PBB tersebut dengan menetapkan Hari Lansia di Indonesia pada tanggal 29 Mei. Diharapkan dengan memperingati Hari Lansia tersebut, pemerintah dan masyarakat lebih peduli terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup lansia.

Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup lansia, perlu upaya pemberdayaan guna menunjang derajat kesehatan dan peningkatan mutu kehidupan lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga,

maupun masyarakat. Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Arah pemberdayaan dilakukan dengan cara lansia aktif berpartisipasi dalam pembangunan guna mengurangi kemiskinan, memperoleh kesehatan yang lebih baik, dan mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemberdayaan tidak saja dilakukan terhadap para lansia dan keluarganya, namun juga dilakukan terhadap seluruh komponen bangsa. Untuk itu, arah dan strategi pembangunan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk lansia sebaiknya dilakukan secara terpadu dan lintas sektor.

Sejalan dengan itu, tersedianya data statistik dan berbagai indikator yang dapat memberikan gambaran makro kondisi dan potensi penduduk lansia pada berbagai aspek penting seperti demografis, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan pada level nasional maupun provinsi, diharapkan dapat membantu mempertajam arah dan sasaran pembangunan serta pemberdayaan penduduk lansia.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi ini adalah menyajikan gambaran makro situasi dan kondisi penduduk lansia Indonesia dilihat dari berbagai aspek, antara lain struktur demografis, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Gambaran situasi dan kondisi penduduk lansia Indonesia dalam publikasi ini disajikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi, dibedakan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Diharapkan penyajian publikasi ini berguna terutama bagi peneliti, perencana, dan pengambil keputusan di bidang sosial dan kependudukan, khususnya yang berorientasi pada penduduk lansia.

1.3 Sistematika Penyajian

Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia Tahun 2011 ini disajikan dalam tujuh bagian. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan fenomena yang melatarbelakangi penyusunan publikasi ini; maksud dan tujuan; serta sistematika penyajian. Kemudian pada bagian kedua (Bab II) disajikan metodologi berupa sumber data; ruang lingkup; konsep dan definisi; keterbatasan data; serta metode analisis.

Lima bagian berikutnya menyajikan gambaran situasi dan kondisi penduduk lansia di Indonesia, diawali pada bagian ketiga (Bab III) berupa kajian mengenai struktur demografis penduduk lansia, bagian keempat (Bab IV) mengenai kemampuan baca tulis, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan kemampuan berbahasa Indonesia penduduk lansia, bagian kelima (Bab V) mengenai kondisi kesehatan penduduk lansia, dan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan; bagian keenam (Bab VI) kegiatan lansia yang bekerja, lapangan usaha, dan status pekerjaan penduduk lansia yang bekerja.

METODOLOGI

http://www.bps.go.id



Metodologi

2.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2011 adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kor Susenas Tahun 2011, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi pemuda dari sisi demografi, kesehatan, pendidikan dan perumahan.
- b. Data Sakernas Tahun 2011, yang digunakan untuk melihat gambaran ketenagakerjaan penduduk lansia.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. BPS-RI melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir, sampai dengan tahun 2010, Susenas dilaksanakan setiap tahun. Mulai tahun 2011, Susenas dilaksanakan secara triwulanan (triwulan I–IV) yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Susenas mengumpulkan data kor (keterangan pokok) dan data modul (keterangan sasaran). Data kor dikumpulkan setiap tahun sedangkan data modul dikumpulkan secara bergiliran setiap 3 tahun sekali. Data modul mencakup Modul Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga, Modul Sosial Budaya dan Pendidikan serta Modul Perumahan dan Kesehatan.

Sesuai dengan gilirannya modul Susenas tahun 2011 adalah Modul Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga. Untuk meningkatkan akurasi data yang dihasilkan dan sejalan dengan peningkatan frekuensi permintaan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga untuk PDB/PDRB triwulanan dan penghitungan kemiskinan, maka pengumpulan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga mulai tahun 2011 dilaksanakan secara triwulanan. Setiap tahun akan dilakukan pengumpulan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

2.2 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Susenas 2011 mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan 497 Kab/Kota di Indonesia, di mana setiap triwulan akan didistribusikan sebanyak 75.000 rumah tangga. Data hasil pencacahan setiap triwulan dapat disajikan baik untuk tingkat nasional maupun provinsi, sedangkan dari kumulatif pelaksanaan pencacahan selama empat triwulan maka datanya dapat disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Susenas Tahun 2011 tidak mencakup rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa.

2.3 Konsep dan Definisi

- a. **Penduduk lanjut usia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas.
- b. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.
- c. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

Rumah Tangga Lansia adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 60 tahun ke atas.

- d. **Kepala Rumah Tangga (KRT)** adalah salah seorang dari anggota rumah tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
- e. **Anggota Rumah Tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- f. **Rasio jenis kelamin** adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.
- g. **Kawin** adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.
- h. **Cerai Hidup** adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.
- i. **Cerai Mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

j. **Pendidikan:**

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, SM/MA/sederajat dan PT.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- k. **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- l. **Bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/sederajat dan SMP/sederajat, pendidikan menengah yaitu SMA/sederajat dan pendidikan tinggi yaitu PT/sederajat) maupun non formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan instansi lainnya.
- m. **Angka Partisipasi Sekolah** adalah nilai perbandingan (dalam persen) banyaknya penduduk yang bersekolah terhadap total penduduk, menurut batasan umur sekolah pada setiap jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SM).
- n. **Tamat Sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- o. **Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah

tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Belum tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

- p. **Dapat Membaca dan Menulis** adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Buta Aksara/Huruf adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

- q. **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.

- r. **Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.

- s. **Angkatan Kerja Penduduk Lansia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja.

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.

- t. **Bukan Angkatan Kerja Lansia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.
- u. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia** adalah persentase angkatan kerja penduduk lansia terhadap penduduk lansia. TPAK dihitung dengan rumus:

$$\text{TPAK}_{\text{Lansia}} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Lansia}}{\text{Jumlah Penduduk Lansia}} \times 100\%$$

- v. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.
- w. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan.
- x. **Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

2.4 Keterbatasan Data

Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS RI, termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus tidak dicakup dalam survei.

2.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah provinsi. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai lansia selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi dengan Lampiran Tabel untuk melihat data pada tingkat provinsi.

STRUKTUR DEMOGRAFIS PENDUDUK LANSIA

http://www.bps.go.id



Struktur Demografis Penduduk Lansia

Lanjut usia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Banyak orang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi memberikan banyak manfaat, bahkan kehidupan masa tua seringkali dipersepsikan secara negatif sebagai beban keluarga dan masyarakat. Dari aspek sosial, penduduk lanjut usia merupakan satu kelompok sosial sendiri. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 setelah China, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar ini jika dikelola dengan baik akan menjadikan modal dasar dan aset yang berharga dalam proses pembangunan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menjadi sangat penting, karena selain sebagai sasaran dari pembangunan, juga sebagai pelaku pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada penduduknya, jika penduduknya berkualitas maka akan menjadi sumber/potensi yang kuat dalam pembangunan. Salah satu indikator pembangunan

adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Dengan berbagai latar belakang yang ada, penduduk Indonesia bisa menjadi kekuatan untuk membangun masyarakat sejahtera.

Dalam rangka kegiatan perencanaan pembangunan khususnya kegiatan perencanaan (sebagai input dan output) pembangunan serta penetapan prioritas pembangunan dalam bidang kependudukan, diperlukan data dasar kependudukan. Data tersebut antara lain berkaitan dengan jumlah dan struktur penduduk. Data jumlah dan struktur penduduk pada kegiatan perencanaan, sebagai input pembangunan digunakan sebagai rujukan untuk memperkirakan jumlah SDM atau tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, kegiatan perencanaan, sebagai output pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk digunakan untuk menentukan kelompok sasaran (*target groups*) pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah, penduduk miskin, dan lansia.

Pada kegiatan perencanaan pembangunan, salah satu jenis data dasar kependudukan yang sangat penting adalah data mengenai struktur demografis penduduk atau dikenal dengan komposisi penduduk menurut karakteristik demografis. Data penduduk menurut umur/kelompok umur antara lain digunakan untuk menentukan kelompok sasaran pembangunan yang ditetapkan berdasarkan umur. Misalnya, penduduk usia 0–4 tahun atau anak balita merupakan kelompok sasaran untuk program imunisasi yang merupakan salah satu program pembangunan di bidang kesehatan. Pada penduduk usia sekolah yang mencakup penduduk usia 7–12, 13–15 dan 16–18 tahun merupakan kelompok sasaran untuk pembangunan bidang pendidikan.

Kelompok sasaran pembangunan yang juga menjadi perhatian adalah penduduk usia 60 tahun ke atas atau penduduk lanjut usia (lansia). Pada abad millenium ini terjadi salah satu fenomena kependudukan, yaitu peningkatan jumlah lansia. Sebagai bagian dari proses transisi demografi, kemajuan pembangunan diyakini sebagai faktor signifikan terjadinya perubahan struktur penduduk. Dua faktor kependudukan yang saling melengkapi adalah penurunan tingkat mortalitas yang diiringi dengan semakin rendahnya angka fertilitas. Hal

ini merupakan dampak dari perubahan nilai pada masyarakat yang semakin antimortalitas, kesadaran pentingnya hidup sehat dan perlunya sedikit anak, serta kemajuan teknologi kedokteran merupakan bukti semakin maju peradaban manusia. Sejalan dengan itu, maka perumusan dan arah kebijakan pembangunan salah satunya ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lansia. Untuk itu dibutuhkan data atau informasi dasar yang berkaitan dengan jumlah dan struktur demografis penduduk lansia. Tersedianya data dasar tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan sasaran/target pembangunan. Uraian berikut ini difokuskan untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai jumlah dan komposisi penduduk lansia serta perkembangannya menurut karakteristik demografis antara lain umur, jenis kelamin, daerah tempat tinggal dan struktur dalam rumah tangga.

3.1. Struktur Penduduk Indonesia

Suatu negara dikatakan berstruktur tua jika mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen (www.haryono.com). Merujuk pada batasan tersebut, maka negara Indonesia termasuk negara berstruktur tua. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk lansia yang telah mencapai 7,58 persen dari keseluruhan penduduk, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara global dan nasional. Hal itu berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat yang meningkat. Keadaan ini telah memberikan peningkatan pada usia harapan hidup. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan.

Secara umum persentase lansia perempuan (8,13 persen) lebih besar dari persentase lansia laki-laki (7,03 persen). Sedangkan menurut sebarannya lebih banyak di daerah perdesaan (7,65 persen) dibandingkan dengan di daerah perkotaan (7,50 persen). Jika dilihat menurut kelompok umur, penduduk lansia terbagi menjadi lansia muda (60-69 tahun) sebesar 4,59

persen, lansia menengah/madya (70-79 tahun) sebesar 2,19 persen, dan lansia tua (80 tahun ke atas) sebesar 0,80 persen. Sementara itu, penduduk pra lansia yaitu kelompok umur 45-54 tahun dan 55-59 tahun masing-masing sebesar 11,04 persen dan 3,54 persen.

Keberadaan lansia tidak bisa dikesampingkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kepedulian akan kesejahteraan lansia tertuang dalam UU No 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia. UU tersebut mengamanatkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lansia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

**Tabel 3.1
Percentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur Lansia (Tahun), 2011**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur Lansia (Tahun)*					60+
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	10,87	3,57	4,44	1,92	0,62	6,98
Perempuan (P)	11,10	3,52	4,74	2,38	0,92	8,03
L+P	10,98	3,54	4,59	2,15	0,77	7,50
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	10,94	3,64	4,43	1,98	0,68	7,09
Perempuan (P)	11,27	3,44	4,76	2,50	0,98	8,23
L+P	11,10	3,54	4,59	2,23	0,83	7,65
K+D						
Laki-laki (L)	10,90	3,61	4,43	1,95	0,65	7,03
Perempuan (P)	11,19	3,48	4,75	2,44	0,95	8,13
L+P	11,04	3,54	4,59	2,19	0,80	7,58

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Keterangan: *) 45-54 tahun dan 55-59 tahun : Pra Lansia
 60-69 tahun : Lansia Muda
 70-79 tahun : Lansia Menengah/Madya
 80 tahun ke atas : Lansia Tua
 60 tahun ke atas : Lansia

Lampiran Tabel 3.1.3 menyajikan persentase penduduk lansia menurut provinsi tahun 2011. Provinsi yang memiliki persentase penduduk lansia di atas 7 persen adalah DI Yogyakarta (12,99 persen), Jawa Timur (10,40 persen), Jawa Tengah (10,34 persen), Bali (9,78 persen), Sulawesi Utara (8,45 persen), Sulawesi Selatan (8,34 persen), Sumatera Barat (8,09 persen), Nusa Tenggara Timur (7,58 persen), Nusa Tenggara Barat (7,23 persen), Lampung (7,20 persen), dan Jawa Barat (7,05 persen).

3.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan. Salah satunya adalah angka beban ketergantungan penduduk lansia. Akibat penurunan angka kelahiran dan makin tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia, jumlah penduduk lansia pun menjadi relatif besar, yang berarti angka ketergantungan penduduk lansia juga bisa meningkat. Rasio ketergantungan penduduk lansia (*old dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk lansia pada penduduk usia produktif. Angka tersebut merupakan perbandingan antara jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk produktif (15-59 tahun). Dari angka ini tercermin besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk lansia.

Hasil dari data susenas menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan penduduk lansia pada tahun 2011 adalah sebesar 12,01 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.2. Angka rasio sebesar 12,01 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 12 orang penduduk lansia. Namun bila dibandingkan dengan jenis kelamin, angka rasio ketergantungan penduduk lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia laki-laki (12,80 berbanding 11,23).

Tabel 3.2
Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Tipe Daerah	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	10,97	12,42	11,70
Perdesaan (D)	11,49	13,19	12,34
K+D	11,23	12,80	12,01

Sumber: BPS RI – Susenas 2011

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk lansia di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan penduduk lansia di daerah perkotaan. Pada tahun 2011, rasio ketergantungan penduduk lansia terhadap usia produktif di daerah perdesaan tercatat sebesar 12,34 sedangkan daerah perkotaan sebesar 11,70.

Besarnya rasio ketergantungan penduduk lansia menurut provinsi di Indonesia berkisar antara 2,95–20,06 seperti yang terlihat pada Lampiran Tabel 3.2. Provinsi yang memiliki rasio ketergantungan penduduk lansia tertinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 20,06, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 16,51 dan Jawa Timur sebesar 16,11. Sedangkan provinsi yang mempunyai rasio ketergantungan penduduk lansia terendah adalah Papua sebesar 2,95, Papua Barat sebesar 5,08 dan Kepulauan Riau sebesar 5,14.

3.3 Distribusi dan Komposisi Penduduk Lansia

Pada Tabel 3.3 ditampilkan perkiraan jumlah dan proporsi penduduk lansia pada tahun 2011. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 jumlah penduduk lansia Indonesia telah mencapai 18,27 juta orang atau sekitar 7,58 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Bila dibandingkan dengan jenis kelamin jumlah penduduk lansia perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 9,73 juta orang (8,13 persen dari seluruh penduduk perempuan), lebih banyak daripada laki-laki yang hanya 8,54 juta orang (7,03 persen dari

seluruh penduduk laki-laki). Kontribusi penduduk perempuan dalam populasi penduduk lansia yang lebih tinggi dari penduduk laki-laki disebabkan karena usia harapan hidup perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup laki-laki. Berdasarkan hasil SP2010, angka harapan hidup perempuan empat tahun lebih lama dibanding laki-laki, yaitu 72,6 tahun untuk perempuan dan 68,7 tahun untuk laki-laki.

Menurut tipe daerah, jumlah penduduk lansia yang tinggal di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu 9,26 juta orang (7,65 persen) dari keseluruhan penduduk perdesaan, sedangkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan jumlahnya sebesar 9,01 juta orang (7,50 persen) dari keseluruhan penduduk perdesaan.

**Tabel 3.3
Perkiraan Jumlah dan Proporsi Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2011**

Jenis Kelamin	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki (L)	4.199.422	6,98	4.343.670	7,09	8.543.092	7,03
Perempuan (P)	4.808.129	8,03	4.920.343	8,23	9.728.472	8,13
L+P	9.007.551	7,50	9.264.013	7,65	18.271.564	7,58

Sumber: BPS RI – Susenas 2011

Proporsi penduduk lansia tahun 2011 sangat bervariasi antar provinsi di Indonesia (Lampiran Tabel 3.1.3). Pada tabel tersebut tampak bahwa proporsi penduduk lansia berkisar antara 1,85 persen sampai dengan 12,99 persen. Provinsi yang mempunyai penduduk lansia dengan proporsi paling tinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (12,99 persen), kemudian Jawa Timur (10,40 persen) dan Jawa Tengah (10,34 persen). Sementara provinsi yang proporsi penduduk lansianya paling rendah adalah Provinsi Papua (1,85 persen), kemudian Papua

Barat (3,12 persen) dan Kepulauan Riau (3,41 persen). Pola yang sama terjadi pada penduduk lansia laki-laki maupun perempuan.

Tabel 3.4
Percentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2011

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	0,92	83,73	1,06	14,30	100,00
Perempuan (P)	1,28	37,28	2,91	58,54	100,00
L+P	1,11	58,93	2,05	37,91	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	0,51	83,20	1,35	14,94	100,00
Perempuan (P)	0,91	36,07	3,42	59,60	100,00
L+P	0,72	58,17	2,45	38,66	100,00
K+D					
Laki-laki (L)	0,71	83,46	1,21	14,63	100,00
Perempuan (P)	1,09	36,66	3,17	59,07	100,00
L+P	0,91	58,54	2,25	38,29	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Dilihat menurut status perkawinan, sebagian besar penduduk lansia berstatus kawin sebesar 58,54 persen, diikuti dengan lansia berstatus cerai mati sebesar 38,29 persen. Sedangkan penduduk lansia yang bersatus cerai hidup sebesar 2,25 persen dan yang belum kawin sebesar 0,91 persen (Tabel 3.4). Bila dilihat lebih rinci menurut jenis kelamin, pola status perkawinan penduduk lansia laki-laki berbeda dengan penduduk lansia perempuan. Sesuai dengan kenyataan bahwa usia harapan hidup perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup laki-laki, hal ini menimbulkan dugaan penyebab persentase lansia perempuan yang berstatus cerai mati lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki-laki. Persentase penduduk lansia laki-laki yang berstatus kawin (83,46 persen) lebih banyak dibandingkan dengan lansia yang berstatus cerai mati (14,63 persen). Sebaliknya, penduduk lansia perempuan yang berstatus cerai mati (59,07 persen) lebih banyak daripada yang berstatus

kawin (36,66 persen). Pola yang sama juga terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Terdapat fenomena yang menarik pada status perkawinan untuk lansia. Pada status perkawinan cerai terdapat perbedaan persentase yang cukup tinggi antara lansia perempuan dengan lansia laki-laki. Tingginya persentase lansia perempuan yang berstatus cerai dapat disebabkan karena sebagian besar kaum perempuan yang telah bercerai tidak segera kawin lagi untuk jangka waktu yang relatif lama. Sebaliknya, penduduk lansia laki-laki yang terpaksa bercerai karena ditinggal mati oleh pasangannya, umumnya segera kawin lagi.

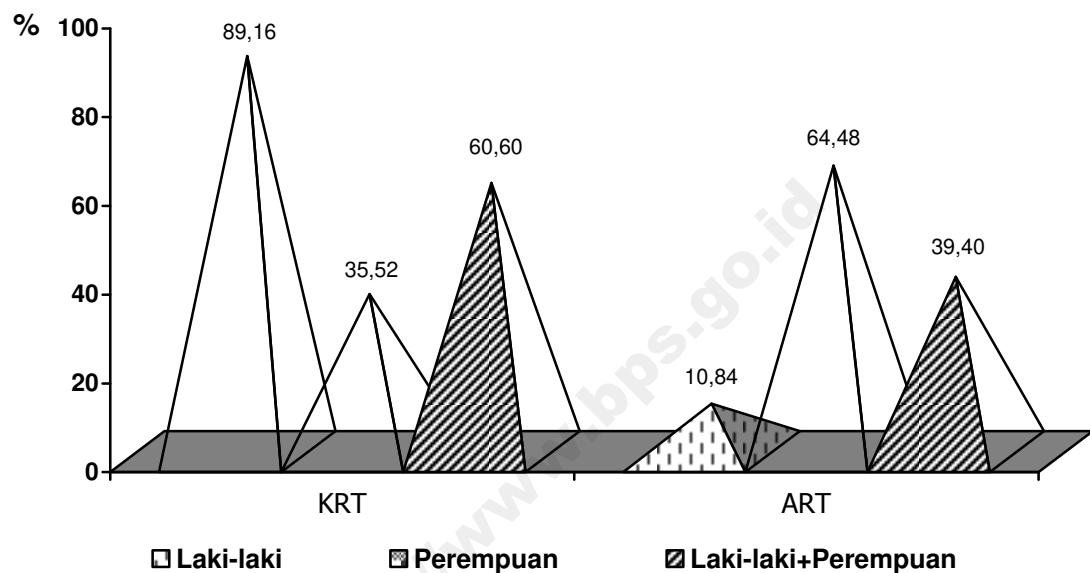
Struktur perkawinan penduduk lansia di setiap provinsi menunjukkan pola yang sama dengan struktur perkawinan penduduk lansia secara nasional. Keadaan ini dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.4.3, kecuali untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku. Provinsi-provinsi tersebut mempunyai pola persentase penduduk lansia yang berstatus belum kawin cenderung lebih tinggi dari mereka yang berstatus cerai hidup.

3.4 Peranan Penduduk Lansia di Dalam Rumah Tangga

Orang yang memimpin dan bertanggungjawab terhadap satu rumah tangga disebut sebagai kepala rumah tangga. Kedudukan kepala rumah tangga sangat penting dalam menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga. Selain harus bertanggung jawab secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, kepala rumah tangga juga harus mengatur dan memimpin anggota rumah tangganya, serta berperan sebagai pengambil keputusan.

Tanggung jawab seorang kepala rumah tangga sangat besar baik dilihat dari segi psikologis maupun ekonomi, dan ternyata masih banyak peran tersebut dipegang oleh penduduk lansia yang seharusnya dapat menikmati hari tuanya tanpa beban yang berat. Hasil studi lansia tahun 2011 menyatakan bahwa tingginya lansia sebagai kepala rumah tangga karena: 1) lansia masih menjadi tulang punggung keluarga dan 2) rumah yang ditempati milik lansia. Gambar 3.1, pada tahun 2011 sebagian besar (60,60 persen) penduduk lansia

masih memegang peranan penting di dalam lingkungan rumah tangga atau berstatus sebagai kepala rumah tangga, sedangkan yang berstatus sebagai anggota rumah tangga sebesar 39,40 persen. Tingginya persentase lansia sebagai kepala rumah tangga sejalan dengan tingginya lansia bekerja dengan jam kerja penuh (lebih dari 35 jam per minggu). Besarnya persentase penduduk lansia yang menjadi kepala rumah tangga perlu mendapat perhatian serius karena mereka dituntut beban dan tanggung jawab tinggi secara ekonomi terhadap anggota rumah tangganya.



Sumber: BPS RI – Susenas 2011

Gambar 3.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2011

Di sisi lain, seharusnya lansia sudah menikmati masa tuanya dengan sejahtera tanpa beban. Karenanya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia perlu disosialisasikan terutama kepada penduduk usia produktif.

Peran keanggotaan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara penduduk lansia laki-laki dan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2011, persentase penduduk lansia laki-laki

yang menjadi kepala rumah tangga sebesar 89,16 persen, sedangkan penduduk lansia perempuan hanya sebesar 35,52 persen.

Tabel 3.5

Persentase Penduduk 10 – 59 Tahun dan Penduduk 60 Tahun Ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, 2011

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Penduduk 10 – 59 Tahun		Penduduk 60 Tahun Ke Atas	
	KRT	ART	KRT	ART
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan (K)				
Laki-laki (L)	51,18	48,82	90,01	9,99
Perempuan (P)	6,63	93,37	36,04	63,96
L+P	28,92	71,08	61,20	38,80
Perdesaan (D)				
Laki-laki (L)	52,67	47,33	88,35	11,65
Perempuan (P)	5,93	94,07	35,02	64,98
L+P	29,61	70,39	60,02	39,98
K + D				
Laki-laki (L)	51,93	48,07	89,16	10,84
Perempuan (P)	6,28	93,72	35,52	64,48
L+P	29,26	70,74	60,60	39,40

Sumber: BPS RI – Susenas 2011

Tabel 3.5 menyajikan peran keanggotaan penduduk berumur 10-59 tahun dan penduduk lansia dalam rumah tangga. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa sebagian besar lansia berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Pola tersebut berbeda dengan pola umum penduduk berumur 10-59 tahun. Sebagian besar (70,74 persen) penduduk berumur 10-59 tahun berkedudukan sebagai anggota rumah tangga. Keadaan ini berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk perkotaan berumur 10-59 tahun yang berkedudukan sebagai anggota rumah tangga sebesar 71,08 persen dan di perdesaan sebesar 70,39 persen.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki berumur 10 tahun ke atas yang menjadi kepala rumah tangga lebih tinggi

dibandingkan penduduk perempuan. Pola yang sama terjadi pada penduduk berumur 10-59 tahun dan penduduk lansia (60 tahun ke atas) baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Hal tersebut sesuai dengan budaya masyarakat bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan dalam suatu kehidupan rumah tangga.

PENDIDIKAN PENDUDUK LANSIA

http://www.bps.go.id

4

Pendidikan Penduduk Lansia

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pembangunan di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Baik usia muda maupun tua mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Bagi penduduk usia muda, pendidikan merupakan hal yang mutlak diperlukan

untuk kelangsungan hidup di masa depan. Penduduk yang berusia tua pun juga perlu mendapatkan pendidikan, seperti yang tertuang dalam UU Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab III Pasal 5 Ayat (2)d tentang hak dan kewajiban lansia, bahwa lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial salah satunya dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang memadai diharapkan timbul rasa kemandirian pada lansia sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat.

Sejalan dengan itu, dalam UU tersebut Bab VI Pasal 16 Ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berkaitan dengan UU tersebut diatas, pemerintah telah berupaya menyelenggarakan berbagai program yang ditujukan dalam meningkatkan pendidikan sekaligus kesejahteraan penduduk lansia, antara lain program Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan dasar) dan dilanjutkan dengan program keaksaraan (keaksaraan fungsional). Keseluruhan program yang diselenggarakan pemerintah tersebut pada dasarnya mencerminkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan bangsa.

Program pembangunan pendidikan serta pengembangan dan peningkatan ketrampilan bagi penduduk lansia memerlukan penanganan yang lebih khusus dan terfokus. Hal ini sesuai dengan karakteristik penduduk lansia yang berbeda dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya, seperti balita, remaja dan pemuda. Jika kelompok penduduk lainnya seperti balita, remaja dan pemuda memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang makin berkembang dan meningkat, sebaliknya penduduk lansia memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang semakin menurun karena proses menua yang terjadi pada mereka secara alamiah.

4.1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan yang tinggi, yang ditunjang dengan kondisi kesehatan yang baik, pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk

mencapai kehidupan yang sejahtera. Tentu pendidikan dan kesejahteraan tidak memiliki hubungan yang bersifat langsung, akan tetapi melalui proses panjang dimana pendidikan yang baik akan memberi peluang pada anggota masyarakat untuk dapat terlibat di dalam proses pembangunan ekonomi. Kondisi pendidikan dan kesehatan yang baik merupakan prasyarat terbentuknya SDM yang berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas maka masyarakat akan memiliki produktivitas tinggi. Produktivitas yang tinggi pada gilirannya akan berkontribusi sangat signifikan pada upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu upaya peningkatan bidang pendidikan adalah dengan penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang semakin baik. Semakin tinggi akses terhadap fasilitas pendidikan, diharapkan semakin banyak pula penduduk yang dapat bersekolah, sehingga pemerataan pendidikan dapat terwujud. Kemudahan fasilitas pendidikan dapat dirasakan oleh generasi muda saat ini, namun tidak dirasakan oleh generasi tua di jamannya seperti pada masa kemerdekaan.

**Tabel 4.1
Persentase Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007, 2009, dan 2011**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2007			2009			2011		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak/belum pernah sekolah	20,61	49,47	36,12	17,87	44,53	32,28	15,31	39,68	28,29
Tdk tamat SD	32,27	27,27	29,58	31,44	27,89	29,52	32,59	31,60	32,06
SD	27,48	15,16	20,86	29,27	17,68	23,01	29,26	18,24	23,39
SMP	7,78	4,01	5,75	7,69	4,30	5,85	8,20	4,53	6,25
SM+	11,86	4,10	7,69	13,74	5,60	9,34	14,64	5,96	10,02
Jumlah	100,00								

Sumber: BPS RI - Susenas 2007, 2009, dan 2011

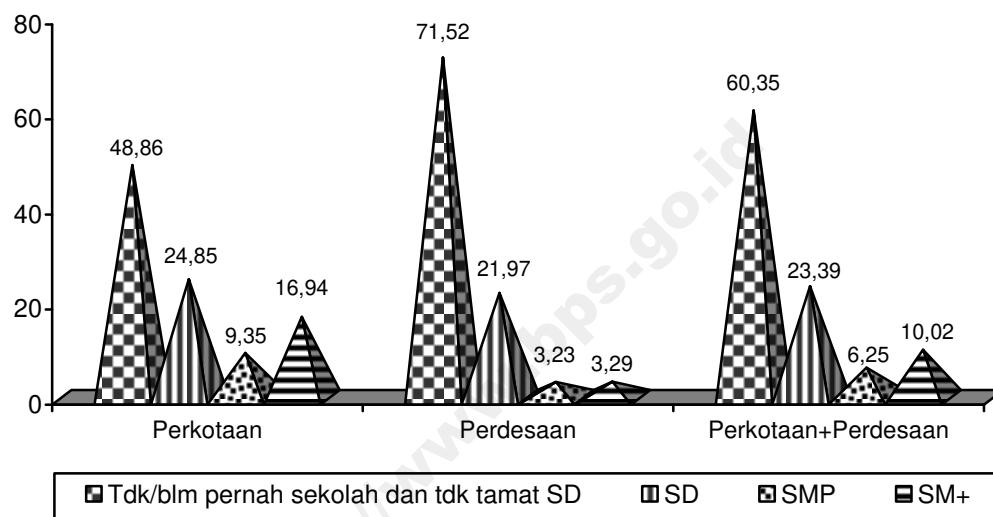
Dari hasil Susenas 2011, terlihat bahwa pendidikan penduduk lansia relatif masih rendah. Mereka yang berpendidikan tamat SD sebesar 23,39 persen. Bahkan mereka yang tidak menamatkan SD dan yang tidak/belum

pernah sekolah persentasenya mencapai 60,35 persen. Di sisi lain, persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi relatif rendah. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan sampai jenjang SMP hanya sebesar 6,25 persen, SM ke atas sebesar 10,02 persen. Rendahnya pendidikan penduduk lansia tersebut memperlihatkan kualitas SDM lansia secara umum masih rendah. Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan akibat sisa-sisa penjajahan pada masa kemerdekaan menjadi salah satu faktor penyebab tingkat pendidikan lansia yang masih relatif rendah.

Tabel 4.1 juga menggambarkan bahwa budaya patriarkhi masih kental di dunia pendidikan dalam keluarga di era tahun 45-an, dimana orang tua mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Kesenjangan terjadi pada semua jenjang pendidikan dengan selisih persentase yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 persentase penduduk lansia laki-laki yang tidak pernah sekolah hanya sebesar 15,31 persen, sedangkan untuk penduduk lansia perempuan melebihi dua kali lipatnya yaitu sebesar 39,68 persen. Sebaliknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, persentase penduduk lansia laki-laki lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan penduduk lansia laki-laki lebih baik dari penduduk lansia perempuan. Sebuah fenomena yang menarik dari indikasi terjadinya kesenjangan gender dalam akses memperoleh pelayanan pendidikan di masa lalu. Ini merupakan gambaran/pola pendidikan di masa Indonesia baru merdeka di tahun '45-an.

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 dan 2009, persentase penduduk lansia yang tidak/belum pernah sekolah sedikit mengalami penurunan, yaitu dari 36,12 pada tahun 2007 menjadi 32,28 persen pada tahun 2009 dan turun menjadi 28,29 persen pada tahun 2011. Sedangkan untuk yang tidak tamat SD terjadi peningkatan dari 29,52 persen pada tahun 2009 menjadi 32,06 persen pada tahun 2011. Secara umum, persentase penduduk lansia dengan pendidikan rendah tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana persentasenya relatif masih tinggi.

Tingkat pendidikan lansia yang secara umum masih relatif rendah, hampir terdapat di semua provinsi. Pada Tabel Lampiran 4.1.3. dapat dilihat bahwa sekitar 28,29 persen penduduk lansia tidak/belum pernah sekolah dan 32,06 persen tidak tamat SD. Persentase tertinggi lansia yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (53,94 persen), Kalimantan Barat (42,49 persen) dan Jawa Timur (37,99 persen). Sebaliknya, persentase penduduk lansia terendah yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara (2,18 persen), Gorontalo (8,03 persen) dan Sumatera Barat (8,80 persen).



Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011

Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa pendidikan penduduk lansia di daerah perkotaan cenderung lebih baik dari penduduk lansia yang tinggal di daerah perdesaan. Persentase penduduk lansia di daerah perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan SD ke atas cenderung lebih tinggi (51,14 persen) dibanding penduduk lansia di daerah perdesaan (28,48 persen). Sebaliknya, penduduk lansia yang tidak/belum pernah sekolah dan yang tidak tamat SD cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan (71,52 persen) dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan (48,86 persen). Meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di masa kemerdekaan, di daerah perkotaan pada umumnya ketersediaan fasilitas pendidikan masih cukup memadai

dibanding daerah perdesaan. Akses masyarakat perkotaan dalam memperoleh pelayanan pendidikan masih lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini diduga menjadi dasar adanya kesenjangan pendidikan yang ditamatkan antara penduduk lansia di daerah perkotaan dan perdesaan.

4.2 Kemampuan Membaca dan Menulis

Mencapai pendidikan dasar untuk semua merupakan tujuan kedua dari MDGs. Penilaian terhadap pencapaian tujuan kedua dari MDGs didasarkan atas empat indikator yaitu angka partisipasi sekolah (APS), angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rasio murid laki-laki dan perempuan. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan dasar pengembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun masyarakat. Pada kelas awal jenjang pendidikan dasar atau Sekolah Dasar (SD) yang diajarkan pertama kali pada siswa adalah kemampuan dasar membaca dan menulis huruf latin serta berhitung sederhana. Dengan menguasai baca tulis huruf latin dan berhitung sederhana, diharapkan setiap orang dapat mempelajari ketrampilan dan keahlian lainnya.

Penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis atau biasa disebut buta aksara merupakan indikator dasar yang bisa digunakan untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat. Angka buta aksara menunjukkan proporsi penduduk buta aksara terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Program Keaksaraan Fungsional (KF) bertujuan untuk penuntasan buta aksara. Prioritas program KF adalah penduduk buta aksara usia 15-44 tahun. Namun dalam kenyataan hampir 10 persen peserta KF berusia 60 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar dan kemajuan untuk membaca dan menulis lansia masih cukup besar (Laporan Ringkas SBA 2007).

Pada Tabel 4.2. disajikan persentase buta aksara penduduk 15 tahun ke atas dan penduduk lansia pada tahun 2011. Tingkat buta aksara penduduk 15 tahun ke atas sebesar 7,19 persen, sebagian besar merupakan penduduk usia 45 tahun ke atas termasuk di dalamnya penduduk lansia. Bila dibandingkan antara kelompok umur 15-59 tahun dengan penduduk lansia, angka buta

aksara penduduk lansia relatif cukup tinggi yang mencapai dua digit yaitu sebesar 30,19 persen dari total keseluruhan penduduk lansia, sedangkan kelompok umur 15-59 tahun sebesar 4,43 persen.

Tabel 4.2
Percentase Penduduk 15-59 Tahun, 15 Tahun Ke Atas dan Lansia yang Buta Aksara menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	15-59 Tahun	Lansia (60+)	15 Tahun Ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Laki-laki	1,34	11,24	2,32
Perempuan	3,09	31,94	6,28
Laki-laki+Perempuan	2,22	22,29	4,32
Perdesaan			
Laki-laki	4,64	22,88	6,52
Perempuan	8,76	51,10	13,70
Laki-laki+Perempuan	6,69	37,87	10,11
Perkotaan+Perdesaan			
Laki-laki	2,98	17,16	4,41
Perempuan	5,87	41,63	9,93
Laki-laki+Perempuan	4,43	30,19	7,19

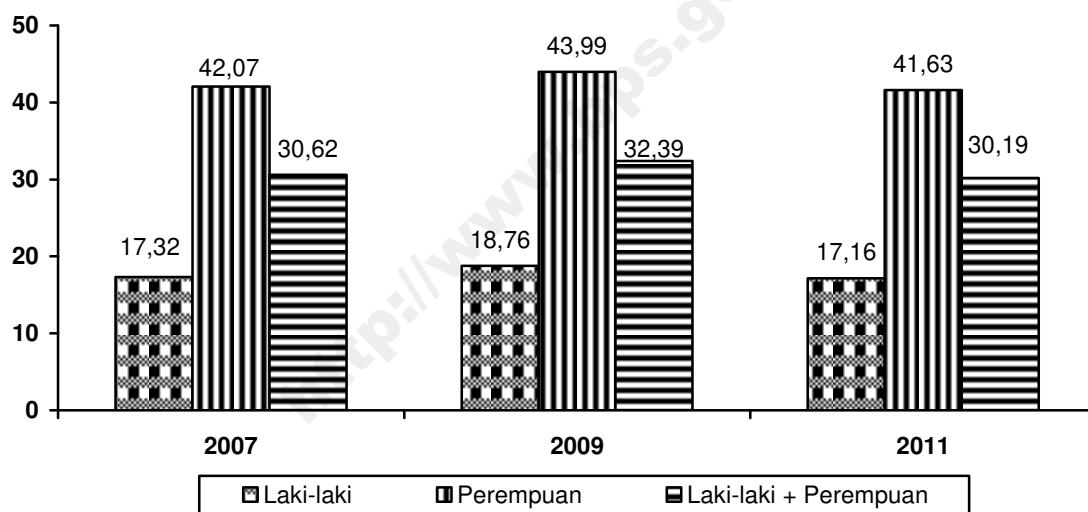
Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Angka buta aksara lansia yang cukup tinggi ini sejalan dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi bangsa Indonesia pada 60 tahun yang lalu. Pada saat itu bangsa Indonesia baru melepaskan diri dari belenggu penjajahan sehingga pembangunan infrastruktur serta berbagai fasilitas termasuk fasilitas pendidikan pada masa itu dilakukan masih dalam skala yang sangat terbatas. Kondisi ini berbeda dengan pembangunan masa kini yang mempunyai fasilitas pendidikan lebih baik sehingga angka buta aksara penduduk 15 tahun ke atas jauh lebih kecil.

Keterbatasan berbagai fasilitas dalam bidang pendidikan di masa lalu cenderung lebih banyak dirasakan oleh penduduk lansia yang berada di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Kondisi ini tercermin dari angka buta aksara penduduk lansia di daerah perdesaan yang lebih tinggi daripada

daerah perkotaan. Angka buta aksara penduduk lansia di daerah perdesaan mencapai sebesar 37,87, sedangkan di daerah perkotaan 22,29 persen. Pola tersebut berlaku pula untuk penduduk berumur 15 tahun ke atas yang angkanya banyak dipengaruhi oleh penduduk lansia. Penduduk 15 tahun ke atas di daerah perdesaan yang buta aksara mencapai 10,11 persen, sebaliknya di daerah perkotaan hanya 4,32 persen.

Gambar 4.2. menyajikan angka buta aksara penduduk lansia menurut gender pada tahun 2007, 2009 dan 2011. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi penurunan angka buta aksara lansia dari 32,39 persen pada tahun 2009 menjadi 30,19 persen pada tahun 2011. Penurunan angka buta aksara lansia tersebut menunjukkan adanya kemajuan/peningkatan kualitas penduduk lansia dalam hal kemampuan membaca dan menulis, meskipun angkanya relatif masih cukup tinggi.



Sumber: BPS RI - Susenas 2007, 2009 dan 2011

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Lansia yang Buta Aksara menurut Jenis Kelamin, 2007, 2009, dan 2011

Bila dilihat menurut jenis kelamin, terjadi kesenjangan yang cukup tinggi dalam hal kemampuan baca tulis antara penduduk lansia laki-laki dan perempuan. Keadaan tersebut sudah terjadi sejak lama. Salah satu alasan yang mempengaruhinya adalah karena adanya sistem budaya patriarkhi masyarakat Indonesia saat itu yang cenderung lebih mengutamakan kaum laki-laki (lihat

antara lain Irianto et al, 2002). Pada Gambar 4.2. dapat dilihat bahwa persentase penduduk lansia perempuan yang buta aksara dua kali lipat atau lebih dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki (41,63 persen berbanding 17,16 persen) pada tahun 2011. Hal yang sama terjadi pada tahun 2007 untuk lansia yang buta aksara (lansia perempuan 42,07 persen dan lansia laki-laki 17,32 persen) dan tahun 2007 untuk lansia yang buta aksara (lansia perempuan 43,99 persen dan lansia laki-laki 18,76 persen).

Tabel Lampiran 4.2.9 menunjukkan bahwa persentase lansia yang buta aksara antar provinsi sangat bervariasi antara 3,07–56,52 persen. Angka buta aksara lansia tertinggi secara berturut-turut ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (56,52 persen), Jawa Timur (42,38 persen), dan Bali (40,10 persen). Sebaliknya, persentase lansia yang buta aksara terendah secara berturut-turut ditemukan di Provinsi Sulawesi Utara (3,07 persen), DKI Jakarta (4,45 persen) dan Maluku (10,15 persen).

http://www.bps.go.id

KESEHATAN PENDUDUK LANSIA

http://www.bps.go.id



Kesehatan Penduduk Lansia

Ada sebuah pepatah "*Men sana incorpore sand*" yang berarti didalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan merupakan bagian dari unsur kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan, yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kualitas hidup yang baik akan didapat bila seseorang memiliki kesehatan yang prima, baik fisik, mental, spiritual dan sosial. Seseorang yang mempunyai badan sehat akan dapat melakukan kegiatan lebih baik dan optimal bila dibandingkan dengan kesehatan orang yang sedang terganggu kesehatannya. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan setiap manusia.

Tingkat/derajat kesehatan penduduk merupakan salah satu cermin dari tingginya kualitas SDM suatu bangsa. Hal ini dikarenakan SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh sebab itu, upaya untuk membangun kualitas SDM tetap menjadi perhatian penting dalam setiap program pembangunan pemerintah.

Dalam upaya membangun kualitas SDM yang handal, program pembangunan yang dijalankan pemerintah dalam bidang kesehatan mencakup semua usia, termasuk penduduk lansia. Aspek kesehatan bagi penduduk lansia sangat penting karena pada umumnya daya tahan tubuh mereka berkurang sejalan dengan bertambahnya umur. Penurunan daya tahan tubuh lansia hingga tingkat tertentu dapat mengakibatkan menjadi rentan atau mudah terserang berbagai penyakit. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya dari semua pihak agar para lansia memiliki kesehatan yang prima dalam rangka melanjutkan aktivitas kehidupannya.

Berkaitan dengan itu tersebut diatas, upaya yang dapat dilakukan agar lansia selalu memiliki kesehatan yang prima adalah dengan: (i) meningkatkan kesadaran para lansia untuk membina sendiri kesehatannya; (ii) meningkatkan kemampuan dan peran serta keluarga dan masyarakat dalam menghayati dan mengatasi kesehatan lansia; (iii) meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan kesehatan lansia; (iv) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia (Siti Partini Suardiman; 2007).

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan lansia dituangkan dalam UU Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab VI Pasal 14 Ayat (1) tentang pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pada Ayat (2) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah berupa peningkatan: a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lansia; b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik; c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dan pada Ayat (3) disebutkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu penelitian mengenai pelayanan kesehatan lansia adalah penelitian pelayanan kesehatan lansia di rumah sakit. Penelitian menyimpulkan bahwa rumah sakit memiliki kecenderungan memberikan perlindungan kepada lansia dalam pemenuhan hak atas kesehatannya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala, seperti anggaran untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk lanjut usia masih menyatu dengan anggaran rumah sakit secara keseluruhan, kurangnya dukungan Pemerintah Daerah maupun DPRD (belum ada kebijakan yang dikeluarkan bagi perlindungan lansia di rumah sakit), belum adanya landasan yuridis (peraturan pemerintah), dan terbatasnya SDM (staf) pelayanan kesehatan lansia. Penelitian tersebut merekomendasikan perlunya peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan lansia dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan, dan perlunya anggaran khusus program lansia.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan khusus untuk lansia diantaranya posyandu lansia. Pelayanan kesehatan ini disediakan sebagai sarana pencegahan dan pengobatan agar lansia selalu terpantau kesehatannya. Posyandu lansia juga merupakan ajang komunikasi sesama lansia.

Berdasarkan ilmu kesehatan, semakin lansia aktif maka akan semakin baik daya tahan fisik, pikiran, dan kebahagiaannya. Kondisi kesehatan penduduk

lansia tidak hanya dipengaruhi pola kehidupan sekarang, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola hidup semasa mudanya. Kondisi kesehatan seseorang pada saat sekarang ini merupakan hasil proses akumulasi yang terjadi semenjak manusia dalam kandungan sampai sekarang. Secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai pola hidup sehat dari masa kecil, remaja, dewasa hingga lansia, kondisi kesehatannya akan lebih baik dibandingkan dengan lansia yang masa lalunya tidak berperilaku hidup sehat.

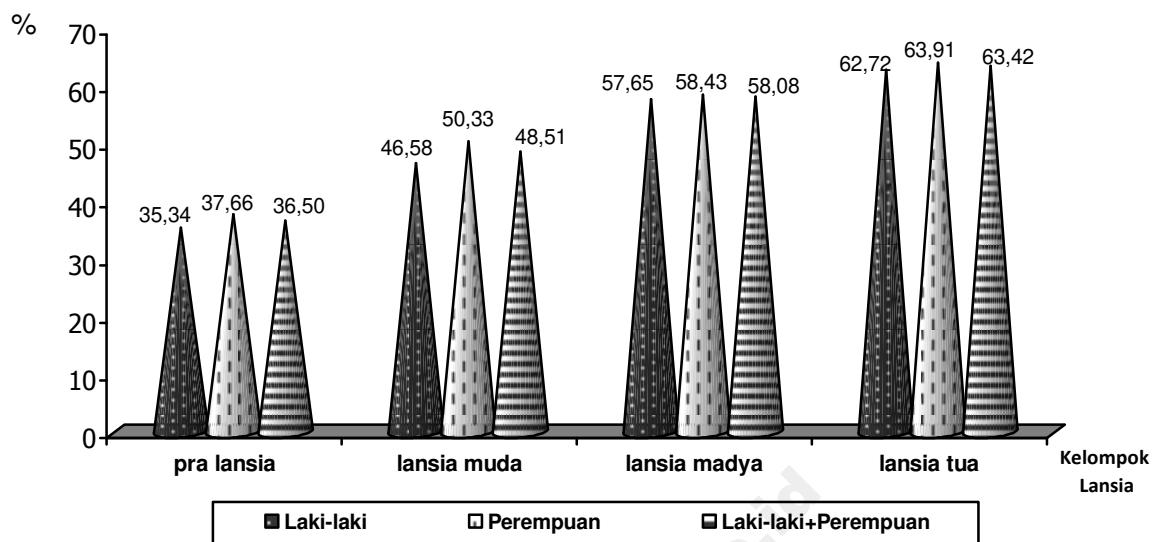
Gambaran makro mengenai kondisi kesehatan penduduk lansia yang dibahas pada bagian ini meliputi angka keluhan kesehatan, angka kesakitan, rata-rata lama sakit, dan cara berobat penduduk lansia.

5.1 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau sebab lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, namun terjadinya keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh penduduk dapat menggambarkan tingkat/derajat kesehatan secara kasar.

Secara umum persentase penduduk pra lansia dan lansia yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dapat dilihat pada Gambar 5.1. Semakin tinggi kelompok umur pra lansia dan lansia maka persentase yang mengalami keluhan kesehatan semakin besar, yaitu kelompok umur 45-59 tahun (36,50 persen), 60-69 tahun (48,51 persen), 70-79 tahun (58,08 persen) dan 80 ke atas (63,42 persen). Berdasarkan data tersebut keluhan kesehatan lansia rata-rata di atas lima puluh persen. Bila dilihat menurut jenis kelamin, lansia perempuan lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan laki-laki pada semua kelompok umur. Kelompok umur 45-59 tahun perbandingan antara lansia laki-laki dan perempuan, yaitu 35,34 persen dan 37,66 persen, kelompok umur 60-69 tahun perbandingan antara lansia laki-laki dan perempuan, yaitu 46,58 persen dan 50,33 persen, kelompok umur 70-79 tahun perbandingan antara lansia laki-laki dan perempuan, yaitu 57,65 persen dan

58,43 persen, dan kelompok umur 80 tahun ke atas perbandingan antara lansia laki-laki dan perempuan, yaitu 62,72 persen dan 63,91 persen.



Sumber: BPS RI – Susenas 2011

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kelompok Lansia dan Jenis Kelamin, 2011

Tiga provinsi dengan persentase tertinggi penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan berturut-turut adalah Provinsi Aceh (65,73 persen), Nusa Tenggara Barat (64,59 persen), dan Gorontalo (64,10 persen). Sebaliknya, persentase terendah penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan secara berturut-turut ditemukan di Provinsi Kepulauan Riau (42,75 persen), Papua Barat (44,50 persen), dan Sulawesi Utara (45,09 persen) seperti yang disajikan pada Lampiran Tabel 5.1.

Masalah umum yang dialami lansia yang berhubungan dengan kesehatan fisik, yaitu rentannya terhadap berbagai penyakit, karena berkurangnya daya tahan tubuh. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik dan daya tahan tubuh lansia adalah pola hidup yang dijalannya sejak usia balita hingga sekarang. Pola hidup yang kurang sehat membawa akibat pada penurunan daya tahan tubuh sehingga akan timbul berbagai keluhan kesehatan terutama pada masa tua.

Berbagai penelitian mengenai penyakit penduduk lansia, diantaranya menemukan bahwa umumnya lansia menderita penyakit yang berhubungan dengan ketuaan dan merupakan penyakit kronis antara lain diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, rematik, asma, lumpuh separuh badan, TBC paru, patah tulang, kanker dan kekurangan gizi.

**Tabel 5.1
Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan
Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kelompok Lansia, Jenis
Kelamin, dan Jenis Keluhan, 2011**

Kelompok Lansia/ Jenis Kelamin	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala Berulang	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45-59 Tahun (Pra Lansia)								
Laki-laki (L)	8,61	14,56	12,58	2,09	1,61	6,48	2,22	15,68
Perempuan (P)	7,61	12,37	10,80	1,97	1,44	8,85	1,99	19,60
L+P	8,11	13,47	11,69	2,03	1,52	7,66	2,10	17,64
60-69 Tahun (Lansia Muda)								
Laki-laki (L)	9,24	18,14	13,05	4,75	1,66	7,14	1,90	25,75
Perempuan (P)	9,00	16,27	11,74	4,27	1,72	10,93	1,57	31,16
L+P	9,12	17,18	12,38	4,50	1,70	9,08	1,73	28,53
70-79 Tahun (Lansia Madya)								
Laki-laki (L)	10,14	21,34	13,17	8,85	2,05	9,00	1,37	36,08
Perempuan (P)	10,05	17,92	11,98	5,34	2,12	11,94	1,18	40,03
L+P	10,09	19,45	12,51	6,91	2,09	10,62	1,26	38,26
80 Tahun Ke atas (Lansia Tua)								
Laki-laki (L)	10,54	23,08	13,09	10,46	2,28	10,34	0,78	42,23
Perempuan (P)	10,85	18,96	11,19	6,24	2,55	12,38	1,02	45,69
L+P	10,72	20,65	11,97	7,98	2,43	11,54	0,92	44,27

Sumber: BPS RI – Susenas 2011

Gambaran penyakit/keluhan kesehatan yang banyak dialami oleh penduduk pra lansia dan lansia tersebut tersaji pada Tabel 5.1. Semakin tinggi kelompok umur lansia maka keluhan kesehatan yang dialaminya dengan berbagai jenis keluhan semakin meningkat kecuali sakit gigi menurun. Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dialami pra lansia dan lansia dari berbagai kelompok umur adalah keluhan lainnya, yaitu jenis keluhan kesehatan

yang umumnya diderita lansia antara lain penyakit kronis seperti asam urat, darah tinggi, rematik, darah rendah, dan diabetes. Jenis keluhan lainnya untuk kelompok umur 45-59 tahun (17,64 persen), kelompok umur 60-69 tahun (28,53 persen), kelompok umur 70-79 tahun (38,26 persen) dan kelompok umur 80 tahun ke atas (44,27 persen). Jenis keluhan yang juga banyak dialami pra lansia dan lansia adalah jenis keluhan yang biasanya banyak dialami oleh masyarakat umum yaitu batuk dan pilek.

Bila dilihat menurut gender, persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan pada semua jenis keluhan sebagian besar dialami oleh penduduk lansia laki-laki dibandingkan lansia perempuan. Jenis keluhan yang paling dialami lansia laki-laki adalah panas, batuk, pilek, dan asma. Sementara untuk lansia perempuan jenis keluhannya adalah sakit kepala berulang, sakit gigi dan lainnya.

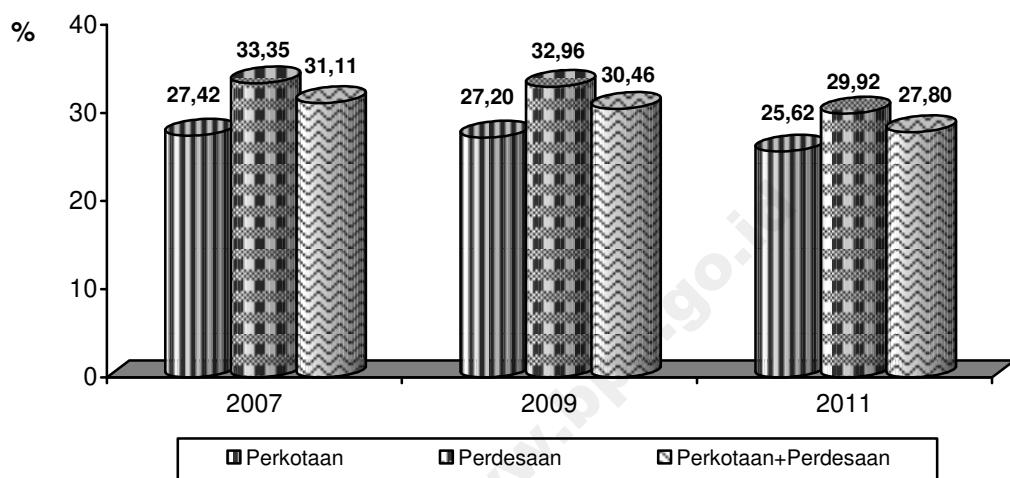
5.2 Angka Kesakitan

Seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan dapat mengganggu aktivitas sehari-harinya yaitu tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya. Kondisi ini terjadi pula pada penduduk lansia. Daya tahan tubuh yang menurun sehingga rentan terhadap penyakit merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya penduduk lansia yang mengalami sakit.

Angka kesakitan (*morbidity rates*) lansia adalah proporsi penduduk lansia yang mengalami masalah kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Angka kesakitan tergolong sebagai indikator kesehatan negatif. Semakin tinggi angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.

Angka kesakitan penduduk lansia tahun 2011 sebesar 27,80 persen, artinya bahwa dari setiap 100 orang lansia terdapat sekitar 27 orang diantaranya mengalami sakit. Angka kesakitan penduduk lansia perkotaan (25,62 persen) lebih rendah dibandingkan lansia perdesaan (29,92 persen). Hal ini menunjukkan

bahwa derajat kesehatan penduduk lansia di perkotaan cenderung lebih baik dibandingkan derajat kesehatan penduduk lansia di perdesaan. Bila dilihat perkembangannya, derajat kesehatan penduduk lansia mengalami peningkatan (Gambar 5.2). Angka kesakitan penduduk lansia pada tahun 2007 sebesar 31,11 persen turun pada tahun 2009 menjadi 30,46 persen, dan angkanya menurun lagi pada tahun 2011 menjadi 27,80 persen. Penurunan ini menunjukkan indikasi derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik. Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.



Sumber: BPS RI – Susenas 2007, 2009, dan 2011

Gambar 5.2 Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, 2007, 2009, dan 2011

Pada Lampiran Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa angka kesakitan penduduk lansia bervariasi pada masing-masing provinsi dengan persentase berkisar antara 22,20–41,74 persen. Angka kesakitan penduduk lansia tertinggi terdapat di Provinsi Aceh (41,74 persen), Nusa Tenggara Barat (39,19 persen) dan Gorontalo (38,16 persen). Sebaliknya, angka kesakitan terendah terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (22,20 persen), Sumatera Selatan (23,56 persen) dan Bangka Belitung (24,18 persen).

5.3 Lama Sakit

Daya tahan tubuh dalam menangkal suatu jenis penyakit berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Waktu yang diperlukan seseorang dalam rangka proses penyembuhan sakitnya juga bervariasi. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan daya tahan tubuhnya sangat lemah, begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa daya tahan tubuh dapat mencerminkan berapa lama seseorang menderita sakit.

Lamanya seseorang menderita sakit juga dapat menunjukkan intensitas atau derajat sakit serta bobot penyakit yang diderita seseorang. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan bahwa sakit yang dideritanya cukup parah, dan sebaliknya.

**Tabel 5.2
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan
Tipe Daerah, 2011**

Lama Sakit (Hari)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1 – 3	41,39	39,03	40,10
4 – 7	32,15	34,77	33,58
8 – 14	6,16	7,11	6,68
15 – 21	3,95	4,03	3,99
22 – 30	16,35	15,07	15,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI – Susenas 2011

Tabel 5.2 menyajikan persentase penduduk lansia yang menderita sakit menurut lamanya sakit. Tabel tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar lansia mengalami sakit tidak lebih dari seminggu. Persentase penduduk lansia yang menderita sakit selama 1–3 hari sebesar 40,10 persen dan yang menderita sakit selama 4–7 hari sebesar 33,58 persen. Sisanya adalah mereka yang menderita sakit lebih dari seminggu (sekitar 8 sampai dengan 30 hari). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.

Persentase penduduk lansia perkotaan yang mengalami sakit selama 1–3 hari sebesar 41,39 persen dan yang sakit selama 4–7 hari sebesar 32,15 persen, sedangkan lansia perdesaan yang mengalami sakit selama 1–3 hari dan 4–7 hari masing-masing tercatat sebesar 39,03 persen dan 34,77 persen.

Pada Lampiran Tabel 5.3.3 dapat dilihat persentase lansia yang sakit menurut lama hari sakit dan provinsi. Pada kelompok lama sakit 1–3 hari, persentasenya berkisar antara 29,72–51,27 persen dan pada kelompok lama sakit 4–7 hari persentasenya berkisar antar 26,95–45,19 persen. Pada kelompok lama sakit lansia antara 1–3 hari, provinsi yang mempunyai persentase paling tinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (51,27 persen), Kalimantan Tengah (50,70 persen) dan Sumatera Selatan (48,30 persen). Sebaliknya, persentase terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat (29,72 persen), Nusa Tenggara Timur (32,09 persen) dan Papua (32,48 persen). Pada kelompok lama sakit lansia antara 4–7 hari, provinsi yang mempunyai persentase paling tinggi terdapat di Provinsi Papua (45,19 persen), Nusa Tenggara Timur (42,06 persen) dan Sulawesi Barat (41,01 persen). Sebaliknya, persentase terendah secara berturut-turut terdapat di Provinsi Bali (26,95 persen), Kalimantan Selatan (28,30 persen) dan Sulawesi Selatan (28,34 persen).

5.4 Cara Berobat

Tindakan seseorang untuk mencari berbagai cara pengobatan dalam upaya penyembuhan mencerminkan orang tersebut peduli akan kesehatannya. Cara pengobatan yang bisa dilakukan adalah dengan berobat sendiri atau mendatangi tempat pelayanan kesehatan, baik modern maupun tradisional, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah pasien.

Cara pengobatan sendiri adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan berbagai jenis obat baik obat tradisional, modern, lainnya (selain obat modern dan tradisional) maupun obat campuran (lebih dari satu jenis obat). Tabel 5.3 memberikan gambaran tentang lansia yang mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dideritanya menurut lamanya sakit dengan jenis obat yang digunakan. Secara umum tampak bahwa berapapun

lamanya sakit (baik yang kurang dua minggu atau lebih dari dua minggu), lansia lebih banyak memilih menggunakan obat modern, kemudian diikuti dengan jenis pengobatan campuran. Pola yang sama juga terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 5.3
Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Tipe Daerah, Lamanya Sakit, dan Jenis Obat yang Digunakan, 2011

Tipe Daerah/ Lama Sakit	Tradisional	Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
< 15 hari	8,41	64,98	0,82	25,79	100,00
15 – 21 hari	8,45	65,91	0,00	25,64	100,00
22-30 hari	13,01	43,82	1,99	41,18	100,00
Total	9,03	62,18	0,94	27,85	100,00
Perdesaan (D)					
< 15 hari	10,53	57,35	1,00	31,12	100,00
15 – 21 hari	12,11	51,74	0,79	35,36	100,00
22-30 hari	17,53	39,82	1,58	41,07	100,00
Total	11,47	54,92	1,07	32,54	100,00
K+D					
< 15 hari	9,61	60,65	0,92	28,82	100,00
15 – 21 hari	10,51	57,93	0,44	31,12	100,00
22-30 hari	15,49	41,62	1,77	41,12	100,00
Total	10,41	58,08	1,01	30,50	100,00

Sumber: BPS RI – Susenas 2011

Pada tahun 2011, obat modern menjadi pilihan utama sebagian besar penduduk lansia (58,08 persen) dalam rangka mengobati sendiri sakitnya, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.4. Selain obat modern, lansia juga menggunakan jenis obat campuran, tradisional dan lainnya dalam mengobati sendiri sakitnya, namun persentasenya relatif rendah. Mereka yang menggunakan obat campuran sebesar 30,50 persen, obat tradisional 10,41 persen, dan obat lainnya hanya 1,01 persen.

Bila dilihat menurut tipe daerah, penggunaan obat modern tidak saja diminati oleh penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan (62,18 persen)

melainkan juga banyak diminati oleh lansia yang tinggal di daerah perdesaan (54,92 persen).

Tabel 5.4 juga menyajikan persentase penduduk semua umur yang berobat sendiri menurut jenis obat yang digunakan. Cara berobat sendiri dengan menggunakan obat modern tidak saja dilakukan oleh mayoritas penduduk lansia, namun juga dilakukan oleh lebih dari dua per tiga (69,90 persen) penduduk semua umur yang sakit.

**Tabel 5.4
Persentase Penduduk Semua Umur dan Penduduk Lansia yang Sakit dan Berobat Sendiri menurut Jenis Obat yang Digunakan dan Tipe Daerah, 2011**

Jenis Obat yang Digunakan	Penduduk Semua Umur			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tradisional	5,93	8,94	7,62	9,03	11,47	10,41
Modern	75,36	65,60	69,90	62,18	54,92	58,08
Lainnya	0,81	0,98	0,90	0,94	1,07	1,01
Campuran	17,90	24,47	21,58	27,85	32,54	30,50
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI – Susenas 2011

Bila dilihat menurut provinsi, persentase penduduk lansia yang melakukan pengobatan sendiri dengan menggunakan obat modern berkisar antara 33,70-78,05 persen (Lampiran Tabel 5.5.3). Tiga provinsi yang mempunyai persentase penduduk lansia yang menggunakan obat modern tertinggi adalah Provinsi Gorontalo (78,05 persen), DKI. Jakarta (73,70 persen) dan Banten (72,63 persen). Dan persentase terendah terdapat di Provinsi Bali (33,70 persen), Kepulauan Riau (40,51 persen) dan Papua (40,81 persen).

Selain dengan berobat sendiri, seseorang juga dapat mengobati sakitnya dengan cara berobat jalan. Berobat jalan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan. Tabel 5.5 menampilkan proporsi penduduk semua umur dan penduduk lansia yang berobat jalan menurut jenis tempat berobat. Tiga tempat yang paling banyak didatangi oleh penduduk

lansia untuk berobat jalan yaitu praktik tenaga kesehatan sebesar 32,07 persen, puskesmas/puskesmas pembantu (30,89 persen), dan praktik dokter (30,22 persen).

**Tabel 5.5
Proporsi Penduduk Semua Umur dan Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah, 2011**

Tempat Berobat	Penduduk Semua Umur			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah sakit pemerintah	6,84	4,53	5,64	11,70	5,88	8,71
Rumah sakit swasta	6,46	2,36	4,33	6,00	2,88	4,39
Praktek Dokter	39,15	20,00	29,20	37,81	23,07	30,22
Puskesmas/Pustu	32,29	37,42	34,46	28,46	33,17	30,89
Praktek tenaga kesehatan	20,09	40,11	30,49	21,76	41,80	32,07
Pengobatan tradisional	2,06	2,29	2,18	3,06	2,87	2,96
Lainnya	2,24	2,91	2,59	2,63	3,15	2,90

Sumber: BPS RI – Susenas 2011

Pola tersebut sedikit berbeda jika dilihat berdasarkan tipe daerah. Untuk daerah perdesaan, praktik tenaga kesehatan (41,80 persen) lebih banyak dikunjungi oleh penduduk lansia untuk berobat jalan dibandingkan ke puskesmas/pustu (33,17 persen) dan praktik dokter (23,07 persen). Di daerah perkotaan, proporsi penduduk lansia yang berobat jalan ke tempat praktik dokter (37,81 persen) lebih besar dibandingkan berobat ke puskesmas/pustu (28,46 persen) dan praktik tenaga kesehatan (21,76 persen). Tempat berobat di praktik dokter lebih banyak dikunjungi oleh penduduk lansia di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Hal tersebut karena fasilitas praktik dokter banyak terdapat di daerah perkotaan.

Untuk penduduk semua umur, Puskesmas/pustu menjadi salah satu alternatif pilihan yang terjangkau baik dari sisi akses maupun biaya berobat,

sedangkan untuk penduduk lansia secara umum berobat di praktik tenaga kesehatan menjadi pilihan. Proporsi penduduk semua umur yang berobat jalan ke puskesmas/pustu sebesar 34,46 persen (di daerah perkotaan sebesar 32,29 persen dan perdesaan 37,42 persen). Proporsi penduduk lansia yang berobat jalan ke puskesmas/pustu sebesar 30,89 persen (di daerah perkotaan sebesar 28,46 persen dan perdesaan 33,17 persen).

Proporsi tertinggi lansia yang sakit dan berobat ke puskesmas/pustu terdapat di Provinsi Papua (74,53 persen), Nusa Tenggara Timur (68,88 persen) dan Maluku (59,20 persen). Sebaliknya, provinsi yang mempunyai proporsi terendah terdapat di Provinsi Banten (20,21 persen), Sumatera Utara (21,31 persen) dan Jawa Timur (22,89 persen).

KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK LANSIA

http://www.bps.go.id

Kegiatan Ekonomi Penduduk Lansia

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan harus terampil dan berpengetahuan sesuai dengan perannya. Sebagai tujuan pembangunan, manusia harus menyadari bahwa semua ditujukan untuk meningkatkan derajat ketenagakerjaan manusia Indonesia. Peranan dan kedudukan tenaga kerja demikian mulanya, kalau seandainya manusia menyadari sepenuhnya tentang ketenagakerjaan tersebut.

Salah satu bagian dari penduduk adalah penduduk lansia. Penduduk lansia yang terlibat aktif dalam ketenagakerjaan merupakan penduduk lansia potensial yaitu penduduk lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sehingga

lansia potensial mampu mencari nafkah sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, secara normatif penduduk lansia merupakan kelompok penduduk yang seyogyanya tinggal menikmati masa tuanya tanpa harus bekerja. Kenyataannya masih banyak dijumpai lansia yang bekerja baik itu karena tuntutan hidup atau karena alasan lain.

Usaha pemberdayaan penduduk lansia merupakan salah satu usaha melatih kemandirian, baik dari aspek ekonomis, pemenuhan psikologi, sosial, budaya dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lansia. Bagi penduduk lansia produktif, hak mendapatkan kesempatan kerja juga tercantum pada UU tersebut Bab III Pasal 5 Ayat (2) c. Selanjutnya pada Bab VI Pasal 15 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memberi peluang bagi pendayagunaan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya yang dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat.

Agar kebijaksanaan ketenagakerjaan penduduk lansia dapat lebih terarah, maka pada bagian ini disajikan gambaran secara makro khusus mengenai kegiatan ekonomi penduduk lanjut usia. Selain itu disajikan pula mengenai indikator ketenagakerjaan yang mencakup partisipasi angkatan kerja, tingkat patisipasi angkatan kerja (TPAK), lapangan usaha, jumlah jam kerja dan besaran upah.

6.1 Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk dibedakan menjadi dua kelompok ketenagakerjaan, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja

adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berusia sampai dengan 15 tahun. Penduduk usia kerja ini juga dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur). Sedangkan yang bukan angkatan kerja yaitu penduduk sedang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain).

Angkatan kerja lansia merupakan penduduk lansia yang bekerja dan mencari pekerjaan (penganggur). Penduduk lansia ini sering disebut penduduk lansia potensial. Mereka tergolong sebagai penduduk lansia yang produktif dan mandiri. Penduduk lansia potensial banyak ditemukan di negara berkembang dan negara-negara yang belum memiliki tunjangan sosial untuk hari tua. Mereka berusaha tetap bekerja dalam upaya memenuhi tuntutan hidup maupun mencukupi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan data hasil Sakernas Agustus 2011, penduduk lansia Indonesia masih banyak yang tergolong sebagai lansia produktif (Tabel 6.1). Dari jumlah keseluruhan penduduk lansia sekitar 45,41 persen diantaranya masih bekerja, sedangkan sisanya melakukan kegiatan mengurus rumah tangga (28,69 persen), lainnya (24,24 persen) dan menganggur (1,67 persen). Tingginya partisipasi penduduk lansia yang bekerja, antara lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, mengisi waktu luang, dan menjaga kesehatan badan.

Tabel 6.1
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia
menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Kegiatan Utama
Seminggu Terakhir, 2011

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Bekerja	Penganggur	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Penduduk 15 Tahun Ke Atas					
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	76,09	6,23	2,37	15,31	100,00
Perempuan (P)	46,21	4,74	37,25	11,80	100,00
L+P	61,13	5,48	19,83	13,55	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	82,59	3,70	1,45	12,26	100,00
Perempuan (P)	50,69	3,25	35,38	10,68	100,00
L+P	66,60	3,48	18,46	11,47	100,00
K+D					
Laki-laki (L)	79,32	4,97	1,91	13,79	100,00
Perempuan (P)	48,44	4,00	36,32	11,24	100,00
L+P	63,85	4,48	19,15	12,51	100,00
- Penduduk Lansia					
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	53,17	2,95	10,86	33,02	100,00
Perempuan (P)	26,69	1,71	51,61	20,00	100,00
L+P	38,99	2,29	32,67	26,05	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	69,27	1,21	5,56	23,96	100,00
Perempuan (P)	35,85	0,97	41,90	21,28	100,00
L+P	51,46	1,09	24,92	22,53	100,00
K+D					
Laki-laki (L)	61,47	2,06	8,13	28,35	100,00
Perempuan (P)	31,39	1,33	46,63	20,66	100,00
L+P	45,41	1,67	28,69	24,24	100,00

Sumber: BPS RI – Sakernas Agustus 2011

Bila ditinjau menurut tipe daerah, proporsi lansia yang bekerja di daerah perdesaan (51,46 persen) lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (38,99 persen). Hal ini terjadi karena umumnya penduduk lansia yang berada di daerah perdesaan mempunyai tingkat ekonomi yang lebih rendah dibandingkan lansia di perkotaan, sehingga mereka harus tetap bekerja demi memenuhi

kebutuhan ekonomi rumah tangga. Selain itu, umumnya pekerjaan di perdesaan bersifat informal yang tidak memerlukan persyaratan khusus, sedangkan di perkotaan lebih banyak pekerjaan yang bersifat formal sehingga diperlukan beberapa persyaratan yang umumnya tidak dapat dipenuhi oleh penduduk lansia, seperti faktor umur dan pendidikan yang lebih tinggi.

Ditinjau menurut jenis kelamin, mayoritas penduduk lansia yang bekerja adalah lansia laki-laki (61,47 persen), sedangkan lansia perempuan lebih banyak yang mengurus rumah tangga (46,63 persen) dibandingkan dengan yang bekerja (31,39 persen).

Pada Tabel 6.1 juga disajikan kegiatan yang dilakukan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas. Mayoritas penduduk ini melakukan kegiatan bekerja (63,85 persen). Proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja lebih besar proporsinya bila dibandingkan dengan penduduk lansia. Hal ini wajar mengingat penduduk 15 tahun ke atas termasuk penduduk yang tergolong usia produktif. Pada usia tersebut sebagian besar mereka bekerja karena lebih bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga.

Jenis kegiatan yang juga termasuk dalam angkatan kerja adalah penganggur. Persentase lansia yang menganggur sangat rendah yaitu hanya sekitar 1,67 persen. Rendahnya persentase lansia yang menganggur disebabkan karena banyak lansia yang masih bekerja, sedangkan bagi lansia yang sudah lemah fisiknya hanya melakukan kegiatan lainnya yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja.

Bila dilihat penganggur pada penduduk 15 tahun ke atas proporsinya lebih besar (4,48 persen) dibandingkan penduduk lansia. Pada penduduk 15 tahun ke atas sulitnya menemukan lapangan pekerjaan yang mencari tenaga kerja baru. Kebanyakan dari lapangan kerja yang ada tidak membutuhkan tenaga kerja baru.

Di sisi lain, Tabel 6.1 juga menampilkan gambaran mengenai kegiatan penduduk lansia yang bukan angkatan kerja yaitu mereka yang mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya. Dari kedua kegiatan tersebut, lansia yang melakukan kegiatan mengurus rumah tangga sedikit lebih tinggi

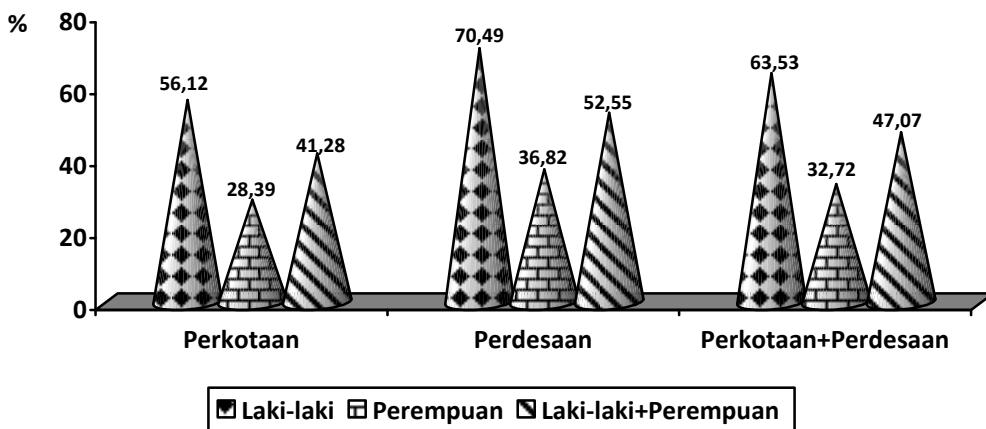
persentasenya (28,69 persen) dibandingkan lansia yang melakukan kegiatan lainnya (24,24 persen). Kegiatan lainnya yang dimaksud dalam hal ini mencakup berbagai kegiatan selain kegiatan bekerja, mencari pekerjaan, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya pada lansia mencakup antara lain kegiatan santai, rekreasi, olahraga, hiburan, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan yang antara lain berupa kegiatan pengajian atau kebaktian dan kegiatan kemasyarakatan.

Sementara itu, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan lainnya sebesar 12,51 persen, meliputi kegiatan olahraga, kursus, hiburan dan sejenisnya termasuk kegiatan bersekolah. Proporsi penduduk lansia yang melakukan kegiatan lainnya lebih besar daripada penduduk 15 tahun ke atas karena sebagian besar lansia termasuk kelompok penduduk non produktif. Secara fisik kondisi lansia juga sudah melemah sehingga banyak dari mereka yang melakukan kegiatan lainnya dibandingkan penduduk pada umumnya.

6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja. Pada kelompok lansia, TPAK merupakan penduduk lansia yang terlibat kegiatan ekonomi, yaitu proporsi lansia yang bekerja dan lansia yang mencari kerja terhadap penduduk lansia itu sendiri.

Pada tahun 2011 tampak bahwa penduduk lansia yang terlibat kegiatan ekonomi relatif cukup besar. Hal ini tercermin dari TPAK penduduk lansia sebesar 47,07 persen, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.1. Tingginya TPAK penduduk lansia terutama terlihat di daerah perdesaan yaitu sebesar 52,55 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 41,28 persen. Bila ditinjau menurut jenis kelamin, TPAK penduduk lansia laki-laki hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan (63,53 persen berbanding 32,72 persen). Hal ini terjadi karena umumnya laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang harus bekerja sedang perempuan sebagai ibu rumah tangga yang biasanya mengurus rumah tangga.



Sumber: BPS RI – Sakernas Agustus 2011

Gambar 6.1 TPAK Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

TPAK penduduk lansia pada masing-masing provinsi bervariasi dengan persentase berkisar antara 37,00–58,78 persen, seperti yang ditunjukkan pada Lampiran Tabel 6.1. Tiga provinsi yang memiliki TPAK penduduk lansia tertinggi adalah Provinsi Papua (58,78 persen), Maluku (58,16 persen) dan Sulawesi Tengah (56,34 persen). Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki TPAK penduduk lansia terendah adalah DKI Jakarta (37,00 persen), Jawa Barat (38,10 persen) dan Aceh (38,73 persen). Di daerah perkotaan, TPAK penduduk lansia pada masing-masing provinsi berkisar antara 29,64 - 50,33 persen, sedangkan di daerah perdesaan angka tersebut lebih tinggi dengan persentase berkisar antara 34,67 - 65,86 persen.

6.3 Lapangan Usaha

Lapangan usaha menunjukkan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha dimana seseorang bekerja. Lapangan usaha mencakup banyak sektor, namun ulasan pada bab ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertanian (*Agriculture*), industri (*Manufacturing*) dan jasa (*Service*). Kelompok lapangan usaha pertanian mencakup sektor pertanian, kelompok industri mencakup sektor pertambangan/penggalian, industri, listrik/gas/air dan konstruksi,

sedangkan kelompok jasa terdiri dari sektor perdagangan, transportasi/komunikasi, keuangan, jasa dan lainnya. Ketiga kelompok sektor ini dikenal sebagai sektor A (*Agriculture*), M (*Manufacturing*) dan S (*Services*).

Tabel 6.2 menyajikan persentase pekerja penduduk 15 tahun ke atas dan pekerja lansia berdasarkan kelompok lapangan usaha. Dari tiga kelompok sektor yang ada, sebagian besar penduduk lansia bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 60,92 persen. Sementara itu, hanya sebagian kecil dari lansia yang bekerja di sektor jasa (28,80 persen) dan sektor industri (10,28 persen). Hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan sebagian besar pekerja lansia untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Tingginya persentase penduduk lansia yang bekerja di sektor pertanian antara lain terkait dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih rendah. Lapangan pekerjaan sektor pertanian terbuka untuk semua kalangan dan tanpa prasyarat pendidikan. Berbeda dengan penduduk 15 tahun ke atas yang umumnya bekerja pada sektor jasa (43,54 persen), kemudian sektor pertanian (35,86 persen) dan sisanya bekerja pada sektor industri sebesar 15,61 persen (Tabel 6.2).

**Tabel 6.2
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia yang
Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2011**

Kelompok Lapangan Usaha	Penduduk 15 Tahun Ke Atas			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian (A)	11,45	58,43	35,86	34,52	79,82	60,92
Industri (M)	25,99	15,61	20,60	14,42	7,31	10,28
Jasa (S)	62,56	25,96	43,54	51,06	12,87	28,80
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI – Sakernas Agustus 2011

Pada Tabel 6.2 juga ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola struktur lapangan usaha penduduk lansia di daerah perkotaan dengan perdesaan. Di daerah perkotaan, mayoritas lansia bekerja di kelompok sektor jasa (51,06 persen), sedangkan lansia yang bekerja di sektor pertanian dan industri masing-masing hanya sebesar 34,52 persen dan 14,42 persen. Sementara itu, di daerah perdesaan hampir 80 persen lansia bekerja pada sektor pertanian dan sisanya sebesar 12,87 persen bekerja pada sektor jasa dan 7,31 persen pada sektor industri. Terdapat perbedaan pola struktur lapangan usaha penduduk lansia dan penduduk 15 tahun ke atas di daerah perkotaan. Penduduk lansia yang bekerja di sektor jasa-jasa sebesar 51,06 persen, kemudian sektor pertanian sebesar 34,52 persen dan sektor industri sebesar 14,42 persen. Sedangkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor jasa sebesar 62,56 persen, kemudian sektor industri (25,99 persen) dan sektor pertanian sebesar 11,45 persen.

Lampiran Tabel 6.2.3 menyajikan struktur pekerjaan penduduk lansia pada setiap provinsi. Pola struktur pekerjaan penduduk lansia pada setiap provinsi menunjukkan kondisi yang serupa dengan pola secara nasional dimana sektor pertanian mendominasi pekerja lansia (berkisar antara 39,53–83,96 persen), kecuali di Provinsi Kepulauan Riau (31,62 persen), DKI Jakarta (0,93 persen) dan Banten (40,78 persen). Penduduk lansia di ketiga provinsi tersebut lebih banyak yang bekerja di sektor jasa-jasa dibandingkan bekerja di sektor pertanian.

Pola struktur pekerjaan penduduk lansia di daerah perkotaan secara nasional sejalan dengan sektor yang diandalkan oleh penduduk lansia di daerah perkotaan pada masing-masing provinsi, yaitu terbesar pada sektor jasa, setelah itu disusul oleh sektor pertanian dan industri, kecuali di Provinsi Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Barat. Penduduk lansia perkotaan di empat provinsi tersebut masih bergantung pada sektor pertanian sebagai andalan utama, seperti yang disajikan pada Lampiran Tabel 6.2.1. Sementara itu, pada Lampiran Tabel 6.2.2 tampak bahwa sektor pertanian masih merupakan andalan utama penduduk lansia di daerah perdesaan pada semua provinsi, disusul oleh kelompok sektor jasa dan industri.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar penduduk lansia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam memasuki pasar kerja penduduk lansia kalah bersaing dengan penduduk yang lebih muda dan berpendidikan tinggi. Hal ini terjadi karena persentase penduduk lansia yang berpendidikan rendah relatif tinggi (Bab 4). Oleh sebab itu, mayoritas lansia hanya dapat bekerja pada pekerjaan yang tidak menuntut pendidikan tinggi seperti pada sektor pertanian. Keadaan ini tercermin pada Tabel 6.3. Lebih dari 90 persen penduduk lansia yang berpendidikan tamat SD ke bawah bekerja di sektor pertanian, dan hanya sebesar 3,21 persen penduduk lansia yang berpendidikan SMA ke atas yang bekerja di sektor ini. Gambaran ini secara umum mendukung dugaan sebelumnya yaitu bahwa bertumpuknya pekerja lansia di sektor pertanian berkaitan dengan akses untuk memperoleh pekerjaan di sektor ini yang jauh lebih mudah (bahkan tanpa syarat pendidikan) dibandingkan dengan sektor lainnya yang pada umumnya mensyaratkan kualifikasi/tingkat ketrampilan dan pendidikan tertentu.

**Tabel 6.3
Percentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia yang
Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan
Kelompok Lapangan Usaha, 2011**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Penduduk 15 Tahun Ke Atas			Penduduk Lansia		
	Pertanian	Industri	Jasa-jasa	Pertanian	Industri	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tdk/Blm Pernah Sekolah	10,87	2,34	2,03	26,39	18,77	15,80
Tdk/Blm Tamat SD	24,90	12,04	8,93	38,50	34,31	27,56
SD	38,89	29,62	20,19	27,83	28,59	27,85
SMP	15,58	23,71	19,30	4,06	8,96	11,40
SM	9,17	28,75	33,24	2,58	7,12	11,98
PT	0,60	3,54	16,31	0,63	2,24	5,42
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI – Sakernas Agustus 2011

Pada Tabel 6.3 juga menyajikan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kelompok lapangan usaha. Secara umum, sebagian besar penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor jasa-jasa dan berpendidikan SMP ke atas 68,85 persen, sedang penduduk lansia yang bekerja di sector jasa dan berpendidikan SMP ke atas adalah 28,80 persen.

6.4 Status Pekerjaan

Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan disebut sebagai status pekerjaan. Pada Tabel 6.4 disajikan persentase penduduk lansia yang bekerja menurut status pekerjaan. Secara umum dari keseluruhan jumlah penduduk lansia yang bekerja, sebagian besar lansia bekerja dengan status berusaha dibantu buruh yaitu sebesar 42,24 persen, selanjutnya disusul oleh penduduk lansia yang berusaha sendiri sebesar 24,46 persen dan yang bekerja dengan tidak dibayar sebesar 14,87 persen. Sementara itu, penduduk lansia yang bekerja dengan status pekerjaan lainnya masing-masing masih dibawah 10 persen yaitu sebagai pekerja bebas (9,74 persen), dan sebagai buruh/karyawan (8,68 persen).

**Tabel 6.4
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan, 2011**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Tidak Di bayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	26,72	39,97	17,81	9,50	6,00	100,00
Perempuan (P)	36,21	22,79	10,97	8,41	21,61	100,00
L+P	30,20	33,68	15,30	9,10	11,72	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	18,35	63,15	4,53	10,51	3,46	100,00
Perempuan (P)	23,76	23,32	2,96	9,66	40,30	100,00
L+P	20,36	48,37	3,95	10,19	17,13	100,00
K+D						
Laki-laki (L)	21,86	53,44	10,09	10,09	4,52	100,00
Perempuan (P)	28,91	23,10	6,28	9,14	32,56	100,00
L+P	24,46	42,24	8,68	9,74	14,87	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Banyaknya penduduk lansia yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh terlihat jelas di daerah perdesaan. Dari total penduduk lansia di perdesaan yang bekerja, hampir separuhnya (48,37 persen) berusaha dibantu buruh. Pola ini juga berlaku pada penduduk lansia di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan lansia yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh sebesar 33,68 persen, diikuti yang berusaha sendiri sebesar 30,20 persen. Di daerah perkotaan lansia yang bekerja sebagai buruh/karyawan (15,30 persen) lebih besar dibandingkan di perdesaan (3,95 persen), sedangkan lansia yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar di daerah perdesaan (17,13 persen) lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (11,72 persen). Umumnya mereka adalah para lansia yang membantu pekerjaan suami/keluarganya di sektor pertanian atau pada usaha keluarga lainnya. Di daerah perdesaan, persentase lansia perempuan yang bekerja dengan status sebagai pekerja tidak dibayar sebesar 40,30 persen (Tabel 6.4).

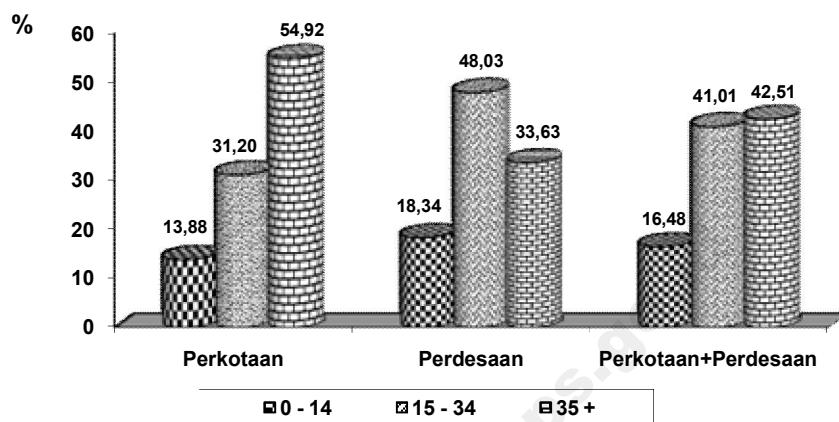
Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, persentase lansia yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh lebih didominasi oleh lansia laki-laki yaitu sebesar 53,44 persen. Pola yang sama terjadi baik di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan.

Bila dilihat menurut provinsi, sebagian besar provinsi mempunyai struktur status pekerjaan yang sama dengan nasional, yaitu mayoritas penduduk lansia bekerja dengan status berusaha dibantu buruh seperti yang ditunjukkan pada Lampiran Tabel 6.3.3.

6.5 Jumlah Jam Kerja

Produktivitas seseorang dalam bekerja dapat dilihat melalui jumlah jam kerja yang ditekuninya. Seyoginya, penduduk lansia yang bekerja dapat bekerja dengan jam kerja hanya paruh waktu mengingat kondisi fisik yang mulai melemah. Namun pada kenyataannya masih banyak lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh atau jumlah jam kerja 35 jam ke atas selama seminggu terakhir.

Gambar 6.2 menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan penduduk lansia yang bekerja, hampir separuhnya (42,51 persen) bekerja dengan jam kerja penuh atau jumlah jam kerja 35 jam ke atas selama seminggu terakhir. Sementara itu, penduduk lansia yang bekerja dengan jumlah jam kerja antara 15-34 jam seminggu sebesar 41,01 persen dan mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu hanya sebesar 16,48 persen.



Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Gambar 6.2 Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2011

Persentase lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh di daerah perkotaan (54,92 persen) lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (33,63 persen). Sebaliknya, persentase lansia yang bekerja dengan jam kerja selama 0–14 jam dan 15–34 jam per minggu di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini sesuai dengan sektor dominan di perdesaan adalah pertanian yang tidak mempunyai target waktu kerja per hari seperti sektor formal (jasa dan industri).

Bila dilihat menurut jenis kelamin, tingkat produktivitas pekerja laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan, hal ini tercermin dari lebih rendahnya proporsi lansia perempuan yang bekerja di atas jam kerja normal (lebih dari 35 jam). Tabel 6.5 menunjukkan bahwa, pekerja

lansia laki-laki yang bekerja dengan jam kerja penuh mencapai 46,81 persen, sedangkan pekerja lansia perempuan persentasenya hanya sebesar 35,17 persen.

Tabel 6.5
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2011

Jumlah Jam Kerja	Penduduk 15 Tahun Ke Atas			Penduduk Lansia		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 14	6,39	12,89	8,86	13,46	21,64	16,48
15 – 34	24,64	32,96	27,81	39,73	43,19	41,01
35 +	68,96	54,14	63,33	46,81	35,17	42,51
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Sebaliknya, persentase lansia perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0–14 jam dan 15–34 jam lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki. Persentase lansia perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0–14 jam sebesar 21,64 persen dan jumlah jam kerja 15–34 jam sebesar 43,19 persen. Sementara itu, lansia laki-laki yang bekerja 0–14 jam sebesar 13,46 persen dan yang bekerja 15–34 jam sebesar 39,73 persen. Dominasi penduduk lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh lebih dari separuh provinsi (18 provinsi) di Indonesia (Lampiran Tabel 6.4.3). Untuk penduduk 15 tahun ke atas, sebagian besar (63,33 persen) dari mereka bekerja dengan jam kerja penuh, laki-laki 68,96 persen dan perempuan 54,14 persen.

TABEL LAMPIRAN

http://www.bps.go.id

Tabel 3.1.1
Percentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Provinsi dan
Kelompok Umur (Tahun), 2011

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)					Laki - Laki
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	60+
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	9,15	2,76	3,50	1,39	0,50	5,40
Sumatera Utara	10,00	3,15	3,39	1,32	0,48	5,19
Sumatera Barat	10,14	3,88	4,39	2,13	0,67	7,19
R i a u	8,89	2,48	2,87	1,00	0,31	4,18
Kepulauan Riau	7,57	2,29	2,23	1,22	0,28	3,73
J a m b i	9,87	3,10	3,72	1,40	0,47	5,58
Sumatera Selatan	10,08	3,18	3,63	1,69	0,54	5,86
Bangka Belitung	9,71	3,42	3,52	1,35	0,45	5,32
Bengkulu	10,31	2,96	3,46	1,51	0,54	5,52
Lampung	10,57	3,47	4,21	2,01	0,79	7,01
DKI Jakarta	10,43	3,42	3,26	1,38	0,28	4,92
Jawa Barat	10,47	3,49	4,51	1,71	0,57	6,79
Banten	9,38	2,95	3,08	1,14	0,22	4,45
Jawa Tengah	12,88	4,44	5,64	2,81	1,12	9,57
DI Yogyakarta	13,14	4,96	6,18	4,16	1,30	11,65
Jawa Timur	13,28	4,63	5,67	2,72	0,89	9,28
B a l i	11,55	3,63	5,84	2,41	0,96	9,20
Nusa Tenggara Barat	10,14	3,40	4,54	1,84	0,50	6,88
Nusa Tenggara Timur	9,27	3,07	4,30	2,25	0,71	7,25
Kalimantan Barat	9,44	3,15	3,95	1,58	0,34	5,86
Kalimantan Tengah	9,79	2,60	3,32	1,22	0,36	4,91
Kalimantan Selatan	10,37	2,78	3,20	1,34	0,43	4,97
Kalimantan Timur	10,42	2,80	3,13	0,80	0,32	4,25
Sulawesi Utara	11,59	4,47	5,00	2,11	0,74	7,85
Gorontalo	9,72	2,91	3,95	1,14	0,39	5,49
Sulawesi Tengah	9,48	3,00	3,86	1,40	0,35	5,61
Sulawesi Selatan	9,26	3,22	4,65	2,08	0,63	7,36
Sulawesi Barat	8,23	2,42	3,58	1,65	0,40	5,63
Sulawesi Tenggara	8,01	2,61	3,93	1,33	0,49	5,75
Maluku	8,92	2,74	3,96	1,54	0,48	5,98
Maluku Utara	8,24	3,01	2,90	1,35	0,34	4,59
Papua	8,84	1,65	1,55	0,38	0,10	2,04
Papua Barat	9,10	2,39	2,76	0,48	0,13	3,37
INDONESIA	10,90	3,61	4,43	1,95	0,65	7,03

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.1.2
Percentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Provinsi dan
Kelompok Umur (Tahun), 2011

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)					Perempuan
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	60+
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Aceh	9,20	2,80	4,11	1,52	0,73	6,36
Sumatera Utara	10,65	3,12	3,94	1,81	0,89	6,63
Sumatera Barat	11,47	4,23	4,70	2,90	1,40	9,01
R i a u	8,70	2,44	2,44	1,07	0,45	3,95
Kepulauan Riau	7,34	2,07	1,95	0,86	0,28	3,09
J a m b i	9,90	2,96	3,16	1,62	0,65	5,44
Sumatera Selatan	9,96	2,93	3,91	1,85	0,87	6,63
Bangka Belitung	9,99	3,37	4,15	1,35	0,88	6,37
Bengkulu	10,19	2,84	3,64	1,83	0,74	6,22
Lampung	10,97	3,11	4,35	2,20	0,84	7,39
DKI Jakarta	11,51	3,21	3,37	1,52	0,51	5,40
Jawa Barat	10,91	3,22	4,49	2,12	0,70	7,31
Banten	9,29	2,56	3,13	1,20	0,47	4,80
Jawa Tengah	13,04	4,25	6,06	3,69	1,36	11,11
DI Yogyakarta	13,27	4,47	7,38	4,48	2,39	14,25
Jawa Timur	13,51	4,33	6,42	3,64	1,43	11,49
B a l i	11,86	4,13	5,90	3,19	1,27	10,36
Nusa Tenggara Barat	9,45	3,46	4,85	2,02	0,68	7,55
Nusa Tenggara Timur	9,71	3,10	4,58	2,31	1,01	7,91
Kalimantan Barat	9,71	3,19	3,92	1,40	0,58	5,89
Kalimantan Tengah	9,11	2,38	2,83	1,18	0,48	4,49
Kalimantan Selatan	11,03	2,95	4,34	1,72	0,65	6,71
Kalimantan Timur	9,68	2,47	2,52	0,90	0,37	3,78
Sulawesi Utara	11,79	4,68	4,91	3,22	0,95	9,08
Gorontalo	10,00	3,00	4,55	1,49	0,43	6,46
Sulawesi Tengah	9,21	2,95	3,80	1,55	0,66	6,00
Sulawesi Selatan	10,04	3,58	5,54	2,72	1,02	9,27
Sulawesi Barat	7,99	3,00	4,26	1,96	0,81	7,02
Sulawesi Tenggara	8,39	2,95	3,74	1,47	0,70	5,91
Maluku	9,30	3,24	4,04	1,62	0,80	6,46
Maluku Utara	8,55	2,90	3,27	1,28	0,49	5,04
Papua	7,14	1,62	1,26	0,30	0,07	1,63
Papua Barat	8,18	2,46	2,11	0,56	0,19	2,86
INDONESIA	11,19	3,48	4,75	2,44	0,95	8,13

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.1.3
Percentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Provinsi dan
Kelompok Umur (Tahun), 2011

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)					Laki-laki+Perempuan
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	60+
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	9,17	2,78	3,81	1,46	0,62	5,88
Sumatera Utara	10,32	3,14	3,66	1,56	0,68	5,90
Sumatera Barat	10,80	4,05	4,54	2,51	1,03	8,09
R i a u	8,79	2,46	2,66	1,03	0,38	4,07
Kepulauan Riau	7,45	2,18	2,09	1,04	0,28	3,41
J a m b i	9,89	3,03	3,45	1,51	0,55	5,51
Sumatera Selatan	10,02	3,06	3,77	1,77	0,70	6,23
Bangka Belitung	9,85	3,40	3,82	1,35	0,66	5,83
Bengkulu	10,25	2,90	3,55	1,67	0,64	5,86
Lampung	10,76	3,30	4,28	2,10	0,82	7,20
DKI Jakarta	10,97	3,31	3,32	1,45	0,39	5,16
Jawa Barat	10,68	3,36	4,50	1,91	0,63	7,05
Banten	9,33	2,76	3,11	1,17	0,34	4,62
Jawa Tengah	12,96	4,34	5,85	3,25	1,24	10,34
DI Yogyakarta	13,20	4,71	6,80	4,33	1,86	12,99
Jawa Timur	13,39	4,48	6,05	3,18	1,16	10,40
B a l i	11,71	3,88	5,87	2,80	1,12	9,78
Nusa Tenggara Barat	9,78	3,43	4,70	1,93	0,59	7,23
Nusa Tenggara Timur	9,49	3,08	4,44	2,28	0,86	7,58
Kalimantan Barat	9,58	3,17	3,93	1,49	0,45	5,88
Kalimantan Tengah	9,46	2,49	3,08	1,20	0,42	4,70
Kalimantan Selatan	10,70	2,86	3,77	1,53	0,54	5,84
Kalimantan Timur	10,06	2,64	2,84	0,85	0,34	4,03
Sulawesi Utara	11,69	4,58	4,96	2,65	0,84	8,45
Gorontalo	9,86	2,96	4,25	1,32	0,41	5,97
Sulawesi Tengah	9,35	2,98	3,83	1,47	0,50	5,80
Sulawesi Selatan	9,66	3,41	5,10	2,41	0,83	8,34
Sulawesi Barat	8,11	2,71	3,92	1,80	0,60	6,32
Sulawesi Tenggara	8,20	2,78	3,83	1,40	0,60	5,83
Maluku	9,11	2,98	4,00	1,58	0,64	6,22
Maluku Utara	8,39	2,96	3,07	1,32	0,41	4,81
Papua	8,04	1,64	1,42	0,34	0,09	1,85
Papua Barat	8,65	2,42	2,45	0,52	0,16	3,12
INDONESIA	11,04	3,54	4,59	2,19	0,80	7,58

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.2
Rasio Ketergantungan Penduduk Tua menurut Provinsi, Tipe Daerah
dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			K+D		
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	8,66	10,19	9,44	8,85	10,19	9,52	8,80	10,19	9,50
Sumatera Utara	8,94	10,40	9,68	8,38	11,26	9,80	8,66	10,83	9,74
Sumatera Barat	12,36	14,51	13,45	12,09	15,17	13,62	12,20	14,91	13,55
Riau	6,69	6,22	6,45	6,81	6,28	6,55	6,76	6,26	6,51
Kepulauan Riau	5,55	4,65	5,09	6,28	4,44	5,38	5,68	4,61	5,14
Jambi	9,05	8,05	8,55	8,79	8,56	8,67	8,86	8,40	8,64
Sumatera Selatan	8,96	10,67	9,81	9,43	10,43	9,91	9,26	10,52	9,88
Bangka Belitung	7,84	10,39	9,05	8,63	9,67	9,13	8,24	10,03	9,09
Bengkulu	8,62	9,81	9,21	8,78	9,86	9,30	8,73	9,84	9,27
Lampung	10,67	11,97	11,32	11,25	11,62	11,43	11,11	11,72	11,40
DKI Jakarta	7,06	7,56	7,31	-	-	-	7,06	7,56	7,31
Jawa Barat	10,62	11,50	11,05	11,04	11,50	11,26	10,76	11,50	11,12
Banten	7,20	6,82	7,01	6,23	8,43	7,29	6,88	7,33	7,10
Jawa Tengah	15,06	17,65	16,37	15,65	17,57	16,62	15,38	17,61	16,51
DI Yogyakarta	18,14	21,41	19,82	17,52	23,44	20,53	17,94	22,07	20,06
Jawa Timur	14,49	17,51	16,03	14,43	17,90	16,19	14,46	17,72	16,11
Bali	14,50	15,91	15,21	14,81	16,32	15,57	14,62	16,07	15,35
Nusa Tenggara Barat	11,26	12,25	11,79	11,89	11,95	11,92	11,62	12,07	11,87
Nusa Tenggara Timur	13,16	12,52	12,82	13,80	14,64	14,23	13,67	14,20	13,94
Kalimantan Barat	9,71	9,12	9,41	9,64	9,52	9,58	9,66	9,39	9,53
Kalimantan Tengah	7,84	6,79	7,31	7,66	7,16	7,42	7,72	7,03	7,39
Kalimantan Selatan	7,78	10,12	8,96	7,75	10,48	9,11	7,76	10,32	9,05
Kalimantan Timur	6,70	5,66	6,20	6,31	6,18	6,25	6,55	5,85	6,22
Sulawesi Utara	11,97	14,66	13,32	12,84	14,05	13,42	12,45	14,34	13,38
Gorontalo	8,76	10,35	9,58	8,98	10,42	9,69	8,90	10,40	9,65
Sulawesi Tengah	9,25	9,51	9,38	9,35	9,97	9,65	9,32	9,85	9,58
Sulawesi Selatan	11,96	15,09	13,61	12,65	15,09	13,91	12,40	15,09	13,80
Sulawesi Barat	9,84	12,67	11,27	9,93	11,97	10,95	9,90	12,13	11,02
Sulawesi Tenggara	9,71	9,75	9,73	10,00	10,06	10,03	9,92	9,97	9,95
Maluku	9,49	11,84	10,69	11,10	10,90	11,00	10,50	11,26	10,88
Maluku Utara	7,63	8,25	7,94	7,91	8,42	8,16	7,84	8,37	8,10
Papua	3,14	3,07	3,11	3,34	2,42	2,90	3,29	2,58	2,95
Papua Barat	4,94	4,85	4,90	5,85	4,47	5,16	5,56	4,58	5,08
INDONESIA	10,97	12,42	11,70	11,49	13,19	12,34	11,23	12,80	12,01

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.3
Percentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah
dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			K+D		
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	5,34	6,42	5,88	5,42	6,33	5,88	5,40	6,36	5,88
Sumatera Utara	5,36	6,46	5,90	5,02	6,80	5,90	5,19	6,63	5,90
Sumatera Barat	7,28	8,90	8,08	7,13	9,08	8,09	7,19	9,01	8,09
Riau	4,15	3,99	4,07	4,20	3,93	4,07	4,18	3,95	4,07
Kepulauan Riau	3,63	3,13	3,38	4,19	2,91	3,56	3,73	3,09	3,41
Jambi	5,71	5,31	5,51	5,52	5,49	5,51	5,58	5,44	5,51
Sumatera Selatan	5,67	6,82	6,24	5,96	6,52	6,23	5,86	6,63	6,23
Bangka Belitung	5,08	6,65	5,83	5,55	6,11	5,82	5,32	6,37	5,83
Bengkulu	5,45	6,29	5,86	5,55	6,18	5,86	5,52	6,22	5,86
Lampung	6,72	7,69	7,20	7,11	7,29	7,20	7,01	7,39	7,20
DKI Jakarta	4,92	5,40	5,16	-	-	-	4,92	5,40	5,16
Jawa Barat	6,76	7,34	7,04	6,86	7,24	7,05	6,79	7,31	7,05
Banten	4,66	4,55	4,60	4,02	5,33	4,66	4,45	4,80	4,62
Jawa Tengah	9,45	11,23	10,34	9,67	11,01	10,34	9,57	11,11	10,34
DI Yogyakarta	11,81	14,06	12,96	11,33	14,63	13,04	11,65	14,25	12,99
Jawa Timur	9,35	11,42	10,39	9,23	11,55	10,40	9,28	11,49	10,40
Bali	9,23	10,30	9,76	9,16	10,44	9,79	9,20	10,36	9,78
Nusa Tenggara Barat	6,74	7,67	7,23	6,98	7,46	7,23	6,88	7,55	7,23
Nusa Tenggara Timur	7,34	7,37	7,36	7,23	8,04	7,64	7,25	7,91	7,58
Kalimantan Barat	5,91	5,86	5,88	5,84	5,91	5,87	5,86	5,89	5,88
Kalimantan Tengah	5,02	4,39	4,70	4,85	4,54	4,70	4,91	4,49	4,70
Kalimantan Selatan	4,99	6,60	5,80	4,96	6,80	5,87	4,97	6,71	5,84
Kalimantan Timur	4,34	3,68	4,02	4,12	3,96	4,04	4,25	3,78	4,03
Sulawesi Utara	7,55	9,39	8,47	8,10	8,82	8,44	7,85	9,08	8,45
Gorontalo	5,35	6,61	5,98	5,55	6,39	5,97	5,49	6,46	5,97
Sulawesi Tengah	5,63	5,99	5,81	5,60	6,01	5,80	5,61	6,00	5,80
Sulawesi Selatan	7,13	9,47	8,33	7,49	9,15	8,34	7,36	9,27	8,34
Sulawesi Barat	5,72	7,31	6,53	5,61	6,93	6,26	5,63	7,02	6,32
Sulawesi Tenggara	5,71	5,94	5,82	5,77	5,90	5,83	5,75	5,91	5,83
Maluku	5,60	6,80	6,22	6,19	6,24	6,21	5,98	6,46	6,22
Maluku Utara	4,45	5,16	4,80	4,64	4,99	4,81	4,59	5,04	4,81
Papua	2,02	1,91	1,96	2,04	1,54	1,81	2,04	1,63	1,85
Papua Barat	3,10	3,08	3,09	3,49	2,77	3,14	3,37	2,86	3,12
INDONESIA	6,98	8,03	7,50	7,09	8,23	7,65	7,03	8,13	7,58

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.4.1
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan
Status Perkawinan, 2011

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Laki-laki		
			Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,25	87,92	1,31	10,52	100,00
Sumatera Utara	1,19	80,98	0,93	16,90	100,00
Sumatera Barat	0,77	86,25	1,91	11,06	100,00
Riau	0,51	84,03	2,47	12,99	100,00
Kepulauan Riau	0,70	82,82	1,04	15,44	100,00
Jambi	0,20	86,33	1,82	11,65	100,00
Sumatera Selatan	0,64	86,28	1,16	11,93	100,00
Bangka Belitung	0,69	82,41	2,93	13,97	100,00
Bengkulu	0,56	83,19	1,02	15,23	100,00
Lampung	0,66	86,42	1,10	11,81	100,00
DKI Jakarta	0,81	85,07	1,01	13,11	100,00
Jawa Barat	0,25	86,71	1,08	11,96	100,00
Banten	0,72	83,58	1,47	14,23	100,00
Jawa Tengah	0,37	82,82	0,79	16,02	100,00
DI Yogyakarta	0,89	81,64	1,53	15,95	100,00
Jawa Timur	0,78	82,61	1,32	15,29	100,00
Bali	1,99	81,69	1,01	15,31	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,68	82,97	1,56	14,79	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,91	78,74	0,85	18,50	100,00
Kalimantan Barat	1,19	81,36	1,03	16,43	100,00
Kalimantan Tengah	0,77	84,24	1,37	13,62	100,00
Kalimantan Selatan	1,00	81,91	1,61	15,47	100,00
Kalimantan Timur	0,43	84,17	1,57	13,84	100,00
Sulawesi Utara	2,06	78,59	1,44	17,90	100,00
Gorontalo	1,72	85,61	0,40	12,27	100,00
Sulawesi Tengah	1,05	79,86	2,18	16,92	100,00
Sulawesi Selatan	1,21	78,42	1,71	18,65	100,00
Sulawesi Barat	2,59	75,43	3,25	18,74	100,00
Sulawesi Tenggara	0,86	84,27	1,52	13,35	100,00
Maluku	2,55	75,36	1,07	21,02	100,00
Maluku Utara	1,54	76,86	1,03	20,57	100,00
Papua	0,35	83,73	0,97	14,95	100,00
Papua Barat	1,13	81,33	1,48	16,05	100,00
INDONESIA	0,71	83,46	1,21	14,63	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.4.2
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan
Status Perkawinan, 2011

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Perempuan		
			Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,00	28,84	3,22	66,95	100,00
Sumatera Utara	0,65	36,39	2,01	60,95	100,00
Sumatera Barat	0,44	34,73	5,63	59,20	100,00
Riau	0,36	38,02	2,45	59,17	100,00
Kepulauan Riau	1,10	45,99	5,33	47,57	100,00
Jambi	0,27	38,13	3,41	58,19	100,00
Sumatera Selatan	0,41	41,64	1,87	56,08	100,00
Bangka Belitung	2,38	34,54	4,27	58,81	100,00
Bengkulu	1,00	40,35	1,86	56,79	100,00
Lampung	0,10	41,06	2,75	56,08	100,00
DKI Jakarta	1,34	34,80	1,96	61,90	100,00
Jawa Barat	0,45	37,66	3,39	58,50	100,00
Banten	0,21	31,38	4,02	64,38	100,00
Jawa Tengah	0,81	38,00	2,38	58,81	100,00
DI Yogyakarta	1,75	42,63	3,89	51,72	100,00
Jawa Timur	0,72	33,06	3,30	62,92	100,00
Bali	4,93	49,31	2,58	43,17	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,73	38,45	7,41	53,41	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,59	41,15	1,96	52,31	100,00
Kalimantan Barat	1,79	37,99	1,56	58,65	100,00
Kalimantan Tengah	1,54	40,50	3,34	54,62	100,00
Kalimantan Selatan	1,03	25,24	5,15	68,58	100,00
Kalimantan Timur	0,67	40,74	3,32	55,28	100,00
Sulawesi Utara	2,45	43,98	2,22	51,36	100,00
Gorontalo	5,82	42,13	3,83	48,22	100,00
Sulawesi Tengah	1,26	38,98	3,89	55,87	100,00
Sulawesi Selatan	4,14	32,99	4,16	58,71	100,00
Sulawesi Barat	2,80	30,46	5,75	60,99	100,00
Sulawesi Tenggara	1,44	37,86	3,49	57,21	100,00
Maluku	4,51	39,47	3,66	52,36	100,00
Maluku Utara	1,50	37,95	6,04	54,51	100,00
Papua	0,59	44,07	4,97	50,36	100,00
Papua Barat	0,59	37,91	4,89	56,61	100,00
INDONESIA	1,09	36,66	3,17	59,07	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.4.3
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan
Status Perkawinan, 2011

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Laki-laki+Perempuan		
			Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,65	56,02	2,34	40,99	100,00
Sumatera Utara	0,89	56,26	1,53	41,31	100,00
Sumatera Barat	0,59	57,93	3,95	37,53	100,00
Riau	0,44	62,24	2,46	34,86	100,00
Kepulauan Riau	0,88	66,14	2,99	29,99	100,00
Jambi	0,24	63,14	2,59	34,04	100,00
Sumatera Selatan	0,52	63,13	1,53	34,82	100,00
Bangka Belitung	1,58	57,15	3,64	37,63	100,00
Bengkulu	0,79	61,04	1,45	36,72	100,00
Lampung	0,39	63,90	1,92	33,79	100,00
DKI Jakarta	1,08	58,80	1,50	38,61	100,00
Jawa Barat	0,35	61,77	2,25	35,63	100,00
Banten	0,46	57,00	2,77	39,77	100,00
Jawa Tengah	0,61	58,66	1,65	39,09	100,00
DI Yogyakarta	1,38	59,65	2,86	36,11	100,00
Jawa Timur	0,75	54,94	2,42	41,89	100,00
Bali	3,54	64,68	1,84	29,94	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,71	58,71	4,75	35,84	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,32	58,91	1,43	36,33	100,00
Kalimantan Barat	1,48	60,19	1,29	37,04	100,00
Kalimantan Tengah	1,13	64,06	2,28	32,53	100,00
Kalimantan Selatan	1,02	49,46	3,64	45,89	100,00
Kalimantan Timur	0,53	64,71	2,35	32,41	100,00
Sulawesi Utara	2,27	60,40	1,85	35,48	100,00
Gorontalo	3,93	62,23	2,24	31,60	100,00
Sulawesi Tengah	1,15	59,26	3,04	36,54	100,00
Sulawesi Selatan	2,88	52,57	3,11	41,44	100,00
Sulawesi Barat	2,70	50,63	4,63	42,04	100,00
Sulawesi Tenggara	1,15	60,77	2,52	35,56	100,00
Maluku	3,56	56,79	2,41	37,23	100,00
Maluku Utara	1,52	57,19	3,56	37,73	100,00
Papua	0,45	67,18	2,64	29,73	100,00
Papua Barat	0,89	62,15	2,98	33,97	100,00
INDONESIA	0,91	58,54	2,25	38,29	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.5.1
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan
dengan Kepala Rumah Tangga, 2011

Provinsi	Kepala Rumah tangga	Istri/Suami	Mertua/ Orangtua	Lainnya	Laki-laki
					(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	95,37	0,22	3,84	0,57	100,00
Sumatera Utara	90,38	0,50	7,69	1,44	100,00
Sumatera Barat	89,42	0,47	8,34	1,77	100,00
R i a u	90,71	0,00	8,03	1,27	100,00
Kepulauan Riau	86,28	1,79	7,61	4,32	100,00
J a m b i	90,37	0,20	8,15	1,28	100,00
Sumatera Selatan	86,86	0,27	12,03	0,84	100,00
Bangka Belitung	91,97	0,00	6,60	1,43	100,00
Bengkulu	88,58	0,00	10,12	1,30	100,00
Lampung	88,53	0,06	9,89	1,52	100,00
DKI Jakarta	94,03	0,67	4,43	0,88	100,00
Jawa Barat	93,42	0,22	5,55	0,81	100,00
Banten	90,66	0,00	8,63	0,72	100,00
Jawa Tengah	88,32	0,21	10,04	1,44	100,00
DI Yogyakarta	89,07	0,21	9,05	1,67	100,00
Jawa Timur	87,67	0,44	9,68	2,22	100,00
B a l i	68,63	0,31	28,87	2,19	100,00
Nusa Tenggara Barat	91,86	0,31	6,88	0,95	100,00
Nusa Tenggara Timur	84,58	0,15	12,24	3,04	100,00
Kalimantan Barat	86,96	0,21	11,33	1,50	100,00
Kalimantan Tengah	90,95	0,14	7,06	1,84	100,00
Kalimantan Selatan	92,86	0,09	6,38	0,67	100,00
Kalimantan Timur	90,68	0,36	6,87	2,09	100,00
Sulawesi Utara	85,44	0,53	11,56	2,47	100,00
Gorontalo	86,07	0,98	10,16	2,79	100,00
Sulawesi Tengah	87,63	0,00	11,10	1,27	100,00
Sulawesi Selatan	87,65	0,02	10,67	1,66	100,00
Sulawesi Barat	88,04	0,14	8,27	3,56	100,00
Sulawesi Tenggara	92,17	0,12	6,42	1,29	100,00
Maluku	86,87	0,07	11,70	1,36	100,00
Maluku Utara	81,67	0,00	15,81	2,52	100,00
Papua	92,53	0,13	6,23	1,11	100,00
Papua Barat	91,06	0,88	5,84	2,23	100,00
INDONESIA	89,16	0,28	9,05	1,51	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.5.2
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan
dengan Kepala Rumah Tangga, 2011

Provinsi	Kepala Rumah tangga	Istri/Suami	Mertua/ Orangtua	Lainnya	Perempuan
					(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	56,54	27,85	13,63	1,98	100,00
Sumatera Utara	41,10	32,25	23,91	2,74	100,00
Sumatera Barat	35,50	30,90	30,35	3,26	100,00
Riau	32,38	33,18	31,94	2,50	100,00
Kepulauan Riau	29,46	40,05	28,88	1,61	100,00
Jambi	31,73	34,72	31,35	2,19	100,00
Sumatera Selatan	26,52	34,55	36,57	2,37	100,00
Bangka Belitung	41,42	33,32	22,31	2,94	100,00
Bengkulu	33,20	33,31	31,71	1,77	100,00
Lampung	30,91	36,14	30,76	2,20	100,00
DKI Jakarta	47,48	32,55	17,11	2,86	100,00
Jawa Barat	39,78	34,81	22,22	3,19	100,00
Banten	38,69	27,69	30,50	3,12	100,00
Jawa Tengah	33,58	33,70	28,07	4,65	100,00
DI Yogyakarta	32,67	38,99	24,31	4,02	100,00
Jawa Timur	34,81	28,79	30,52	5,88	100,00
Bali	16,44	32,05	42,76	8,76	100,00
Nusa Tenggara Barat	42,09	34,93	19,84	3,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,08	34,24	29,27	6,41	100,00
Kalimantan Barat	29,00	32,76	33,21	5,03	100,00
Kalimantan Tengah	32,24	35,98	27,69	4,09	100,00
Kalimantan Selatan	42,64	22,46	30,57	4,34	100,00
Kalimantan Timur	34,04	35,19	27,06	3,71	100,00
Sulawesi Utara	27,98	39,28	29,40	3,34	100,00
Gorontalo	28,30	34,71	29,37	7,62	100,00
Sulawesi Tengah	27,13	34,11	34,26	4,50	100,00
Sulawesi Selatan	35,08	29,38	28,95	6,59	100,00
Sulawesi Barat	35,40	27,31	30,56	6,74	100,00
Sulawesi Tenggara	37,67	32,93	25,76	3,64	100,00
Maluku	32,96	34,89	26,75	5,40	100,00
Maluku Utara	25,67	33,53	35,17	5,63	100,00
Papua	32,25	35,74	26,86	5,14	100,00
Papua Barat	39,01	34,75	22,14	4,10	100,00
INDONESIA	35,52	32,36	27,73	4,39	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.5.3
Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan
dengan Kepala Rumah Tangga, 2011

Provinsi	Kepala Rumah tangga	Istri/Suami	Mertua/ Orangtua	Lainnya	Laki-laki+Perempuan
					(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	74,41	15,14	9,12	1,33	100,00
Sumatera Utara	63,06	18,10	16,68	2,16	100,00
Sumatera Barat	59,77	17,20	20,44	2,59	100,00
R i a u	63,08	15,71	19,36	1,85	100,00
Kepulauan Riau	60,55	19,12	17,24	3,09	100,00
J a m b i	62,16	16,81	19,31	1,72	100,00
Sumatera Selatan	55,58	18,04	24,75	1,63	100,00
Bangka Belitung	65,29	17,59	14,89	2,23	100,00
Bengkulu	59,95	17,22	21,28	1,54	100,00
Lampung	59,93	17,97	20,25	1,86	100,00
DKI Jakarta	69,70	17,33	11,05	1,91	100,00
Jawa Barat	66,14	17,81	14,03	2,02	100,00
Banten	64,19	14,10	19,77	1,94	100,00
Jawa Tengah	58,81	18,27	19,76	3,17	100,00
DI Yogyakarta	57,28	22,07	17,65	3,00	100,00
Jawa Timur	58,15	16,27	21,31	4,26	100,00
B a l i	41,22	16,98	36,16	5,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	64,74	19,18	13,94	2,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	55,84	18,13	21,22	4,81	100,00
Kalimantan Barat	58,67	16,10	22,01	3,22	100,00
Kalimantan Tengah	63,87	16,67	16,58	2,88	100,00
Kalimantan Selatan	64,10	12,90	20,23	2,77	100,00
Kalimantan Timur	65,30	15,97	15,92	2,82	100,00
Sulawesi Utara	55,25	20,89	20,94	2,93	100,00
Gorontalo	55,01	19,12	20,49	5,39	100,00
Sulawesi Tengah	57,15	17,18	22,77	2,90	100,00
Sulawesi Selatan	57,74	16,73	21,07	4,47	100,00
Sulawesi Barat	59,01	15,12	20,56	5,31	100,00
Sulawesi Tenggara	64,57	16,73	16,21	2,48	100,00
Maluku	58,98	18,09	19,49	3,45	100,00
Maluku Utara	53,36	16,95	25,60	4,09	100,00
Papua	67,38	14,99	14,84	2,79	100,00
Papua Barat	68,07	15,84	13,04	3,05	100,00
INDONESIA	60,60	17,36	18,99	3,05	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.1.1
Percentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan, 2011

Provinsi	Perkotaan						
	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	12,36	22,83	32,82	13,27	14,54	4,18	100,00
Sumatera Utara	8,00	26,47	29,09	12,07	19,55	4,82	100,00
Sumatera Barat	5,83	31,24	26,54	12,28	19,23	4,89	100,00
Riau	10,71	23,12	27,75	14,50	19,12	4,80	100,00
Kepulauan Riau	12,10	21,17	37,30	10,70	16,15	2,59	100,00
Jambi	12,24	28,94	28,33	10,49	14,02	5,98	100,00
Sumatera Selatan	15,52	25,08	29,96	10,21	14,64	4,58	100,00
Bangka Belitung	15,55	31,10	29,61	11,48	10,13	2,12	100,00
Bengkulu	13,92	28,05	23,77	11,30	13,03	9,93	100,00
Lampung	16,40	28,48	31,50	9,88	10,13	3,60	100,00
DKI Jakarta	10,82	15,75	21,88	14,19	25,06	12,30	100,00
Jawa Barat	17,17	30,21	29,77	8,46	10,17	4,22	100,00
Banten	26,21	30,06	17,75	8,08	11,52	6,39	100,00
Jawa Tengah	29,50	28,95	21,97	7,75	8,67	3,16	100,00
DI Yogyakarta	27,82	23,44	19,85	9,39	11,39	8,11	100,00
Jawa Timur	27,24	27,84	22,48	8,84	10,05	3,54	100,00
Bali	32,86	22,32	25,71	5,71	8,55	4,86	100,00
Nusa Tenggara Barat	50,33	21,89	13,71	5,33	5,76	2,98	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,51	28,17	21,45	11,86	16,92	5,09	100,00
Kalimantan Barat	33,41	25,43	21,40	6,41	10,37	2,98	100,00
Kalimantan Tengah	14,15	28,27	30,27	8,58	14,08	4,65	100,00
Kalimantan Selatan	12,31	35,43	26,29	10,04	12,64	3,28	100,00
Kalimantan Timur	16,15	23,04	27,99	12,12	14,70	6,00	100,00
Sulawesi Utara	1,31	25,94	24,78	18,13	23,94	5,90	100,00
Gorontalo	4,33	30,99	27,27	14,20	18,44	4,77	100,00
Sulawesi Tengah	9,55	19,66	29,91	10,25	18,84	11,79	100,00
Sulawesi Selatan	19,66	22,31	22,97	11,15	17,11	6,81	100,00
Sulawesi Barat	22,11	25,13	27,88	7,22	11,69	5,98	100,00
Sulawesi Tenggara	21,54	26,00	18,20	7,90	18,79	7,57	100,00
Maluku	7,08	23,15	33,56	14,15	14,97	7,08	100,00
Maluku Utara	8,86	26,45	25,62	15,24	18,29	5,55	100,00
Papua	8,11	14,08	27,45	11,79	22,79	15,78	100,00
Papua Barat	10,41	18,27	32,52	13,37	19,98	5,45	100,00
INDONESIA	21,67	27,19	24,85	9,35	12,15	4,79	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.1.2
Percentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan, 2011

Provinsi	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Perdesaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	22,52	34,69	31,20	5,83	4,58	1,18	100,00
Sumatera Utara	13,94	38,65	29,93	9,22	7,01	1,24	100,00
Sumatera Barat	10,68	49,29	23,27	8,60	6,64	1,51	100,00
Riau	22,33	45,50	24,56	4,16	3,09	0,36	100,00
Kepulauan Riau	25,48	38,73	26,37	7,22	1,05	1,15	100,00
Jambi	25,95	41,46	22,70	5,53	3,86	0,50	100,00
Sumatera Selatan	20,11	46,54	26,24	4,16	2,47	0,49	100,00
Bangka Belitung	26,92	46,18	18,74	3,97	3,35	0,84	100,00
Bengkulu	30,13	44,25	18,30	4,03	2,41	0,88	100,00
Lampung	28,86	42,80	22,37	2,77	2,28	0,93	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	24,63	39,62	31,20	1,81	2,01	0,72	100,00
Banten	34,05	43,53	18,38	1,41	1,81	0,82	100,00
Jawa Tengah	38,56	36,70	19,95	2,58	1,56	0,64	100,00
DI Yogyakarta	45,89	27,14	16,75	4,62	3,25	2,34	100,00
Jawa Timur	47,73	31,52	17,47	1,70	1,09	0,48	100,00
Bali	45,25	29,26	20,34	1,45	2,29	1,39	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,52	28,35	10,14	1,97	2,25	0,76	100,00
Nusa Tenggara Timur	36,38	38,82	19,38	2,30	2,45	0,68	100,00
Kalimantan Barat	46,43	34,53	15,05	2,55	1,32	0,12	100,00
Kalimantan Tengah	19,20	35,10	35,24	5,32	4,13	1,00	100,00
Kalimantan Selatan	24,81	47,66	22,17	2,45	2,19	0,72	100,00
Kalimantan Timur	28,92	35,57	26,30	4,12	4,38	0,72	100,00
Sulawesi Utara	2,90	44,10	31,20	12,20	8,13	1,47	100,00
Gorontalo	9,94	50,01	29,14	5,39	4,70	0,81	100,00
Sulawesi Tengah	18,50	37,89	31,94	6,43	4,57	0,67	100,00
Sulawesi Selatan	43,93	31,97	16,56	3,14	3,04	1,36	100,00
Sulawesi Barat	37,17	33,32	20,71	4,74	3,36	0,70	100,00
Sulawesi Tenggara	38,51	35,05	17,16	4,30	3,71	1,27	100,00
Maluku	11,31	37,05	38,34	6,00	6,09	1,21	100,00
Maluku Utara	24,29	35,28	30,54	5,74	3,25	0,90	100,00
Papua	42,16	22,44	22,32	4,84	6,24	2,00	100,00
Papua Barat	23,11	29,61	26,54	5,90	10,50	4,33	100,00
INDONESIA	34,72	36,79	21,97	3,23	2,50	0,79	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.1.3
Percentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan, 2011

Provinsi	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Perkotaan + Perdesaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	19,66	31,35	31,66	7,93	7,38	2,02	100,00
Sumatera Utara	11,02	32,66	29,52	10,62	13,18	3,00	100,00
Sumatera Barat	8,80	42,30	24,54	10,03	11,51	2,82	100,00
Riau	17,78	36,73	25,81	8,21	9,37	2,10	100,00
Kepulauan Riau	14,56	24,40	35,29	10,06	13,37	2,32	100,00
Jambi	21,74	37,62	24,43	7,05	6,98	2,18	100,00
Sumatera Selatan	18,46	38,86	27,57	6,33	6,83	1,95	100,00
Bangka Belitung	21,32	38,75	24,10	7,67	6,69	1,47	100,00
Bengkulu	25,11	39,23	20,00	6,28	5,70	3,68	100,00
Lampung	25,66	39,12	24,72	4,59	4,30	1,61	100,00
DKI Jakarta	10,82	15,75	21,88	14,19	25,06	12,30	100,00
Jawa Barat	19,73	33,44	30,26	6,18	7,37	3,02	100,00
Banten	28,82	34,55	17,96	5,85	8,28	4,53	100,00
Jawa Tengah	34,42	33,16	20,88	4,94	4,81	1,79	100,00
DI Yogyakarta	33,92	24,69	18,80	7,78	8,64	6,16	100,00
Jawa Timur	37,99	29,77	19,85	5,10	5,35	1,94	100,00
Bali	37,80	25,09	23,57	4,01	6,05	3,48	100,00
Nusa Tenggara Barat	53,94	25,66	11,63	3,38	3,71	1,69	100,00
Nusa Tenggara Timur	32,61	36,81	19,77	4,11	5,18	1,52	100,00
Kalimantan Barat	42,49	31,77	16,97	3,72	4,06	0,98	100,00
Kalimantan Tengah	17,51	32,81	33,58	6,41	7,46	2,22	100,00
Kalimantan Selatan	19,59	42,55	23,89	5,62	6,55	1,79	100,00
Kalimantan Timur	21,02	27,82	27,35	9,07	10,76	3,99	100,00
Sulawesi Utara	2,18	35,88	28,29	14,88	15,29	3,48	100,00
Gorontalo	8,03	43,53	28,50	8,39	9,38	2,16	100,00
Sulawesi Tengah	16,32	33,45	31,45	7,36	8,05	3,38	100,00
Sulawesi Selatan	35,04	28,43	18,91	6,07	8,20	3,35	100,00
Sulawesi Barat	33,61	31,38	22,41	5,32	5,33	1,95	100,00
Sulawesi Tenggara	33,86	32,57	17,44	5,29	7,84	3,00	100,00
Maluku	9,74	31,88	36,56	9,03	9,39	3,40	100,00
Maluku Utara	20,11	32,89	29,21	8,31	7,32	2,16	100,00
Papua	32,78	20,14	23,73	6,76	10,80	5,79	100,00
Papua Barat	19,34	26,25	28,32	8,11	13,31	4,66	100,00
INDONESIA	28,29	32,06	23,39	6,25	7,26	2,76	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.2.1
Percentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan
Kemampuan Membaca dan Menulis, 2011

Provinsi	Perkotaan - Laki-Laki				
	Dapat membaca				Jumlah
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	48,65	0,91	45,43	5,01	100,00
Sumatera Utara	50,78	0,31	45,31	3,59	100,00
Sumatera Barat	58,04	0,70	36,25	5,01	100,00
R i a u	25,62	1,49	69,28	3,60	100,00
Kepulauan Riau	20,57	1,68	70,85	6,91	100,00
J a m b i	55,46	0,92	38,08	5,54	100,00
Sumatera Selatan	42,37	0,31	53,69	3,64	100,00
Bangka Belitung	44,17	2,65	46,83	6,34	100,00
Bengkulu	44,58	0,59	49,28	5,54	100,00
Lampung	47,50	1,48	44,46	6,56	100,00
DKI Jakarta	40,34	0,90	56,83	1,93	100,00
Jawa Barat	33,17	1,43	56,40	9,01	100,00
Banten	32,13	3,47	51,75	12,64	100,00
Jawa Tengah	44,54	1,84	37,02	16,60	100,00
DI Yogyakarta	40,95	1,17	46,58	11,30	100,00
Jawa Timur	44,63	1,66	38,22	15,49	100,00
B a l i	29,92	1,07	52,98	16,03	100,00
Nusa Tenggara Barat	45,27	1,69	22,63	30,42	100,00
Nusa Tenggara Timur	76,24	0,00	11,43	12,32	100,00
Kalimantan Barat	44,84	4,53	34,80	15,83	100,00
Kalimantan Tengah	48,89	1,47	41,32	8,32	100,00
Kalimantan Selatan	27,91	0,56	66,94	4,60	100,00
Kalimantan Timur	36,27	1,66	55,37	6,70	100,00
Sulawesi Utara	86,15	0,55	12,51	0,79	100,00
Gorontalo	65,05	0,89	31,21	2,85	100,00
Sulawesi Tengah	50,05	0,00	43,28	6,68	100,00
Sulawesi Selatan	48,73	1,29	39,45	10,53	100,00
Sulawesi Barat	56,60	1,69	24,73	16,98	100,00
Sulawesi Tenggara	58,83	0,00	28,71	12,46	100,00
Maluku	64,02	1,28	28,20	6,50	100,00
Maluku Utara	54,86	1,30	37,68	6,16	100,00
Papua	78,54	0,48	14,50	6,47	100,00
Papua Barat	65,72	0,00	27,47	6,81	100,00
INDONESIA	41,73	1,48	45,55	11,24	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.2.2
Percentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan
Kemampuan Membaca dan Menulis, 2011

Perkotaan - Perempuan

Provinsi	Dapat membaca				Jumlah
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	44,28	6,36	29,19	20,17	100,00
Sumatera Utara	49,80	1,06	35,27	13,88	100,00
Sumatera Barat	48,73	2,41	35,36	13,51	100,00
R i a u	19,89	8,66	59,28	12,16	100,00
Kepulauan Riau	26,04	10,37	46,09	17,49	100,00
J a m b i	44,01	4,16	32,61	19,22	100,00
Sumatera Selatan	29,80	7,36	42,80	20,05	100,00
Bangka Belitung	41,57	8,75	33,64	16,04	100,00
Bengkulu	40,40	3,73	33,79	22,08	100,00
Lampung	43,94	4,01	30,15	21,91	100,00
DKI Jakarta	34,16	11,07	48,01	6,76	100,00
Jawa Barat	25,60	5,74	45,30	23,36	100,00
Banten	28,48	13,02	31,40	27,10	100,00
Jawa Tengah	31,29	3,34	19,59	45,79	100,00
DI Yogyakarta	28,99	1,64	22,39	46,98	100,00
Jawa Timur	31,06	3,42	23,09	42,43	100,00
B a l i	28,51	0,86	19,57	51,06	100,00
Nusa Tenggara Barat	24,09	2,51	7,44	65,96	100,00
Nusa Tenggara Timur	65,92	0,36	8,43	25,30	100,00
Kalimantan Barat	30,95	9,03	19,01	41,01	100,00
Kalimantan Tengah	44,72	5,27	30,54	19,47	100,00
Kalimantan Selatan	26,42	2,50	49,17	21,91	100,00
Kalimantan Timur	28,88	6,02	41,31	23,79	100,00
Sulawesi Utara	87,33	0,31	10,48	1,87	100,00
Gorontalo	43,54	2,36	45,47	8,64	100,00
Sulawesi Tengah	51,74	2,38	31,47	14,41	100,00
Sulawesi Selatan	41,52	2,27	25,41	30,81	100,00
Sulawesi Barat	47,27	2,05	19,34	31,34	100,00
Sulawesi Tenggara	40,64	0,43	22,20	36,73	100,00
Maluku	71,68	0,22	19,91	8,18	100,00
Maluku Utara	66,93	1,83	21,80	9,45	100,00
Papua	75,49	0,67	10,94	12,89	100,00
Papua Barat	67,85	0,00	12,81	19,33	100,00
INDONESIA	32,79	4,54	30,73	31,94	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.2.3
Percentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan
Kemampuan Membaca dan Menulis, 2011

Perkotaan - Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Dapat membaca				Jumlah
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	46,26	3,89	36,54	13,30	100,00
Sumatera Utara	50,25	0,72	39,87	9,16	100,00
Sumatera Barat	52,96	1,63	35,76	9,64	100,00
R i a u	22,87	4,93	64,48	7,71	100,00
Kepulauan Riau	23,11	5,71	59,36	11,82	100,00
J a m b i	50,06	2,45	35,50	11,99	100,00
Sumatera Selatan	35,57	4,12	47,80	12,52	100,00
Bangka Belitung	42,76	5,98	39,64	11,63	100,00
Bengkulu	42,37	2,25	41,10	14,28	100,00
Lampung	45,62	2,81	36,91	14,65	100,00
DKI Jakarta	37,11	6,21	52,22	4,45	100,00
Jawa Barat	29,27	3,65	50,69	16,40	100,00
Banten	30,36	8,11	41,87	19,67	100,00
Jawa Tengah	37,32	2,66	27,51	32,52	100,00
DI Yogyakarta	34,31	1,43	33,15	31,10	100,00
Jawa Timur	37,10	2,64	29,83	30,43	100,00
B a l i	29,18	0,96	35,43	34,43	100,00
Nusa Tenggara Barat	33,44	2,15	14,14	50,28	100,00
Nusa Tenggara Timur	70,96	0,18	9,89	18,97	100,00
Kalimantan Barat	38,00	6,75	27,02	28,23	100,00
Kalimantan Tengah	46,95	3,24	36,30	13,51	100,00
Kalimantan Selatan	27,06	1,67	56,77	14,51	100,00
Kalimantan Timur	33,00	3,59	49,14	14,28	100,00
Sulawesi Utara	86,80	0,42	11,39	1,39	100,00
Gorontalo	53,12	1,70	39,12	6,06	100,00
Sulawesi Tengah	50,91	1,22	37,22	10,65	100,00
Sulawesi Selatan	44,52	1,86	31,25	22,37	100,00
Sulawesi Barat	51,29	1,90	21,66	25,15	100,00
Sulawesi Tenggara	49,51	0,22	25,37	24,90	100,00
Maluku	68,34	0,68	23,53	7,45	100,00
Maluku Utara	61,22	1,58	29,30	7,89	100,00
Papua	77,15	0,57	12,87	9,41	100,00
Papua Barat	66,72	0,00	20,62	12,66	100,00
INDONESIA	36,96	3,12	37,64	22,29	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.2.4
Percentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan
Kemampuan Membaca dan Menulis, 2011

Provinsi	Dapat membaca					Perdesaan - Laki-laki (6)
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	Jumlah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Aceh	52,92	2,82	32,58	11,68	100,00	
Sumatera Utara	64,98	0,56	26,98	7,48	100,00	
Sumatera Barat	61,87	0,69	28,58	8,86	100,00	
R i a u	23,29	5,69	61,78	9,24	100,00	
Kepulauan Riau	27,12	1,22	59,89	11,76	100,00	
J a m b i	42,19	2,01	43,66	12,14	100,00	
Sumatera Selatan	46,05	2,81	41,83	9,32	100,00	
Bangka Belitung	33,39	3,90	55,25	7,46	100,00	
Bengkulu	56,72	0,68	28,25	14,35	100,00	
Lampung	52,13	2,60	28,61	16,67	100,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	32,62	2,13	50,42	14,83	100,00	
Banten	17,88	7,43	57,14	17,55	100,00	
Jawa Tengah	41,61	2,57	27,82	28,00	100,00	
DI Yogyakarta	43,65	0,68	31,38	24,29	100,00	
Jawa Timur	41,15	2,66	24,18	32,01	100,00	
B a l i	29,30	1,77	41,99	26,94	100,00	
Nusa Tenggara Barat	37,53	1,85	15,85	44,77	100,00	
Nusa Tenggara Timur	65,63	0,03	1,63	32,71	100,00	
Kalimantan Barat	50,05	3,28	20,87	25,80	100,00	
Kalimantan Tengah	62,16	2,30	25,61	9,93	100,00	
Kalimantan Selatan	29,39	3,36	56,00	11,26	100,00	
Kalimantan Timur	46,47	1,92	36,88	14,73	100,00	
Sulawesi Utara	85,50	0,20	11,75	2,55	100,00	
Gorontalo	59,05	0,00	26,53	14,42	100,00	
Sulawesi Tengah	56,46	1,23	30,58	11,73	100,00	
Sulawesi Selatan	36,69	2,94	25,39	34,97	100,00	
Sulawesi Barat	63,24	0,00	10,81	25,96	100,00	
Sulawesi Tenggara	60,22	0,56	11,57	27,65	100,00	
Maluku	72,61	0,61	20,67	6,10	100,00	
Maluku Utara	64,77	0,93	19,89	14,41	100,00	
Papua	51,38	0,16	8,78	39,69	100,00	
Papua Barat	61,36	0,50	18,91	19,23	100,00	
INDONESIA	44,18	2,30	30,63	22,88	100,00	

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.2.5
Percentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan
Kemampuan Membaca dan Menulis, 2011

Provinsi	Dapat membaca					Perdesaan - Perempuan Jumlah
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	35,48	12,55	19,84	32,12	100,00	
Sumatera Utara	56,94	1,78	18,18	23,10	100,00	
Sumatera Barat	48,86	3,43	25,18	22,53	100,00	
R i a u	16,96	18,53	40,59	23,92	100,00	
Kepulauan Riau	21,88	14,93	48,79	14,40	100,00	
J a m b i	32,03	8,39	18,93	40,66	100,00	
Sumatera Selatan	33,57	10,15	31,57	24,70	100,00	
Bangka Belitung	31,95	12,80	22,40	32,86	100,00	
Bengkulu	33,56	1,37	14,49	50,59	100,00	
Lampung	34,37	5,35	11,86	48,42	100,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	20,75	8,84	36,22	34,19	100,00	
Banten	16,84	16,30	26,79	40,07	100,00	
Jawa Tengah	25,74	4,44	11,75	58,07	100,00	
DI Yogyakarta	21,55	0,90	9,86	67,68	100,00	
Jawa Timur	20,07	2,81	7,37	69,76	100,00	
B a l i	18,46	0,26	13,00	68,28	100,00	
Nusa Tenggara Barat	22,88	0,21	1,82	75,09	100,00	
Nusa Tenggara Timur	45,12	0,13	0,58	54,17	100,00	
Kalimantan Barat	24,23	4,16	8,83	62,78	100,00	
Kalimantan Tengah	49,13	8,64	17,41	24,82	100,00	
Kalimantan Selatan	23,70	7,22	31,94	37,14	100,00	
Kalimantan Timur	25,97	9,40	27,61	37,02	100,00	
Sulawesi Utara	86,44	0,00	7,21	6,34	100,00	
Gorontalo	44,51	4,12	30,61	20,77	100,00	
Sulawesi Tengah	55,22	1,75	13,81	29,22	100,00	
Sulawesi Selatan	24,89	3,91	12,95	58,25	100,00	
Sulawesi Barat	41,23	0,89	3,54	54,33	100,00	
Sulawesi Tenggara	34,28	0,35	3,72	61,65	100,00	
Maluku	63,54	2,71	16,11	17,64	100,00	
Maluku Utara	47,94	5,87	9,26	36,94	100,00	
Papua	46,50	0,78	3,91	48,80	100,00	
Papua Barat	50,01	0,38	10,93	38,68	100,00	
INDONESIA	28,70	4,79	15,41	51,10	100,00	

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.2.6
Percentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan
Kemampuan Membaca dan Menulis, 2011

Perdesaan - Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Dapat membaca				Jumlah
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	43,56	8,05	25,74	22,66	100,00
Sumatera Utara	60,42	1,25	21,99	16,33	100,00
Sumatera Barat	54,68	2,20	26,71	16,41	100,00
R i a u	20,32	11,72	51,83	16,13	100,00
Kepulauan Riau	25,00	6,77	55,40	12,83	100,00
J a m b i	37,26	5,11	31,65	25,98	100,00
Sumatera Selatan	39,74	6,52	36,64	17,10	100,00
Bangka Belitung	32,66	8,44	38,47	20,43	100,00
Bengkulu	44,86	1,03	21,21	32,89	100,00
Lampung	43,50	3,93	20,47	32,09	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	26,73	5,46	43,37	24,44	100,00
Banten	17,31	12,36	40,27	30,07	100,00
Jawa Tengah	33,14	3,57	19,24	44,05	100,00
DI Yogyakarta	30,82	0,81	18,88	49,49	100,00
Jawa Timur	29,30	2,75	14,73	53,22	100,00
B a l i	23,61	0,97	26,77	48,65	100,00
Nusa Tenggara Barat	29,69	0,97	8,34	60,99	100,00
Nusa Tenggara Timur	54,74	0,09	1,07	44,10	100,00
Kalimantan Barat	37,50	3,71	15,02	43,78	100,00
Kalimantan Tengah	56,18	5,21	21,85	16,77	100,00
Kalimantan Selatan	26,13	5,57	42,22	26,08	100,00
Kalimantan Timur	37,12	5,33	32,65	24,90	100,00
Sulawesi Utara	85,98	0,10	9,47	4,46	100,00
Gorontalo	51,35	2,18	28,69	17,78	100,00
Sulawesi Tengah	55,84	1,49	22,18	20,49	100,00
Sulawesi Selatan	30,08	3,49	18,42	48,01	100,00
Sulawesi Barat	51,22	0,49	6,84	41,45	100,00
Sulawesi Tenggara	47,15	0,45	7,61	44,78	100,00
Maluku	68,17	1,64	18,43	11,75	100,00
Maluku Utara	56,40	3,39	14,60	25,61	100,00
Papua	49,42	0,41	6,83	43,35	100,00
Papua Barat	56,47	0,45	15,47	27,62	100,00
INDONESIA	35,96	3,62	22,55	37,87	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.2.7
Percentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan
Kemampuan Membaca dan Menulis, 2011

Perkotaan+Perdesaan - Laki-Laki

Provinsi	Dapat membaca				Jumlah
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	51,74	2,29	36,14	9,83	100,00
Sumatera Utara	57,80	0,44	36,25	5,51	100,00
Sumatera Barat	60,37	0,69	31,58	7,35	100,00
R i a u	24,20	4,06	64,69	7,05	100,00
Kepulauan Riau	21,88	1,59	68,65	7,88	100,00
J a m b i	46,34	1,67	41,91	10,08	100,00
Sumatera Selatan	44,79	1,95	45,88	7,38	100,00
Bangka Belitung	38,51	3,31	51,25	6,93	100,00
Bengkulu	53,05	0,65	34,61	11,68	100,00
Lampung	51,01	2,33	32,43	14,23	100,00
DKI Jakarta	40,34	0,90	56,83	1,93	100,00
Jawa Barat	32,98	1,67	54,30	11,05	100,00
Banten	27,83	4,66	53,38	14,13	100,00
Jawa Tengah	42,93	2,24	31,97	22,86	100,00
DI Yogyakarta	41,82	1,01	41,65	15,52	100,00
Jawa Timur	42,82	2,18	30,91	24,09	100,00
B a l i	29,67	1,35	48,60	20,38	100,00
Nusa Tenggara Barat	40,66	1,79	18,59	38,96	100,00
Nusa Tenggara Timur	67,71	0,02	3,54	28,73	100,00
Kalimantan Barat	48,49	3,65	25,05	22,81	100,00
Kalimantan Tengah	57,75	2,02	30,83	9,40	100,00
Kalimantan Selatan	28,77	2,19	60,57	8,47	100,00
Kalimantan Timur	40,11	1,75	48,42	9,72	100,00
Sulawesi Utara	85,78	0,35	12,07	1,80	100,00
Gorontalo	61,02	0,29	28,07	10,62	100,00
Sulawesi Tengah	54,93	0,94	33,62	10,52	100,00
Sulawesi Selatan	40,95	2,36	30,36	26,33	100,00
Sulawesi Barat	61,73	0,38	13,96	23,92	100,00
Sulawesi Tenggara	59,85	0,41	16,21	23,54	100,00
Maluku	69,73	0,84	23,20	6,24	100,00
Maluku Utara	62,20	1,03	24,50	12,27	100,00
Papua	58,33	0,24	10,25	31,18	100,00
Papua Barat	62,59	0,36	21,33	15,72	100,00
INDONESIA	42,98	1,90	37,96	17,16	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.2.8
Percentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan
Kemampuan Membaca dan Menulis, 2011

Perkotaan+Perdesaan - Perempuan

Provinsi	Dapat membaca				Jumlah
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	37,99	10,79	22,50	28,71	100,00
Sumatera Utara	53,50	1,43	26,40	18,67	100,00
Sumatera Barat	48,81	3,04	29,09	19,06	100,00
R i a u	18,12	14,61	48,02	19,25	100,00
Kepulauan Riau	25,36	11,12	46,53	16,99	100,00
J a m b i	35,63	7,12	23,04	34,21	100,00
Sumatera Selatan	32,16	9,11	35,77	22,96	100,00
Bangka Belitung	36,85	10,74	28,12	24,29	100,00
Bengkulu	35,72	2,12	20,60	41,56	100,00
Lampung	36,98	4,98	16,85	41,18	100,00
DKI Jakarta	34,16	11,07	48,01	6,76	100,00
Jawa Barat	23,97	6,78	42,26	26,99	100,00
Banten	24,24	14,21	29,72	31,82	100,00
Jawa Tengah	28,31	3,93	15,37	52,39	100,00
DI Yogyakarta	26,40	1,39	18,03	54,18	100,00
Jawa Timur	25,26	3,10	14,79	56,85	100,00
B a l i	24,50	0,62	16,95	57,93	100,00
Nusa Tenggara Barat	23,40	1,19	4,22	71,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	48,94	0,18	2,02	48,86	100,00
Kalimantan Barat	26,28	5,65	11,94	56,13	100,00
Kalimantan Tengah	47,64	7,50	21,85	23,01	100,00
Kalimantan Selatan	24,83	5,25	39,14	30,78	100,00
Kalimantan Timur	27,75	7,33	35,99	28,92	100,00
Sulawesi Utara	86,87	0,15	8,77	4,21	100,00
Gorontalo	44,17	3,50	35,83	16,50	100,00
Sulawesi Tengah	54,36	1,90	18,20	25,54	100,00
Sulawesi Selatan	31,14	3,29	17,63	47,93	100,00
Sulawesi Barat	42,70	1,18	7,40	48,72	100,00
Sulawesi Tenggara	36,05	0,37	8,85	54,73	100,00
Maluku	66,84	1,70	17,65	13,81	100,00
Maluku Utara	53,30	4,73	12,80	29,17	100,00
Papua	55,28	0,75	6,04	37,93	100,00
Papua Barat	55,60	0,26	11,52	32,62	100,00
INDONESIA	30,72	4,67	22,98	41,63	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.2.9
Percentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan
Kemampuan Membaca dan Menulis, 2011

Perkotaan+Perdesaan - Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Dapat membaca					Jumlah
	Huruf latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	44,32	6,88	28,78	20,03	100,00	
Sumatera Utara	55,42	0,99	30,79	12,80	100,00	
Sumatera Barat	54,02	1,98	30,21	13,79	100,00	
R i a u	21,32	9,06	56,79	12,83	100,00	
Kepulauan Riau	23,45	5,91	58,64	12,00	100,00	
J a m b i	41,19	4,29	32,83	21,69	100,00	
Sumatera Selatan	38,24	5,66	40,64	15,46	100,00	
Bangka Belitung	37,63	7,23	39,05	16,09	100,00	
Bengkulu	44,09	1,41	27,37	27,13	100,00	
Lampung	44,05	3,64	24,70	27,61	100,00	
DKI Jakarta	37,11	6,21	52,22	4,45	100,00	
Jawa Barat	28,40	4,27	48,18	19,16	100,00	
Banten	26,00	9,53	41,33	23,14	100,00	
Jawa Tengah	35,05	3,15	23,02	38,78	100,00	
DI Yogyakarta	33,13	1,22	28,33	37,31	100,00	
Jawa Timur	33,01	2,69	21,91	42,38	100,00	
B a l i	26,96	0,97	31,98	40,10	100,00	
Nusa Tenggara Barat	31,25	1,46	10,76	56,52	100,00	
Nusa Tenggara Timur	57,81	0,10	2,74	39,35	100,00	
Kalimantan Barat	37,65	4,63	18,65	39,07	100,00	
Kalimantan Tengah	53,09	4,55	26,69	15,68	100,00	
Kalimantan Selatan	26,51	3,94	48,30	21,25	100,00	
Kalimantan Timur	34,57	4,25	42,85	18,33	100,00	
Sulawesi Utara	86,35	0,24	10,34	3,07	100,00	
Gorontalo	51,95	2,02	32,24	13,79	100,00	
Sulawesi Tengah	54,64	1,42	25,85	18,09	100,00	
Sulawesi Selatan	35,37	2,89	23,12	38,62	100,00	
Sulawesi Barat	51,24	0,82	10,34	37,60	100,00	
Sulawesi Tenggara	47,79	0,39	12,48	39,33	100,00	
Maluku	68,24	1,28	20,33	10,15	100,00	
Maluku Utara	57,70	2,90	18,58	20,82	100,00	
Papua	57,06	0,45	8,49	34,00	100,00	
Papua Barat	59,50	0,32	16,99	23,18	100,00	
INDONESIA	36,45	3,37	29,99	30,19	100,00	

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.1
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan
menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			K+D		
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	57,51	68,63	63,59	61,31	71,08	66,56	60,26	70,38	65,73
Sumatera Utara	43,50	46,57	45,16	55,59	56,22	55,95	49,47	51,58	50,64
Sumatera Barat	53,68	53,53	53,60	56,97	59,83	58,55	55,68	57,41	56,63
Riau	47,46	47,24	47,35	49,86	55,87	52,68	48,93	52,44	50,59
Kepulauan Riau	34,21	48,08	40,64	48,59	57,27	52,10	37,09	49,59	42,75
Jambi	30,76	41,21	35,69	48,79	50,88	49,80	43,15	47,97	45,47
Sumatera Selatan	47,32	59,78	54,06	50,42	49,80	50,11	49,37	53,53	51,52
Bangka Belitung	53,13	60,44	57,11	68,15	69,71	68,95	61,02	64,99	63,11
Bengkulu	54,24	57,74	56,09	56,13	59,42	57,81	55,56	58,89	57,28
Lampung	45,87	46,04	45,96	54,76	54,35	54,56	52,61	52,08	52,35
DKI Jakarta	51,98	57,18	54,70	-	-	-	51,98	57,18	54,70
Jawa Barat	48,32	55,89	52,21	59,60	63,61	61,59	52,28	58,47	55,43
Banten	59,56	65,93	62,65	62,10	65,65	64,07	60,32	65,83	63,13
Jawa Tengah	49,76	53,51	51,81	47,37	51,16	49,39	48,45	52,24	50,50
DI Yogyakarta	55,63	52,64	53,97	51,03	49,50	50,15	54,14	51,55	52,68
Jawa Timur	49,41	49,43	49,42	45,09	48,19	46,83	47,16	48,77	48,06
Bali	55,30	57,68	56,55	65,24	67,93	66,65	59,26	61,77	60,58
Nusa Tenggara Barat	61,86	64,52	63,35	63,29	67,37	65,48	62,71	66,15	64,59
Nusa Tenggara Timur	59,63	61,06	60,37	62,41	62,42	62,42	61,87	62,17	62,03
Kalimantan Barat	52,89	54,64	53,75	56,85	59,22	58,00	55,66	57,82	56,72
Kalimantan Tengah	46,47	55,69	50,77	48,60	54,69	51,40	47,90	55,03	51,19
Kalimantan Selatan	55,43	63,16	59,86	60,30	62,05	61,30	58,27	62,51	60,70
Kalimantan Timur	42,67	42,49	42,59	52,39	56,89	54,44	46,32	48,08	47,11
Sulawesi Utara	39,72	39,83	39,78	49,13	49,84	49,48	45,11	45,07	45,09
Gorontalo	58,14	47,09	52,01	71,19	69,59	70,34	66,91	61,68	64,10
Sulawesi Tengah	51,44	60,86	56,27	58,21	61,72	59,97	56,59	61,51	59,07
Sulawesi Selatan	47,75	50,85	49,56	51,91	55,24	53,78	50,44	53,59	52,23
Sulawesi Barat	66,13	53,42	58,89	57,28	57,65	57,48	59,28	56,61	57,81
Sulawesi Tenggara	42,66	58,17	50,61	54,45	57,73	56,10	51,26	57,85	54,60
Maluku	49,23	51,71	50,63	53,73	51,58	52,67	52,22	51,63	51,92
Maluku Utara	47,18	36,39	41,49	49,74	56,50	53,11	49,08	50,82	49,96
Papua	34,09	40,94	37,23	44,22	57,68	49,63	41,63	52,61	46,21
Papua Barat	41,60	51,94	46,43	47,10	39,18	43,69	45,55	43,18	44,50
INDONESIA	49,83	53,60	51,84	52,41	55,07	53,82	51,14	54,34	52,85

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.2
Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah
dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	33,07	40,76	37,27	40,80	45,81	43,49	38,66	44,37	41,74
Sumatera Utara	25,26	24,61	24,91	34,54	34,29	34,39	29,84	29,64	29,73
Sumatera Barat	25,81	26,78	26,34	34,47	28,41	31,12	31,08	27,79	29,27
Riau	23,11	26,37	24,68	27,94	26,64	27,33	26,07	26,53	26,29
Kepulauan Riau	19,76	27,11	23,17	29,80	32,92	31,06	21,77	28,07	24,62
Jambi	17,87	28,11	22,70	29,91	30,95	30,41	26,15	30,09	28,05
Sumatera Selatan	19,99	19,80	19,89	26,10	25,13	25,61	24,02	23,14	23,56
Bangka Belitung	19,44	21,45	20,54	29,20	26,32	27,73	24,57	23,84	24,18
Bengkulu	26,82	28,62	27,77	35,59	36,97	36,30	32,94	34,33	33,66
Lampung	22,15	24,05	23,15	28,04	27,32	27,69	26,61	26,43	26,52
DKI Jakarta	22,04	28,33	25,33	-	-	-	22,04	28,33	25,33
Jawa Barat	25,92	28,63	27,32	32,72	32,77	32,74	28,31	30,02	29,18
Banten	28,11	24,57	26,39	34,75	38,40	36,78	30,12	29,61	29,86
Jawa Tengah	23,15	25,46	24,41	24,12	25,29	24,74	23,68	25,37	24,59
DI Yogyakarta	23,14	19,41	21,07	23,80	24,83	24,40	23,36	21,30	22,20
Jawa Timur	24,58	24,96	24,79	24,79	27,10	26,09	24,69	26,09	25,47
Bali	30,50	30,06	30,27	43,44	43,91	43,68	35,66	35,59	35,62
Nusa Tenggara Barat	32,93	36,45	34,89	42,07	42,44	42,27	38,37	39,88	39,19
Nusa Tenggara Timur	26,94	26,45	26,69	40,76	39,01	39,83	38,06	36,70	37,34
Kalimantan Barat	27,12	28,67	27,89	35,93	36,69	36,30	33,29	34,24	33,75
Kalimantan Tengah	21,99	31,37	26,36	32,62	32,60	32,61	29,09	32,18	30,52
Kalimantan Selatan	21,51	27,81	25,11	25,68	27,61	26,78	23,93	27,69	26,09
Kalimantan Timur	21,44	24,58	22,83	34,69	36,65	35,59	26,42	29,26	27,69
Sulawesi Utara	21,19	23,91	22,70	34,88	34,69	34,79	29,04	29,56	29,31
Gorontalo	32,14	25,54	28,48	42,46	43,77	43,15	39,08	37,36	38,16
Sulawesi Tengah	27,98	33,90	31,02	35,14	40,24	37,70	33,43	38,67	36,07
Sulawesi Selatan	24,47	24,80	24,66	30,44	28,44	29,32	28,33	27,07	27,62
Sulawesi Barat	29,23	23,99	26,25	26,62	28,45	27,62	27,22	27,36	27,30
Sulawesi Tenggara	26,92	30,18	28,59	35,42	36,31	35,87	33,12	34,61	33,87
Maluku	28,66	28,65	28,66	33,51	33,22	33,37	31,88	31,37	31,62
Maluku Utara	28,70	26,34	27,45	38,05	41,79	39,91	35,63	37,42	36,54
Papua	20,18	23,24	21,58	28,20	37,74	32,03	26,14	33,35	29,15
Papua Barat	19,73	30,86	24,93	29,29	24,83	27,37	26,59	26,72	26,65
INDONESIA	24,77	26,36	25,62	29,62	30,19	29,92	27,24	28,30	27,80

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.3.1
Percentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan
Lamanya Sakit (hari), 2011

Provinsi	Perkotaan					
	Lamanya Sakit (hari)					
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	44,97	31,56	5,69	4,37	13,41	100,00
Sumatera Utara	45,18	27,91	4,32	3,98	18,62	100,00
Sumatera Barat	39,78	33,84	3,87	5,18	17,33	100,00
Riau	50,60	29,74	3,69	2,35	13,63	100,00
Kepulauan Riau	39,40	35,17	8,20	1,96	15,27	100,00
Jambi	43,67	32,30	1,40	4,48	18,15	100,00
Sumatera Selatan	55,38	25,43	4,11	2,66	12,42	100,00
Bangka Belitung	40,53	29,64	10,48	1,96	17,39	100,00
Bengkulu	48,27	24,43	2,60	7,82	16,88	100,00
Lampung	47,82	30,68	2,06	4,99	14,44	100,00
DKI Jakarta	51,27	30,80	4,91	2,58	10,45	100,00
Jawa Barat	35,96	35,42	7,25	4,83	16,53	100,00
Banten	51,78	27,72	8,15	2,13	10,21	100,00
Jawa Tengah	40,45	33,44	5,82	3,53	16,77	100,00
DI Yogyakarta	40,27	30,25	5,36	4,63	19,49	100,00
Jawa Timur	41,56	30,92	5,97	4,91	16,64	100,00
Bali	52,79	21,79	5,25	1,01	19,16	100,00
Nusa Tenggara Barat	33,39	38,24	8,24	3,77	16,36	100,00
Nusa Tenggara Timur	39,80	34,84	9,10	2,86	13,39	100,00
Kalimantan Barat	39,87	34,77	3,49	0,54	21,33	100,00
Kalimantan Tengah	47,68	31,51	5,31	3,43	12,07	100,00
Kalimantan Selatan	43,28	33,68	0,65	3,17	19,21	100,00
Kalimantan Timur	40,62	32,27	6,56	2,70	17,85	100,00
Sulawesi Utara	32,54	31,57	10,84	1,96	23,10	100,00
Gorontalo	40,87	43,81	6,03	2,25	7,05	100,00
Sulawesi Tengah	42,15	25,87	8,27	6,45	17,27	100,00
Sulawesi Selatan	38,89	29,88	7,38	2,61	21,24	100,00
Sulawesi Barat	24,95	45,28	4,97	4,94	19,86	100,00
Sulawesi Tenggara	33,25	35,16	9,92	3,48	18,18	100,00
Maluku	29,63	29,57	14,16	3,49	23,16	100,00
Maluku Utara	44,77	39,58	8,36		7,29	100,00
Papua	33,18	40,12	1,79	0,49	24,41	100,00
Papua Barat	41,46	43,94	7,26	4,01	3,33	100,00
INDONESIA	41,39	32,15	6,16	3,95	16,35	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.3.2
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan
Lamanya Sakit (hari), 2011

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)						Perdesaan
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	42,05	36,85	6,91	4,56	9,63	100,00	
Sumatera Utara	40,79	35,40	6,79	2,58	14,44	100,00	
Sumatera Barat	35,82	30,69	7,04	7,31	19,14	100,00	
Riau	43,99	32,51	9,26	1,37	12,87	100,00	
Kepulauan Riau	31,76	36,24	3,49	0,79	27,72	100,00	
Jambi	41,43	32,02	6,19	5,05	15,30	100,00	
Sumatera Selatan	45,23	34,54	5,67	2,93	11,63	100,00	
Bangka Belitung	40,62	30,83	11,17	2,69	14,69	100,00	
Bengkulu	41,21	35,97	6,66	3,46	12,70	100,00	
Lampung	38,99	33,24	5,64	6,41	15,72	100,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	37,88	36,37	8,85	4,39	12,52	100,00	
Banten	35,87	33,67	8,39	6,09	15,99	100,00	
Jawa Tengah	42,86	33,81	4,79	3,22	15,33	100,00	
DI Yogyakarta	52,15	28,26	2,49	1,84	15,26	100,00	
Jawa Timur	35,04	35,71	7,68	4,61	16,96	100,00	
Bali	41,10	32,34	6,48	3,72	16,36	100,00	
Nusa Tenggara Barat	37,63	34,62	6,40	3,62	17,73	100,00	
Nusa Tenggara Timur	30,88	43,19	9,64	3,23	13,06	100,00	
Kalimantan Barat	44,06	32,44	5,16	3,63	14,71	100,00	
Kalimantan Tengah	51,92	30,95	4,43	3,56	9,13	100,00	
Kalimantan Selatan	43,59	24,69	6,25	4,44	21,03	100,00	
Kalimantan Timur	48,56	31,90	4,28	2,53	12,73	100,00	
Sulawesi Utara	33,13	42,80	10,62	2,64	10,81	100,00	
Gorontalo	39,36	36,84	8,18	3,34	12,29	100,00	
Sulawesi Tengah	35,48	34,55	11,33	2,95	15,69	100,00	
Sulawesi Selatan	40,55	27,60	8,31	3,90	19,64	100,00	
Sulawesi Barat	31,13	39,75	5,33	7,02	16,77	100,00	
Sulawesi Tenggara	39,77	35,26	9,40	3,03	12,54	100,00	
Maluku	34,95	40,79	6,88	1,71	15,66	100,00	
Maluku Utara	30,14	42,61	11,65	4,47	11,13	100,00	
Papua	32,30	46,48	7,80	7,20	6,22	100,00	
Papua Barat	40,97	39,87	3,46	6,69	9,00	100,00	
INDONESIA	39,03	34,77	7,11	4,03	15,07	100,00	

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.3.3
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan
Lamanya Sakit (hari), 2011

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan					
	Lamanya Sakit (hari)					
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	42,79	35,52	6,60	4,51	10,58	100,00
Sumatera Utara	42,60	32,31	5,77	3,16	16,16	100,00
Sumatera Barat	37,20	31,79	5,93	6,57	18,51	100,00
Riau	46,42	31,49	7,21	1,73	13,15	100,00
Kepulauan Riau	37,63	35,42	7,11	1,68	18,16	100,00
Jambi	41,99	32,09	5,00	4,91	16,01	100,00
Sumatera Selatan	48,30	31,79	5,20	2,85	11,87	100,00
Bangka Belitung	40,58	30,33	10,88	2,39	15,82	100,00
Bengkulu	43,02	33,02	5,62	4,57	13,77	100,00
Lampung	40,97	32,66	4,84	6,09	15,43	100,00
DKI Jakarta	51,27	30,80	4,91	2,58	10,45	100,00
Jawa Barat	36,70	35,78	7,87	4,66	14,99	100,00
Banten	45,24	30,17	8,25	3,76	12,59	100,00
Jawa Tengah	41,76	33,64	5,26	3,36	15,98	100,00
DI Yogyakarta	44,68	29,51	4,29	3,60	17,92	100,00
Jawa Timur	38,06	33,49	6,89	4,75	16,81	100,00
Bali	47,07	26,95	5,85	2,34	17,79	100,00
Nusa Tenggara Barat	36,05	35,96	7,08	3,68	17,22	100,00
Nusa Tenggara Timur	32,09	42,06	9,57	3,18	13,10	100,00
Kalimantan Barat	43,01	33,03	4,74	2,86	16,37	100,00
Kalimantan Tengah	50,70	31,11	4,69	3,52	9,98	100,00
Kalimantan Selatan	43,46	28,30	4,00	3,93	20,30	100,00
Kalimantan Timur	44,51	32,09	5,44	2,61	15,34	100,00
Sulawesi Utara	32,92	38,86	10,70	2,40	15,11	100,00
Gorontalo	39,74	38,61	7,63	3,06	10,96	100,00
Sulawesi Tengah	36,88	32,73	10,69	3,69	16,02	100,00
Sulawesi Selatan	40,01	28,34	8,01	3,48	20,16	100,00
Sulawesi Barat	29,72	41,01	5,25	6,54	17,47	100,00
Sulawesi Tenggara	38,26	35,23	9,52	3,14	13,85	100,00
Maluku	33,16	37,01	9,33	2,31	18,19	100,00
Maluku Utara	33,11	42,00	10,98	3,56	10,35	100,00
Papua	32,48	45,19	6,57	5,83	9,93	100,00
Papua Barat	41,11	41,00	4,52	5,94	7,43	100,00
INDONESIA	40,10	33,58	6,68	3,99	15,65	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.4
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dan
Berobat Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	63,20	62,95	63,05	69,11	62,48	65,31	67,55	62,61	64,69
Sumatera Utara	69,15	69,79	69,51	68,91	67,53	68,12	69,02	68,51	68,73
Sumatera Barat	52,21	44,25	47,88	54,37	55,69	55,11	53,56	51,60	52,46
Riau	62,88	64,53	63,67	72,52	66,46	69,50	68,90	65,77	67,36
Kepulauan Riau	54,41	70,78	63,39	80,33	75,33	78,11	61,22	71,64	66,69
Jambi	73,25	65,08	68,80	67,27	72,79	70,01	68,60	70,80	69,72
Sumatera Selatan	79,12	71,01	74,27	72,24	73,01	72,63	74,49	72,18	73,24
Bangka Belitung	60,74	67,61	64,71	76,47	66,90	71,53	69,97	67,24	68,49
Bengkulu	58,21	58,81	58,54	67,77	70,47	69,19	64,95	66,85	65,96
Lampung	68,58	57,78	62,87	70,74	69,69	70,23	70,28	66,82	68,57
DKI Jakarta	64,62	58,09	61,05	-	-	-	64,62	58,09	61,05
Jawa Barat	72,34	68,26	70,09	79,07	77,59	78,31	75,04	71,66	73,23
Banten	70,92	75,09	73,05	81,05	80,75	80,88	74,07	77,15	75,70
Jawa Tengah	58,47	57,60	57,98	62,56	61,49	61,97	60,67	59,65	60,10
DI Yogyakarta	51,56	49,91	50,66	49,43	44,71	46,73	50,91	48,17	49,40
Jawa Timur	60,59	58,13	59,22	63,20	61,89	62,44	61,89	60,09	60,87
Bali	48,02	47,06	47,51	45,59	54,12	50,16	46,95	50,16	48,67
Nusa Tenggara Barat	67,40	61,06	63,79	66,42	62,60	64,31	66,81	61,95	64,10
Nusa Tenggara Timur	63,51	59,92	61,65	56,00	53,62	54,74	57,41	54,76	56,01
Kalimantan Barat	69,82	62,22	66,01	73,50	72,94	73,22	72,45	69,85	71,16
Kalimantan Tengah	79,51	81,26	80,40	82,01	76,08	79,12	81,21	77,85	79,54
Kalimantan Selatan	81,03	77,45	78,87	79,03	76,49	77,55	79,82	76,89	78,10
Kalimantan Timur	56,58	68,62	61,90	73,08	71,98	72,56	63,59	70,16	66,60
Sulawesi Utara	61,42	52,32	56,38	65,57	62,72	64,13	64,01	58,34	61,03
Gorontalo	62,73	58,30	60,51	85,38	78,39	81,72	78,92	73,00	75,86
Sulawesi Tengah	59,18	67,62	63,86	69,94	74,97	72,53	67,60	73,16	70,52
Sulawesi Selatan	65,86	64,70	65,16	66,40	61,29	63,46	66,22	62,51	64,05
Sulawesi Barat	60,46	51,74	55,96	64,02	63,18	63,56	63,12	60,55	61,73
Sulawesi Tenggara	74,74	60,93	66,60	74,06	72,19	73,09	74,21	69,05	71,44
Maluku	72,37	63,16	67,06	83,14	80,26	81,76	79,73	73,32	76,43
Maluku Utara	81,60	70,90	76,65	80,16	82,02	81,15	80,52	79,77	80,14
Papua	58,90	56,85	57,86	61,82	49,77	56,20	61,21	51,44	56,57
Papua Barat	75,40	59,78	67,23	61,86	60,27	61,25	65,36	60,09	63,10
INDONESIA	64,39	61,88	63,00	67,50	65,58	66,46	66,01	63,77	64,79

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.5.1
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri
menurut Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan, 2011

Provinsi	Jenis Obat yang Digunakan					Perkotaan
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12,60	49,53	1,12	36,74	100,00	
Sumatera Utara	10,23	59,10	0,22	30,44	100,00	
Sumatera Barat	16,64	57,66	0,00	25,70	100,00	
R i a u	3,43	56,40	0,00	40,17	100,00	
J a m b i	13,78	43,45	1,44	41,33	100,00	
Sumatera Selatan	12,08	68,41	0,00	19,51	100,00	
Bengkulu	6,71	65,59	0,00	27,70	100,00	
Lampung	11,25	59,93	0,00	28,82	100,00	
Bangka Belitung	10,55	61,57	0,00	27,88	100,00	
Kepulauan Riau	9,39	62,78	0,00	27,84	100,00	
DKI Jakarta	6,87	73,70	0,00	19,42	100,00	
Jawa Barat	6,79	64,39	1,17	27,66	100,00	
Jawa Tengah	4,97	77,74	0,00	17,29	100,00	
DI Yogyakarta	9,83	61,35	1,01	27,82	100,00	
Jawa Timur	16,60	60,88	1,81	20,70	100,00	
Banten	10,61	57,43	1,52	30,44	100,00	
B a l i	20,64	41,11	0,78	37,47	100,00	
Nusa Tenggara Barat	10,26	67,62	0,00	22,12	100,00	
Nusa Tenggara Timur	6,34	73,93	3,12	16,61	100,00	
Kalimantan Barat	6,05	52,23	0,00	41,71	100,00	
Kalimantan Tengah	4,32	50,33	1,29	44,06	100,00	
Kalimantan Selatan	9,26	54,61	0,86	35,27	100,00	
Kalimantan Timur	9,72	66,23	0,00	24,04	100,00	
Sulawesi Utara	6,87	64,04	4,26	24,83	100,00	
Sulawesi Tengah	5,52	71,75	0,00	22,73	100,00	
Sulawesi Selatan	0,95	78,77	0,00	20,28	100,00	
Sulawesi Tenggara	7,42	59,89	0,95	31,74	100,00	
Gorontalo	8,29	84,44	0,00	7,27	100,00	
Sulawesi Barat	17,11	52,27	0,97	29,66	100,00	
Maluku	16,09	49,56	2,21	32,14	100,00	
Maluku Utara	10,02	50,24	0,00	39,74	100,00	
Papua Barat	12,39	69,40	0,00	18,21	100,00	
Papua	11,84	70,28	0,00	17,88	100,00	
INDONESIA	9,03	62,18	0,94	27,85	100,00	

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.5.2
Percentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri
menurut Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan, 2011

Provinsi	Jenis Obat yang Digunakan					Perdesaan
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	11,21	43,68	0,85	44,26	100,00	
Sumatera Utara	10,57	53,82	1,32	34,29	100,00	
Sumatera Barat	17,95	42,87	0,96	38,22	100,00	
R i a u	6,92	51,44	0,55	41,10	100,00	
J a m b i	30,91	33,69	0,00	35,40	100,00	
Sumatera Selatan	11,21	57,91	0,90	29,98	100,00	
Bengkulu	9,49	51,17	0,64	38,70	100,00	
Lampung	2,92	61,56	0,00	35,52	100,00	
Bangka Belitung	11,27	53,92	0,00	34,81	100,00	
Kepulauan Riau	16,33	52,25	1,19	30,23	100,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	6,07	65,48	0,87	27,59	100,00	
Jawa Tengah	3,69	65,65	0,78	29,88	100,00	
DI Yogyakarta	9,34	60,69	1,61	28,36	100,00	
Jawa Timur	18,60	63,36	1,94	16,10	100,00	
Banten	14,11	47,49	1,56	36,85	100,00	
B a l i	29,11	26,55	0,30	44,04	100,00	
Nusa Tenggara Barat	18,56	52,18	0,00	29,26	100,00	
Nusa Tenggara Timur	24,35	47,70	2,49	25,45	100,00	
Kalimantan Barat	6,18	52,59	0,00	41,23	100,00	
Kalimantan Tengah	4,36	59,70	0,72	35,22	100,00	
Kalimantan Selatan	3,48	64,05	0,00	32,47	100,00	
Kalimantan Timur	12,24	50,58	2,28	34,90	100,00	
Sulawesi Utara	9,16	63,76	1,29	25,79	100,00	
Sulawesi Tengah	2,95	79,29	0,00	17,76	100,00	
Sulawesi Selatan	11,03	59,34	0,00	29,64	100,00	
Sulawesi Tenggara	12,68	50,90	0,42	36,00	100,00	
Gorontalo	15,39	65,56	0,49	18,56	100,00	
Sulawesi Barat	5,98	63,30	0,44	30,27	100,00	
Maluku	7,96	63,99	0,00	28,05	100,00	
Maluku Utara	9,22	45,26	1,58	43,93	100,00	
Papua Barat	26,97	33,93	0,88	38,22	100,00	
Papua	11,09	54,98	0,00	33,93	100,00	
INDONESIA	11,47	54,92	1,07	32,54	100,00	

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.5.3
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri
menurut Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan, 2011

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Jenis Obat yang Digunakan				
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	11,55	45,11	0,92	42,42	100,00
Sumatera Utara	10,43	55,97	0,87	32,72	100,00
Sumatera Barat	17,53	47,56	0,66	34,26	100,00
R i a u	5,72	53,14	0,36	40,78	100,00
Kepulauan Riau	18,94	40,51	1,00	39,55	100,00
J a m b i	11,42	60,39	0,69	27,50	100,00
Sumatera Selatan	8,59	55,83	0,43	35,15	100,00
Bangka Belitung	6,28	60,90	0,00	32,82	100,00
Bengkulu	11,12	55,53	0,00	33,35	100,00
Lampung	14,95	54,34	0,96	29,75	100,00
DKI Jakarta	6,87	73,70	0,00	19,42	100,00
Jawa Barat	6,50	64,83	1,05	27,63	100,00
Banten	4,43	72,63	0,33	22,61	100,00
Jawa Tengah	9,55	60,97	1,35	28,13	100,00
DI Yogyakarta	17,38	61,84	1,86	18,91	100,00
Jawa Timur	12,57	51,85	1,55	34,04	100,00
B a l i	24,96	33,70	0,53	40,82	100,00
Nusa Tenggara Barat	15,50	57,88	0,00	26,63	100,00
Nusa Tenggara Timur	21,77	51,46	2,58	24,18	100,00
Kalimantan Barat	6,15	52,52	0,00	41,33	100,00
Kalimantan Tengah	4,35	57,04	0,88	37,73	100,00
Kalimantan Selatan	5,72	60,39	0,33	33,56	100,00
Kalimantan Timur	11,05	57,98	1,20	29,77	100,00
Sulawesi Utara	8,43	63,85	2,24	25,48	100,00
Gorontalo	3,37	78,05	0,00	18,58	100,00
Sulawesi Tengah	9,09	63,06	0,00	27,84	100,00
Sulawesi Selatan	11,02	53,74	0,58	34,66	100,00
Sulawesi Barat	13,78	69,82	0,38	16,01	100,00
Sulawesi Tenggara	8,43	60,87	0,56	30,14	100,00
Maluku	10,25	59,92	0,62	29,21	100,00
Maluku Utara	9,37	46,17	1,29	43,16	100,00
Papua	24,14	40,81	0,71	34,34	100,00
Papua Barat	11,30	59,29	0,00	29,41	100,00
INDONESIA	10,41	58,08	1,01	30,50	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.6
**Percentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Provinsi,
Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011**

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	66,67	60,03	62,75	62,17	61,74	61,92	63,36	61,26	62,15
Sumatera Utara	48,45	47,33	47,83	44,35	48,37	46,64	46,17	47,92	47,16
Sumatera Barat	59,88	64,75	62,53	56,68	55,28	55,89	57,88	58,67	58,32
Riau	43,69	51,53	47,44	35,73	38,98	37,35	38,72	43,47	41,05
Kepulauan Riau	58,67	59,11	58,91	70,36	50,65	61,60	61,74	57,51	59,52
Jambi	56,86	50,35	53,32	39,42	40,18	39,80	43,31	42,81	43,05
Sumatera Selatan	45,28	40,59	42,48	38,93	41,33	40,14	41,01	41,02	41,02
Bangka Belitung	53,55	51,75	52,51	41,81	52,46	47,31	46,66	52,13	49,63
Bengkulu	49,14	52,96	51,22	43,87	40,08	41,88	45,43	44,08	44,71
Lampung	46,38	56,96	51,97	45,14	44,01	44,59	45,40	47,13	46,26
DKI Jakarta	61,44	64,60	63,16	-	-	-	61,44	64,60	63,16
Jawa Barat	53,70	51,77	52,63	42,01	41,59	41,80	49,01	48,06	48,50
Banten	48,78	45,53	47,12	46,69	35,03	40,05	48,13	41,71	44,72
Jawa Tengah	48,75	50,16	49,55	42,96	43,61	43,32	45,65	46,72	46,24
DI Yogyakarta	51,09	62,74	57,40	41,36	59,04	51,50	48,11	61,51	55,50
Jawa Timur	47,75	52,77	50,54	47,91	48,29	48,13	47,83	50,44	49,31
Bali	67,20	64,22	65,60	65,51	60,74	62,95	66,46	62,69	64,44
Nusa Tenggara Barat	54,38	50,68	52,28	57,44	46,70	51,53	56,22	48,36	51,83
Nusa Tenggara Timur	47,06	37,92	42,32	51,59	48,35	49,87	50,73	46,46	48,48
Kalimantan Barat	47,04	56,87	51,97	45,98	40,07	43,04	46,28	44,92	45,60
Kalimantan Tengah	45,64	38,02	41,74	34,64	31,78	33,24	38,18	33,92	36,06
Kalimantan Selatan	41,09	44,49	43,15	41,53	41,80	41,69	41,36	42,94	42,29
Kalimantan Timur	48,46	49,21	48,79	44,86	42,28	43,63	46,93	46,03	46,52
Sulawesi Utara	56,92	61,67	59,55	54,13	54,09	54,11	55,18	57,28	56,28
Gorontalo	57,88	57,98	57,93	49,76	53,91	51,93	52,07	55,00	53,59
Sulawesi Tengah	46,71	47,80	47,31	37,16	41,62	39,46	39,24	43,14	41,28
Sulawesi Selatan	47,74	49,67	48,90	41,18	35,68	38,02	43,38	40,67	41,80
Sulawesi Barat	31,07	48,53	40,08	40,82	35,63	37,98	38,35	38,60	38,48
Sulawesi Tenggara	50,23	55,14	53,13	33,58	33,71	33,65	37,33	39,69	38,60
Maluku	37,35	41,18	39,56	34,61	34,80	34,70	35,48	37,39	36,46
Maluku Utara	37,68	50,58	43,65	35,81	32,98	34,32	36,28	36,54	36,41
Papua	51,49	55,95	53,74	42,62	41,41	42,06	44,48	44,84	44,65
Papua Barat	62,43	45,86	53,77	31,63	38,38	34,24	39,58	41,20	40,28
INDONESIA	51,31	52,62	52,03	45,44	45,22	45,32	48,25	48,83	48,56

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.7.1
Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan
Tempat Berobat Jalan, 2011

Provinsi	Perkotaan						
	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskes- mas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	27,31	2,60	23,56	31,49	26,89	8,72	2,17
Sumatera Utara	12,07	10,42	29,87	21,79	30,92	1,99	2,67
Sumatera Barat	17,93	9,89	24,71	29,13	24,49	4,01	0,75
Riau	20,39	22,02	26,43	21,35	14,88	2,13	0,00
Kepulauan Riau	4,95	5,18	25,81	42,12	24,84	1,71	3,10
Jambi	18,84	2,85	32,43	28,39	7,13	0,00	14,47
Sumatera Selatan	13,70	4,70	45,86	19,91	16,29	0,00	9,37
Bangka Belitung	18,32	7,83	33,01	35,60	13,68	0,00	1,39
Bengkulu	16,74	0,00	36,58	33,19	26,22	4,81	3,65
Lampung	2,68	7,35	43,52	25,67	25,94	2,57	0,38
DKI Jakarta	15,44	10,82	45,28	27,04	1,59	1,30	4,50
Jawa Barat	10,23	5,96	43,02	32,62	19,13	2,54	2,73
Banten	6,09	6,48	49,15	19,93	17,08	7,19	6,15
Jawa Tengah	9,29	4,21	36,86	28,83	23,80	3,23	1,59
DI Yogyakarta	14,11	17,11	36,54	23,69	14,52	3,60	2,54
Jawa Timur	11,11	4,43	33,86	25,10	30,11	3,41	2,10
Bali	8,62	0,54	45,38	22,44	30,93	3,75	0,17
Nusa Tenggara Barat	7,85	0,91	32,44	34,80	32,74	4,05	1,38
Nusa Tenggara Timur	14,07	4,52	40,03	41,76	7,81	0,00	2,70
Kalimantan Barat	12,06	6,17	31,00	24,75	33,11	4,41	5,42
Kalimantan Tengah	9,96	5,32	37,33	36,76	24,52	2,66	2,76
Kalimantan Selatan	13,36	2,83	22,14	42,59	24,45	5,38	3,21
Kalimantan Timur	27,15	2,63	33,33	33,46	7,73	1,40	1,36
Sulawesi Utara	21,11	7,72	50,30	18,67	7,26	0,00	3,10
Gorontalo	6,71	1,32	49,96	32,77	20,35	2,99	2,63
Sulawesi Tengah	13,07	4,04	29,97	32,12	11,92	3,44	7,20
Sulawesi Selatan	20,43	4,36	25,66	43,09	12,40	0,62	1,49
Sulawesi Barat	28,68	0,00	23,25	9,50	35,85	2,72	0,00
Sulawesi Tenggara	13,90	16,02	29,30	38,91	18,58	4,24	14,16
Maluku	9,83	2,49	37,58	43,07	7,92	13,46	0,00
Maluku Utara	12,90	3,24	52,68	21,10	11,95	0,00	13,06
Papua	47,16	8,09	25,37	28,38	0,00	0,00	2,39
Papua Barat	34,68	10,34	29,34	8,18	7,86	5,03	20,13
INDONESIA	11,70	6,00	37,81	28,46	21,76	3,06	2,63

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.7.2
Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan
Tempat Berobat Jalan, 2011

Provinsi	Perdesaan						
	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskes- mas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	16,62	1,08	16,52	48,94	34,43	2,54	2,53
Sumatera Utara	8,91	6,99	17,15	20,95	49,91	3,66	4,31
Sumatera Barat	6,91	2,01	18,77	34,62	44,48	8,29	4,32
Riau	10,58	6,71	21,23	40,83	22,77	2,76	4,00
Kepulauan Riau	4,93	1,58	5,42	56,85	18,00	2,23	22,48
Jambi	9,68	1,07	25,31	37,42	30,12	2,21	2,73
Sumatera Selatan	5,99	3,93	19,60	31,60	47,06	0,37	5,27
Bangka Belitung	2,27	7,21	18,29	47,87	29,73	1,40	5,44
Bengkulu	8,95	4,27	19,56	31,56	41,79	2,84	4,13
Lampung	3,56	3,51	22,86	24,93	50,41	1,72	4,05
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	3,05	2,35	36,36	34,42	34,43	3,65	2,16
Banten	3,04	0,89	35,20	20,70	48,23	4,26	3,25
Jawa Tengah	5,60	3,63	27,68	24,41	46,44	2,54	2,75
DI Yogyakarta	7,89	3,83	37,12	29,16	28,59	2,56	1,02
Jawa Timur	3,98	3,33	20,16	20,83	56,45	2,50	3,62
Bali	2,68	1,26	34,53	27,59	42,19	4,06	1,27
Nusa Tenggara Barat	3,90	0,34	22,29	33,87	46,72	2,47	1,23
Nusa Tenggara Timur	6,26	2,89	8,93	72,25	12,29	0,43	4,74
Kalimantan Barat	7,02	0,65	6,22	40,87	48,79	6,12	1,53
Kalimantan Tengah	9,72	0,00	10,83	62,97	23,83	1,15	5,01
Kalimantan Selatan	4,90	1,44	18,16	40,42	46,88	4,53	2,33
Kalimantan Timur	10,57	4,72	20,93	61,38	12,11	0,00	1,41
Sulawesi Utara	10,39	3,04	37,58	34,63	23,46	0,25	1,99
Gorontalo	5,35	0,45	28,90	34,60	38,19	2,09	0,00
Sulawesi Tengah	7,58	2,78	12,81	44,95	38,34	4,25	3,13
Sulawesi Selatan	10,32	0,95	14,51	55,71	22,57	3,36	3,45
Sulawesi Barat	6,36	0,00	16,07	54,35	27,26	3,00	3,83
Sulawesi Tenggara	3,51	0,86	10,93	57,20	26,67	2,67	4,98
Maluku	3,95	0,98	15,55	69,21	17,73	0,57	3,61
Maluku Utara	10,53	0,69	9,11	66,39	17,64	0,51	6,25
Papua	4,18	1,48	3,48	88,59	2,48	0,00	2,23
Papua Barat	36,15	5,63	15,27	51,33	1,63	0,00	2,48
INDONESIA	5,88	2,88	23,07	33,17	41,80	2,87	3,15

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.7.3
Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan
Tempat Berobat Jalan, 2011

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan						
	RS. Pemerin- tah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskes- mas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	19,42	1,48	18,36	44,37	32,45	4,16	2,43
Sumatera Utara	10,25	8,45	22,55	21,31	41,85	2,95	3,61
Sumatera Barat	11,11	5,02	21,03	32,53	36,86	6,66	2,96
R i a u	14,49	12,82	23,30	33,05	19,63	2,50	2,40
Kepulauan Riau	4,94	4,31	20,93	45,64	23,20	1,84	7,74
J a m b i	12,19	1,56	27,26	34,94	23,81	1,60	5,95
Sumatera Selatan	8,34	4,17	27,59	28,04	37,69	0,26	6,52
Bangka Belitung	9,23	7,48	24,67	42,56	22,78	0,79	3,68
Bengkulu	11,40	2,92	24,92	32,07	36,88	3,46	3,98
Lampung	3,36	4,41	27,68	25,10	44,70	1,92	3,19
DKI Jakarta	15,44	10,82	45,28	27,04	1,59	1,30	4,50
Jawa Barat	7,65	4,67	40,62	33,26	24,63	2,94	2,53
Banten	5,00	4,47	44,14	20,21	28,27	6,14	5,10
Jawa Tengah	7,42	3,92	32,22	26,60	35,24	2,88	2,17
DI Yogyakarta	11,96	12,53	36,74	25,58	19,37	3,24	2,02
Jawa Timur	7,41	3,86	26,75	22,89	43,79	2,94	2,89
B a l i	5,76	0,89	40,15	24,92	36,35	3,90	0,70
Nusa Tenggara Barat	5,41	0,56	26,18	34,22	41,36	3,08	1,29
Nusa Tenggara Timur	7,13	3,07	12,37	68,88	11,79	0,38	4,52
Kalimantan Barat	8,38	2,14	12,92	36,51	44,55	5,66	2,58
Kalimantan Tengah	9,80	1,87	20,13	53,77	24,07	1,68	4,22
Kalimantan Selatan	8,34	2,01	19,77	41,30	37,77	4,87	2,69
Kalimantan Timur	19,35	3,61	27,50	46,59	9,79	0,74	1,39
Sulawesi Utara	14,38	4,78	42,32	28,69	17,43	0,16	2,41
Gorontalo	5,74	0,70	34,97	34,07	33,05	2,35	0,76
Sulawesi Tengah	8,95	3,09	17,09	41,75	31,75	4,05	4,14
Sulawesi Selatan	14,01	2,20	18,58	51,11	18,86	2,36	2,74
Sulawesi Barat	12,07	0,00	17,91	42,86	29,46	2,93	2,85
Sulawesi Tenggara	6,71	5,53	16,59	51,56	24,18	3,16	7,81
Maluku	6,20	1,56	23,98	59,20	13,98	5,50	2,23
Maluku Utara	11,12	1,33	20,10	54,97	16,20	0,38	7,97
Papua	14,22	3,02	8,59	74,53	1,90	0,00	2,27
Papua Barat	35,59	7,44	20,67	34,77	4,02	1,93	9,25
INDONESIA	8,71	4,39	30,22	30,89	32,07	2,96	2,90

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.1
TPAK Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	40,19	38,19	38,73
Sumatera Utara	41,95	58,59	50,48
Sumatera Barat	39,15	41,77	40,79
Riau	32,83	55,17	46,57
Kep. Riau	39,58	34,67	38,75
Jambi	43,82	50,75	48,58
Sumatera Selatan	43,90	54,77	50,91
Kep. Bangka Belitung	35,50	45,64	40,71
Bengkulu	39,46	58,09	52,26
Lampung	42,90	52,01	49,77
DKI Jakarta	37,00	-	37,00
Jawa Barat	34,33	44,97	38,10
Banten	46,42	46,68	46,51
Jawa Tengah	45,51	53,51	49,93
DI Yogyakarta	44,38	50,21	46,36
Jawa Timur	44,98	54,90	50,23
Bali	48,50	58,75	52,69
Nusa Tenggara Barat	47,74	50,90	49,55
Nusa Tenggara Timur	29,64	56,38	51,55
Kalimantan Barat	33,30	60,27	52,04
Kalimantan Tengah	38,89	63,89	55,86
Kalimantan Selatan	46,90	52,67	50,37
Kalimantan Timur	44,57	56,84	49,24
Sulawesi Utara	43,03	52,77	48,38
Gorontalo	44,09	48,03	46,66
Sulawesi Tengah	37,61	62,11	56,34
Sulawesi Selatan	35,09	47,35	43,01
Sulawesi Barat	50,33	55,74	54,59
Sulawesi Tenggara	30,78	63,57	54,64
Maluku	45,79	65,86	58,16
Maluku Utara	34,92	51,45	46,79
Papua	48,73	62,34	58,78
Papua Barat	36,26	60,90	53,86
INDONESIA	41,28	52,55	47,07

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 6.2.1
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan
Lapangan Usaha, 2011

Provinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa**)	Perkotaan
				Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	28,87	13,17	57,95	100,00
Sumatera Utara	27,45	12,82	59,72	100,00
Sumatera Barat	43,42	12,58	44,00	100,00
Riau	22,18	12,67	65,16	100,00
Kep. Riau	22,28	14,41	63,31	100,00
Jambi	32,26	15,34	52,40	100,00
Sumatera Selatan	19,94	12,73	67,33	100,00
Kep. Bangka Belitung	19,88	18,88	61,24	100,00
Bengkulu	25,17	22,56	52,26	100,00
Lampung	27,70	11,49	60,81	100,00
DKI Jakarta	0,93	9,51	89,56	100,00
Jawa Barat	35,21	14,42	50,37	100,00
Banten	24,31	20,97	54,73	100,00
Jawa Tengah	38,43	17,60	43,97	100,00
DI Yogyakarta	44,83	14,55	40,62	100,00
Jawa Timur	39,62	12,39	47,99	100,00
Bali	41,24	21,98	36,79	100,00
Nusa Tenggara Barat	53,77	9,99	36,24	100,00
Nusa Tenggara Timur	40,67	11,59	47,73	100,00
Kalimantan Barat	42,76	13,78	43,46	100,00
Kalimantan Tengah	27,46	17,62	54,92	100,00
Kalimantan Selatan	30,16	11,81	58,03	100,00
Kalimantan Timur	26,88	14,21	58,91	100,00
Sulawesi Utara	35,41	12,21	52,38	100,00
Gorontalo	23,22	21,25	55,53	100,00
Sulawesi Tengah	29,24	17,59	53,18	100,00
Sulawesi Selatan	28,86	12,42	58,72	100,00
Sulawesi Barat	57,49	5,95	36,56	100,00
Sulawesi Tenggara	25,20	10,85	63,95	100,00
Maluku	31,55	11,84	56,61	100,00
Maluku Utara	34,35	10,99	54,66	100,00
Papua	22,45	8,34	69,21	100,00
Papua Barat	11,49	16,72	71,79	100,00
INDONESIA	34,52	14,42	51,06	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Catatan :

*) : Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian

Listrik, Gas, Air minum, dan Konstruksi

**) : Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi

Keuangan, Jasa-jasa, lainnya

Tabel 6.2.2
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan
Lapangan Usaha, 2011

Provinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa**)	Perdesaan
				Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	80,34	6,41	13,25	100,00
Sumatera Utara	85,08	2,85	12,07	100,00
Sumatera Barat	73,22	8,02	18,76	100,00
Riau	81,83	5,17	13,00	100,00
Kep. Riau	84,24	1,75	14,02	100,00
Jambi	84,02	3,77	12,20	100,00
Sumatera Selatan	85,54	3,39	11,07	100,00
Kep. Bangka Belitung	53,89	26,66	19,45	100,00
Bengkulu	87,16	4,43	8,41	100,00
Lampung	80,48	7,78	11,74	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	73,27	10,50	16,24	100,00
Banten	64,04	7,15	28,81	100,00
Jawa Tengah	79,23	9,31	11,46	100,00
DI Yogyakarta	82,13	10,46	7,40	100,00
Jawa Timur	81,26	5,94	12,80	100,00
Bali	75,35	11,45	13,20	100,00
Nusa Tenggara Barat	68,65	11,56	19,80	100,00
Nusa Tenggara Timur	88,90	7,37	3,73	100,00
Kalimantan Barat	87,21	6,21	6,58	100,00
Kalimantan Tengah	89,53	2,40	8,07	100,00
Kalimantan Selatan	76,64	4,51	18,85	100,00
Kalimantan Timur	78,59	3,05	18,37	100,00
Sulawesi Utara	71,08	6,89	22,03	100,00
Gorontalo	71,34	19,23	9,43	100,00
Sulawesi Tengah	81,17	7,98	10,85	100,00
Sulawesi Selatan	80,22	5,42	14,36	100,00
Sulawesi Barat	86,57	3,49	9,94	100,00
Sulawesi Tenggara	78,80	7,42	13,78	100,00
Maluku	86,10	6,08	7,82	100,00
Maluku Utara	89,17	5,04	5,79	100,00
Papua	85,61	2,28	12,11	100,00
Papua Barat	78,50	2,12	19,38	100,00
INDONESIA	79,82	7,31	12,87	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Catatan :

*) : Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian

Listrik, Gas, Air minum, dan Konstruksi

**) : Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi
Keuangan, Jasa-jasa, lainnya

Tabel 6.2.3
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan
Lapangan Usaha, 2011

Provinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa**)	Perkotaan + Perdesaan
				(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh	65,72	8,33	25,95	100,00
Sumatera Utara	62,60	6,74	30,66	100,00
Sumatera Barat	63,72	9,47	26,81	100,00
Riau	66,01	7,16	26,83	100,00
Kep. Riau	31,62	12,50	55,88	100,00
Jambi	69,45	7,03	23,52	100,00
Sumatera Selatan	67,18	6,00	26,82	100,00
Kep. Bangka Belitung	39,53	23,38	37,10	100,00
Bengkulu	72,53	8,71	18,76	100,00
Lampung	70,56	8,47	20,97	100,00
DKI Jakarta	0,93	9,51	89,56	100,00
Jawa Barat	51,28	12,76	35,96	100,00
Banten	40,78	15,24	43,98	100,00
Jawa Tengah	62,73	12,67	24,61	100,00
DI Yogyakarta	58,55	13,05	28,40	100,00
Jawa Timur	63,73	8,66	27,62	100,00
Bali	56,80	17,17	26,03	100,00
Nusa Tenggara Barat	62,63	10,92	26,44	100,00
Nusa Tenggara Timur	83,96	7,80	8,24	100,00
Kalimantan Barat	78,73	7,65	13,62	100,00
Kalimantan Tengah	75,64	5,81	18,55	100,00
Kalimantan Selatan	59,11	7,26	33,63	100,00
Kalimantan Timur	49,84	9,25	40,90	100,00
Sulawesi Utara	57,07	8,98	33,95	100,00
Gorontalo	56,00	19,87	24,12	100,00
Sulawesi Tengah	73,75	9,36	16,90	100,00
Sulawesi Selatan	65,52	7,43	27,06	100,00
Sulawesi Barat	80,90	3,97	15,13	100,00
Sulawesi Tenggara	70,58	7,94	21,48	100,00
Maluku	69,96	7,78	22,26	100,00
Maluku Utara	77,64	6,29	16,07	100,00
Papua	72,16	3,57	24,27	100,00
Papua Barat	65,62	4,93	29,45	100,00
INDONESIA	60,92	10,28	28,80	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Catatan :

*) : Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian
Listrik, Gas, Air minum, dan Konstruksi

**) : Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi
Keuangan, Jasa-jasa, lainnya

Tabel 6.3.1
Percentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan
Status Pekerjaan, 2011

Provinsi	Berusaha Sendiri	Berusaha dengan Buruh	Buruh/Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja tidak Dibayar	Perkotaan
						(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	32,79	30,67	24,43	4,23	7,89	100,00
Sumatera Utara	31,45	30,05	20,02	5,00	13,48	100,00
Sumatera Barat	33,04	36,42	10,55	7,82	12,16	100,00
Riau	28,61	36,47	26,88	2,01	6,03	100,00
Kep. Riau	51,32	18,77	20,69	4,32	4,90	100,00
Jambi	29,29	29,82	20,84	13,55	6,49	100,00
Sumatera Selatan	28,20	26,51	33,49	2,40	9,41	100,00
Kep. Bangka Belitung	35,17	12,42	38,88	4,06	9,47	100,00
Bengkulu	31,80	30,89	17,03	8,32	11,96	100,00
Lampung	35,73	40,35	8,80	6,28	8,84	100,00
DKI Jakarta	32,44	28,42	29,93	3,02	6,19	100,00
Jawa Barat	28,91	33,28	14,55	11,43	11,83	100,00
Banten	26,51	26,93	28,50	5,83	12,24	100,00
Jawa Tengah	28,98	37,10	10,69	10,25	12,99	100,00
DI Yogyakarta	20,97	49,13	10,87	5,20	13,82	100,00
Jawa Timur	32,48	30,74	12,01	12,25	12,53	100,00
Bali	25,59	36,31	15,02	6,75	16,33	100,00
Nusa Tenggara Barat	33,54	36,67	6,11	15,82	7,86	100,00
Nusa Tenggara Timur	31,98	37,86	13,31	9,62	7,23	100,00
Kalimantan Barat	27,23	42,56	20,34	0,45	9,42	100,00
Kalimantan Tengah	34,98	32,85	15,39	1,90	14,87	100,00
Kalimantan Selatan	35,92	27,65	15,13	5,52	15,78	100,00
Kalimantan Timur	26,89	30,35	22,40	8,30	12,07	100,00
Sulawesi Utara	36,58	28,21	19,17	5,63	10,41	100,00
Gorontalo	40,73	37,21	16,15	3,61	2,30	100,00
Sulawesi Tengah	40,62	35,46	10,70	7,86	5,36	100,00
Sulawesi Selatan	21,86	47,21	22,35	2,21	6,37	100,00
Sulawesi Barat	35,65	47,17	5,38		11,80	100,00
Sulawesi Tenggara	44,23	29,96	12,79	5,61	7,40	100,00
Maluku	35,34	29,29	22,06	3,65	9,67	100,00
Maluku Utara	26,34	48,32	10,32	4,40	10,62	100,00
Papua	54,68	14,71	23,54		7,07	100,00
Papua Barat	41,02	22,17	22,87	7,66	6,27	100,00
INDONESIA	30,20	33,68	15,30	9,10	11,72	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 6.3.2
Percentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan
Status Pekerjaan, 2011

Provinsi	Berusaha Sendiri	Berusaha dengan Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja tidak Dibayar	Perdesaan
						(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	27,74	49,39	6,70	6,65	9,52	100,00
Sumatera Utara	32,25	45,78	3,45	4,62	13,91	100,00
Sumatera Barat	33,38	40,83	4,67	8,18	12,94	100,00
Riau	34,05	39,37	5,03	9,35	12,20	100,00
Kep. Riau	70,44	15,40	5,83	4,61	3,72	100,00
Jambi	25,21	50,66	9,54	5,25	9,34	100,00
Sumatera Selatan	20,76	49,78	8,04	4,87	16,54	100,00
Kep. Bangka Belitung	30,43	35,84	15,94	7,41	10,38	100,00
Bengkulu	20,94	43,66	6,72	7,49	21,19	100,00
Lampung	22,95	51,51	6,70	6,19	12,65	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	18,96	40,90	4,66	22,71	12,76	100,00
Banten	28,67	45,48	6,12	10,95	8,78	100,00
Jawa Tengah	16,21	49,55	2,69	11,97	19,57	100,00
DI Yogyakarta	10,63	61,95	2,17	2,95	22,31	100,00
Jawa Timur	16,03	46,32	3,33	13,89	20,42	100,00
Bali	18,69	49,11	4,72	3,77	23,71	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,66	57,02	2,49	9,05	10,79	100,00
Nusa Tenggara Timur	17,40	59,66	1,53	1,22	20,20	100,00
Kalimantan Barat	22,15	48,77	5,13	1,89	22,06	100,00
Kalimantan Tengah	26,84	48,11	5,04	2,22	17,79	100,00
Kalimantan Selatan	28,12	51,01	2,54	6,93	11,40	100,00
Kalimantan Timur	36,12	43,32	6,66	2,70	11,21	100,00
Sulawesi Utara	34,75	32,51	6,93	10,57	15,24	100,00
Gorontalo	29,82	48,00	4,98	9,64	7,57	100,00
Sulawesi Tengah	19,94	54,84	1,72	4,20	19,30	100,00
Sulawesi Selatan	18,96	59,42	2,64	2,99	15,98	100,00
Sulawesi Barat	19,88	60,92	2,21	0,75	16,24	100,00
Sulawesi Tenggara	24,93	57,07	2,59	2,04	13,37	100,00
Maluku	28,76	45,64	2,09	0,18	23,34	100,00
Maluku Utara	25,92	45,41	2,50	4,47	21,70	100,00
Papua	34,03	47,74	6,48	1,74	10,02	100,00
Papua Barat	23,28	58,82	5,74	2,18	9,98	100,00
INDONESIA	20,36	48,37	3,95	10,19	17,13	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 6.3.3
Percentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan
Status Pekerjaan, 2011

Provinsi	Berusaha Sendiri	Berusaha dengan Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Perkotaan + Perdesaan	
					(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Jumlah
Aceh	29,17	44,07	11,74	5,96	9,06	100,00
Sumatera Utara	31,93	39,65	9,91	4,77	13,74	100,00
Sumatera Barat	33,27	39,42	6,55	8,06	12,69	100,00
Riau	32,61	38,60	10,82	7,40	10,57	100,00
Kep. Riau	54,20	18,27	18,45	4,36	4,72	100,00
Jambi	26,36	44,79	12,72	7,59	8,54	100,00
Sumatera Selatan	22,84	43,27	15,16	4,18	14,54	100,00
Kep. Bangka Belitung	32,43	25,95	25,63	6,00	10,00	100,00
Bengkulu	23,50	40,65	9,15	7,69	19,02	100,00
Lampung	25,35	49,41	7,09	6,21	11,93	100,00
DKI Jakarta	32,44	28,42	29,93	3,02	6,19	100,00
Jawa Barat	24,71	36,50	10,37	16,20	12,22	100,00
Banten	27,41	34,62	19,22	7,95	10,81	100,00
Jawa Tengah	21,38	44,52	5,93	11,27	16,91	100,00
DI Yogyakarta	17,16	53,85	7,67	4,37	16,94	100,00
Jawa Timur	22,96	39,76	6,98	13,20	17,10	100,00
Bali	22,44	42,15	10,32	5,39	19,70	100,00
Nusa Tenggara Barat	25,87	48,80	3,95	11,78	9,60	100,00
Nusa Tenggara Timur	18,89	57,42	2,73	2,08	18,87	100,00
Kalimantan Barat	23,12	47,59	8,03	1,61	19,65	100,00
Kalimantan Tengah	28,66	44,70	7,35	2,15	17,14	100,00
Kalimantan Selatan	31,06	42,20	7,29	6,40	13,05	100,00
Kalimantan Timur	30,99	36,11	15,41	5,81	11,68	100,00
Sulawesi Utara	35,47	30,82	11,74	8,63	13,35	100,00
Gorontalo	33,29	44,56	8,54	7,72	5,89	100,00
Sulawesi Tengah	22,89	52,07	3,00	4,72	17,31	100,00
Sulawesi Selatan	19,79	55,93	8,29	2,77	13,23	100,00
Sulawesi Barat	22,95	58,24	2,83	0,61	15,37	100,00
Sulawesi Tenggara	27,89	52,91	4,16	2,59	12,46	100,00
Maluku	30,70	40,80	8,00	1,20	19,29	100,00
Maluku Utara	26,01	46,02	4,14	4,45	19,37	100,00
Papua	38,42	40,71	10,11	1,37	9,39	100,00
Papua Barat	26,69	51,77	9,03	3,24	9,27	100,00
INDONESIA	24,46	42,24	8,68	9,74	14,87	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 6.4.1
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin
dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir, 2011

Provinsi	Perkotaan								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	14,58	30,24	55,17	20,54	35,08	35,08	16,70	35,27	48,03
Sumatera Utara	7,58	20,10	72,31	11,22	46,85	46,85	9,04	28,84	62,12
Sumatera Barat	21,84	27,93	50,23	22,25	55,50	55,50	22,00	25,77	52,23
Riau	4,82	19,19	75,98	17,02	60,97	60,97	7,69	19,86	72,45
Kep. Riau	14,89	17,60	67,51	23,68	47,17	47,17	17,22	20,66	62,12
Jambi	6,72	21,36	71,92	9,76	61,78	61,78	7,69	23,63	68,68
Sumatera Selatan	8,89	19,60	71,51	22,58	55,11	55,11	13,74	20,56	65,70
Kep. Bangka Belitung	4,68	26,54	68,79	5,45	52,35	52,35	4,94	31,82	63,24
Bengkulu	15,28	31,35	53,37	22,96	56,78	56,78	16,90	29,02	54,08
Lampung	10,96	30,63	58,41	15,80	37,17	37,17	11,75	33,32	54,93
DKI Jakarta	8,16	13,94	77,90	12,99	66,94	66,94	9,84	16,06	74,10
Jawa Barat	9,55	29,56	60,88	14,67	47,46	47,46	11,24	32,30	56,46
Banten	10,92	27,10	61,98	19,82	41,66	41,66	13,03	29,81	57,16
Jawa Tengah	13,09	31,56	55,35	18,43	46,83	46,83	15,25	32,85	51,89
DI Yogyakarta	19,26	40,36	40,38	22,69	44,27	44,27	20,86	36,94	42,20
Jawa Timur	10,40	34,20	55,40	19,61	45,33	45,33	14,07	34,54	51,39
Bali	8,91	39,35	51,74	10,38	53,94	53,94	9,56	37,74	52,71
Nusa Tenggara Barat	13,65	48,79	37,55	31,92	36,49	36,49	21,09	41,79	37,12
Nusa Tenggara Timur	27,14	16,88	55,98	25,49	39,76	39,76	26,77	20,83	52,40
Kalimantan Barat	18,15	23,61	58,24	19,55	39,06	39,06	18,51	28,22	53,27
Kalimantan Tengah	5,20	21,76	73,04	12,14	73,20	73,20	7,36	19,55	73,09
Kalimantan Selatan	17,50	23,58	58,92	25,18	44,62	44,62	20,79	26,41	52,80
Kalimantan Timur	12,10	16,91	70,99	17,13	56,66	56,66	13,33	19,17	67,50
Sulawesi Utara	13,18	32,52	54,30	25,79	45,66	45,66	17,54	31,15	51,31
Gorontalo	27,54	21,76	50,70	7,52	65,58	65,58	20,36	23,60	56,04
Sulawesi Tengah	16,99	25,20	57,81	10,88	52,41	52,41	15,53	27,95	56,52
Sulawesi Selatan	15,32	21,20	63,48	22,84	57,42	57,42	17,55	20,77	61,68
Sulawesi Barat	22,33	27,22	50,44	35,38	44,60	44,60	26,83	24,74	48,43
Sulawesi Tenggara	18,20	32,33	49,47	25,22	62,57	62,57	20,66	25,29	54,05
Maluku	14,19	18,83	66,98	15,46	43,50	43,50	14,61	26,17	59,22
Maluku Utara	15,63	19,80	64,57	9,14	50,23	50,23	13,72	25,93	60,35
Papua	8,73	18,22	73,05		73,39	73,39	6,56	20,31	73,13
Papua Barat	12,07	22,74	65,19	43,01	46,80	46,80	19,00	19,93	61,07
INDONESIA	11,49	29,55	58,96	18,02	47,95	47,95	13,88	31,20	54,92

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 6.4.2
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin
dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir, 2011

Provinsi	Perdesaan								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	16,05	47,06	36,89	28,81	47,83	23,36	20,10	47,30	32,60
Sumatera Utara	15,97	45,84	38,19	16,79	58,27	24,94	16,39	52,15	31,47
Sumatera Barat	20,01	44,33	35,66	32,40	44,74	22,86	24,44	44,48	31,09
Riau	19,46	47,92	32,62	33,73	42,00	24,27	23,77	46,13	30,10
Kep. Riau	11,37	40,31	48,32	23,68	55,26	21,05	12,79	42,05	45,16
Jambi	12,19	56,03	31,79	16,75	61,87	21,38	13,48	57,68	28,85
Sumatera Selatan	8,77	53,92	37,31	22,50	49,62	27,88	13,82	52,34	33,84
Kep. Bangka Belitung	6,02	39,16	54,83	18,29	44,08	37,63	10,13	40,81	49,06
Bengkulu	19,05	36,64	44,30	20,11	48,99	30,90	19,48	41,67	38,85
Lampung	15,29	41,91	42,81	22,98	46,40	30,62	17,52	43,21	39,27
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	15,69	45,21	39,10	21,12	53,03	25,86	17,29	47,52	35,19
Banten	16,39	26,56	57,06	34,18	47,69	18,13	22,80	34,17	43,02
Jawa Tengah	14,16	46,92	38,92	22,35	49,43	28,22	17,41	47,92	34,67
DI Yogyakarta	14,08	55,88	30,05	25,29	51,99	22,72	18,57	54,32	27,11
Jawa Timur	13,08	51,01	35,91	24,61	50,55	24,84	17,53	50,83	31,63
Bali	10,27	47,33	42,40	25,38	46,34	28,28	16,55	46,92	36,53
Nusa Tenggara Barat	16,31	42,44	41,25	30,49	28,32	41,19	21,03	37,74	41,23
Nusa Tenggara Timur	13,41	50,50	36,09	26,98	52,98	20,05	18,71	51,47	29,82
Kalimantan Barat	11,98	55,49	32,52	21,91	53,52	24,57	16,19	54,66	29,16
Kalimantan Tengah	9,47	41,14	49,39	15,57	52,30	32,13	11,48	44,83	43,69
Kalimantan Selatan	15,12	51,61	33,27	29,68	47,73	22,60	21,20	49,99	28,81
Kalimantan Timur	9,35	40,79	49,85	8,99	39,50	51,51	9,26	40,46	50,28
Sulawesi Utara	14,10	38,28	47,62	22,57	44,54	32,89	17,13	40,51	42,36
Gorontalo	17,59	31,91	50,50	27,80	44,44	27,76	20,78	35,83	43,39
Sulawesi Tengah	24,24	43,16	32,60	31,42	51,69	16,89	26,91	46,33	26,76
Sulawesi Selatan	25,05	46,56	28,38	33,19	43,85	22,96	27,81	45,64	26,54
Sulawesi Barat	38,44	41,79	19,77	44,73	38,25	17,02	40,63	40,56	18,81
Sulawesi Tenggara	18,53	42,81	38,66	31,73	41,09	27,18	23,84	42,12	34,04
Maluku	12,64	47,17	40,19	19,72	49,71	30,57	15,21	48,09	36,69
Maluku Utara	13,02	45,47	41,50	26,15	49,20	24,65	17,99	46,88	35,12
Papua	5,36	32,47	62,17	14,18	43,79	42,04	7,66	35,42	56,92
Papua Barat	9,77	32,03	58,20	10,85	55,30	33,85	10,02	37,40	52,57
INDONESIA	14,88	47,07	38,05	24,20	49,66	26,14	18,34	48,03	33,63

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 6.4.3
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin
dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir, 2011

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+	0-14	15-34	35+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	15,65	42,48	41,87	26,26	46,76	26,97	19,13	43,88	36,98
Sumatera Utara	12,30	34,57	53,13	14,92	52,79	32,28	13,52	43,06	43,42
Sumatera Barat	20,58	39,23	40,19	29,03	37,26	33,71	23,66	38,51	37,83
Riau	15,31	39,78	44,90	30,06	37,61	32,33	19,51	39,17	41,33
Kep. Riau	14,27	21,59	64,14	23,68	31,04	45,28	16,55	23,88	59,57
Jambi	10,70	46,63	42,66	14,60	51,60	33,79	11,85	48,09	40,07
Sumatera Selatan	8,80	44,17	47,03	22,52	42,18	35,30	13,80	43,44	42,76
Kep. Bangka Belitung	5,45	33,84	60,71	12,85	43,29	43,86	7,94	37,01	55,05
Bengkulu	17,95	35,10	46,95	20,50	45,04	34,46	18,87	38,69	42,44
Lampung	14,36	39,49	46,15	22,15	46,47	31,38	16,44	41,35	42,21
DKI Jakarta	8,16	13,94	77,90	12,99	20,06	66,94	9,84	16,06	74,10
Jawa Barat	12,22	36,36	51,42	17,22	43,86	38,92	13,80	38,72	47,48
Banten	12,96	26,90	60,15	27,26	43,27	29,47	17,08	31,62	51,30
Jawa Tengah	13,73	40,76	45,51	20,74	43,41	35,84	16,54	41,82	41,64
DI Yogyakarta	17,21	46,50	36,29	23,55	39,35	37,10	20,02	43,34	36,65
Jawa Timur	11,96	44,01	44,03	22,47	43,92	33,62	16,08	43,97	39,95
Bali	9,54	43,08	47,38	17,01	40,39	42,59	12,75	41,93	45,33
Nusa Tenggara Barat	15,31	44,83	39,86	31,14	29,80	39,06	21,05	39,38	39,57
Nusa Tenggara Timur	15,16	46,22	38,62	26,89	51,87	21,24	19,54	48,33	32,13
Kalimantan Barat	13,42	48,08	38,50	21,62	51,99	26,40	16,63	49,61	33,76
Kalimantan Tengah	8,49	36,70	54,81	14,84	44,27	40,89	10,56	39,17	50,27
Kalimantan Selatan	16,01	41,15	42,84	27,95	41,02	31,03	21,05	41,10	37,85
Kalimantan Timur	10,90	27,40	61,71	13,40	32,31	54,30	11,52	28,62	59,85
Sulawesi Utara	13,74	35,99	50,27	23,81	38,38	37,81	17,29	36,83	45,88
Gorontalo	20,61	28,83	50,56	20,72	38,32	40,96	20,65	31,93	47,42
Sulawesi Tengah	23,02	40,14	36,84	29,43	50,25	20,32	25,28	43,71	31,01
Sulawesi Selatan	22,14	38,97	38,89	30,51	37,60	31,89	24,87	38,52	36,60
Sulawesi Barat	35,28	38,94	25,78	42,92	34,73	22,35	37,94	37,47	24,59
Sulawesi Tenggara	18,48	41,08	40,44	30,84	37,15	32,00	23,35	39,53	37,11
Maluku	13,12	38,48	48,40	18,54	47,31	34,14	15,04	41,60	43,36
Maluku Utara	13,63	39,51	46,86	23,23	47,73	29,04	17,09	42,48	40,43
Papua	6,08	29,40	64,52	11,27	40,26	48,47	7,42	32,20	60,37
Papua Barat	10,22	30,23	59,55	16,88	46,84	36,28	11,75	34,05	54,21
INDONESIA	13,46	39,73	46,81	21,64	43,19	35,17	16,48	41,01	42,51

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING (SAMPLING ERROR ESTIMATES)

ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING

(*SAMPLING ERROR ESTIMATES*)

Estimasi sampel Susenas 2011 dipengaruhi oleh dua jenis *error* (kesalahan) yaitu *non-sampling error* dan *sampling error*. *Non-sampling error* adalah kesalahan yang terjadi dalam pengumpulan maupun pengolahan data, seperti kesalahan dalam menemukan dan mewawancarai responden dalam rumah tangga terpilih, kesalahan petugas maupun responden dalam menginterpretasikan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner dan kesalahan dalam proses entri data.

Sampling error adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* ditunjukkan oleh besarnya angka *standard error* (galat baku) dari suatu angka estimasi, rata-rata, persentase suatu variabel yang disajikan dari hasil Susenas 2009. Untuk mengukur presisi dari suatu angka tersebut digunakan *relative standard error* (kesalahan relatif), yaitu rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%). *Standard error* dapat digunakan untuk menghitung selang kepercayaan yang dapat digunakan untuk melihat selang dari angka sebenarnya yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*.

Penghitungan *sampling error* pada variabel Susenas 2011 menggunakan *software SPSS* versi 13.0. Variabel yang dihitung *sampling error*-nya dalam publikasi ini antara lain meliputi pendidikan yang ditamatkan lansia, angka buta huruf, keluhan kesehatan, angka kesakitan, dan lansia bekerja.

Sampling error dalam publikasi ini disajikan dalam 20 tabel lampiran pada halaman berikut yang berisi 33 provinsi menurut tipe daerah (perkotaan dan perdesaan), dan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Tabel 9.1 sampai

tabel 9.20 menyajikan nilai-nilai estimasi dari masing-masing indikator, *standard error* (galat baku), selang kepercayaan, dan *relative standard error*.

http://www.bps.go.id

Tabel 9.1 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan + Perdesaan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error			
			Batas Bawah	Batas Atas				(4)	(5)				(16)	(17)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	12,36	1,72	8,98	15,73	13,92	22,52	1,38	19,82	25,23	6,12	19,66	1,12	17,47	21,85	5,68			
Sumatera Utara	8,00	0,84	6,36	9,65	10,49	13,94	1,00	11,97	15,90	7,19	11,02	0,70	9,66	12,38	6,31			
Sumatera Barat	5,83	0,95	3,96	7,70	16,34	10,68	0,84	9,04	12,32	7,85	8,80	0,66	7,51	10,09	7,50			
Riau	10,71	1,78	7,22	14,19	16,60	22,33	1,55	19,29	25,38	6,95	17,78	1,29	15,25	20,30	7,24			
Kepulauan Riau	12,10	2,42	7,36	16,84	19,99	25,48	5,69	14,33	36,62	22,32	14,56	2,36	9,94	19,18	16,19			
Jambi	12,24	1,83	8,65	15,84	14,96	25,95	1,92	22,18	29,71	7,40	21,74	1,55	18,70	24,78	7,13			
Sumatera Selatan	15,52	1,17	13,23	17,80	7,52	20,11	1,11	17,93	22,28	5,51	18,46	0,84	16,83	20,10	4,53			
Bangka Belitung	15,55	1,59	12,44	18,67	10,21	26,92	2,62	21,79	32,05	9,72	21,32	1,54	18,30	24,34	7,23			
Bengkulu	13,92	2,17	9,67	18,17	15,58	30,13	1,89	26,43	33,83	6,26	25,11	1,66	21,85	28,36	6,61			
Lampung	16,40	1,92	12,64	20,16	11,69	28,86	1,44	26,04	31,67	4,98	25,66	1,29	23,12	28,19	5,04			
DKI Jakarta	10,82	1,35	8,18	13,47	12,47	-	-	-	-	-	10,82	1,35	8,18	13,47	12,47			
Jawa Barat	17,17	1,28	14,67	19,68	7,44	24,63	1,67	21,37	27,90	6,76	19,73	1,01	17,76	21,71	5,11			
Banten	26,21	2,60	21,11	31,30	9,92	34,05	2,45	29,24	38,86	7,20	28,82	1,87	25,15	32,49	6,49			
Jawa Tengah	29,50	0,98	27,59	31,42	3,31	38,56	0,94	36,71	40,40	2,44	34,42	0,68	33,08	35,75	1,98			
DI Yogyakarta	27,82	1,71	24,48	31,16	6,13	45,89	2,85	40,30	51,49	6,21	33,92	1,77	30,45	37,40	5,23			
Jawa Timur	27,24	1,04	25,20	29,29	3,82	47,73	1,14	45,50	49,96	2,38	37,99	0,86	36,31	39,67	2,26			
Bali	32,86	1,87	29,20	36,52	5,68	45,25	2,39	40,57	49,93	5,27	37,80	1,51	34,84	40,76	4,00			
Nusa Tenggara Barat	50,33	2,50	45,44	55,23	4,96	56,52	3,44	49,78	63,26	6,08	53,94	2,28	49,48	58,40	4,22			
Nusa Tenggara Timur	16,51	2,23	12,14	20,87	13,49	36,38	1,62	33,19	39,56	4,46	32,61	1,45	29,77	35,46	4,45			
Kalimantan Barat	33,41	2,49	28,53	38,30	7,46	46,43	1,65	43,19	49,67	3,56	42,49	1,45	39,64	45,34	3,42			
Kalimantan Tengah	14,15	2,78	8,70	19,61	19,66	19,20	1,75	15,78	22,63	9,10	17,51	1,50	14,58	20,44	8,54			
Kalimantan Selatan	12,31	1,46	9,45	15,17	11,85	24,81	1,57	21,73	27,89	6,33	19,59	1,12	17,40	21,78	5,70			
Kalimantan Timur	16,15	1,58	13,05	19,24	9,79	28,92	2,26	24,48	33,35	7,82	21,02	1,35	18,36	23,67	6,44			
Sulawesi Utara	1,31	0,41	0,50	2,12	31,61	2,90	0,60	1,72	4,08	20,75	2,18	0,38	1,44	2,92	17,36			
Gorontalo	4,33	1,35	1,69	6,97	31,11	9,94	1,50	7,01	12,88	15,05	8,03	1,15	5,77	10,30	14,37			
Sulawesi Tengah	9,55	2,00	5,64	13,47	20,90	18,50	1,28	15,99	21,00	6,91	16,32	1,11	14,13	18,50	6,83			
Sulawesi Selatan	19,66	1,59	16,55	22,78	8,08	43,93	1,11	41,75	46,11	2,53	35,04	1,35	32,39	37,69	3,86			
Sulawesi Barat	22,11	3,69	14,87	29,34	16,69	37,17	3,35	30,61	43,74	9,01	33,61	2,89	27,94	39,28	8,60			
Sulawesi Tenggara	21,54	2,46	16,72	26,37	11,43	38,51	2,17	34,27	42,76	5,62	33,86	1,78	30,38	37,34	5,25			
Maluku	7,08	2,06	3,04	11,12	29,12	11,31	1,47	8,43	14,19	13,01	9,74	1,20	7,39	12,09	12,32			
Maluku Utara	8,86	1,98	4,97	12,75	22,38	24,29	1,67	21,01	27,56	6,88	20,11	1,48	17,21	23,01	7,35			
Papua	8,11	1,81	4,57	11,65	22,27	42,16	3,55	35,20	49,12	8,42	32,78	2,68	27,52	38,04	8,18			
Papua Barat	10,41	3,70	3,16	17,65	35,51	23,11	2,42	18,36	27,85	10,47	19,34	1,97	15,49	23,20	10,17			
INDONESIA	21,67	0,45	20,78	22,56	2,10	34,72	0,44	33,87	35,58	1,26	28,29	0,33	27,65	28,93	1,15			

Tabel 9.2 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki + Perempuan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error			
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	8,77	0,90	7,02	10,53	10,21	28,94	1,54	25,91	31,97	5,34	19,66	1,12	17,47	21,85	5,68			
Sumatera Utara	4,95	0,60	3,77	6,13	12,15	15,90	1,01	13,91	17,88	6,37	11,02	0,70	9,66	12,38	6,31			
Sumatera Barat	3,96	0,56	2,85	5,07	14,24	12,77	1,04	10,72	14,81	8,18	8,80	0,66	7,51	10,09	7,50			
Riau	8,46	1,06	6,38	10,54	12,52	28,14	2,21	23,81	32,46	7,84	17,78	1,29	15,25	20,30	7,24			
Kepulauan Riau	8,35	1,77	4,88	11,81	21,17	22,07	4,09	14,05	30,09	18,54	14,56	2,36	9,94	19,18	16,19			
Jambi	9,62	1,31	7,05	12,20	13,64	34,81	2,32	30,27	39,35	6,65	21,74	1,55	18,70	24,78	7,13			
Sumatera Selatan	8,31	1,03	6,30	10,32	12,36	27,89	1,18	25,58	30,20	4,22	18,46	0,84	16,83	20,10	4,53			
Bangka Belitung	10,05	1,72	6,67	13,42	17,15	31,40	2,01	27,47	35,34	6,39	21,32	1,54	18,30	24,34	7,23			
Bengkulu	11,86	1,55	8,82	14,90	13,09	37,49	2,42	32,74	42,24	6,47	25,11	1,66	21,85	28,36	6,61			
Lampung	13,43	1,16	11,16	15,71	8,63	38,05	1,78	34,57	41,54	4,67	25,66	1,29	23,12	28,19	5,04			
DKI Jakarta	3,04	0,85	1,37	4,72	28,10	17,93	2,01	13,98	21,88	11,23	10,82	1,35	8,18	13,47	12,47			
Jawa Barat	10,60	0,77	9,09	12,11	7,27	28,56	1,43	25,75	31,36	5,01	19,73	1,01	17,76	21,71	5,11			
Banten	16,27	1,80	12,75	19,79	11,05	40,92	2,49	36,04	45,80	6,09	28,82	1,87	25,15	32,49	6,49			
Jawa Tengah	18,63	0,67	17,31	19,95	3,62	47,91	0,85	46,25	49,57	1,77	34,42	0,68	33,08	35,75	1,98			
DI Yogyakarta	14,16	1,49	11,24	17,08	10,52	49,22	2,25	44,81	53,63	4,57	33,92	1,77	30,45	37,40	5,23			
Jawa Timur	20,86	0,83	19,23	22,49	3,98	51,53	1,02	49,53	53,53	1,98	37,99	0,86	36,31	39,67	2,26			
Bali	20,17	1,73	16,78	23,56	8,57	53,74	1,89	50,03	57,45	3,52	37,80	1,51	34,84	40,76	4,00			
Nusa Tenggara Barat	36,46	2,67	31,23	41,69	7,32	68,54	2,28	64,07	73,00	3,33	53,94	2,28	49,48	58,40	4,22			
Nusa Tenggara Timur	22,04	1,55	19,00	25,08	7,03	42,09	1,69	38,78	45,40	4,01	32,61	1,45	29,77	35,46	4,45			
Kalimantan Barat	26,40	1,64	23,19	29,62	6,21	59,37	1,81	55,81	62,92	3,05	42,49	1,45	39,64	45,34	3,42			
Kalimantan Tengah	9,59	1,44	6,76	12,42	15,04	26,76	2,36	22,14	31,38	8,80	17,51	1,50	14,58	20,44	8,54			
Kalimantan Selatan	9,49	1,11	7,31	11,66	11,69	27,13	1,62	23,95	30,31	5,98	19,59	1,12	17,40	21,78	5,70			
Kalimantan Timur	11,01	1,48	8,11	13,92	13,44	33,33	2,18	29,07	37,60	6,53	21,02	1,35	18,36	23,67	6,44			
Sulawesi Utara	1,73	0,45	0,84	2,62	26,25	2,59	0,49	1,62	3,56	19,07	2,18	0,38	1,44	2,92	17,36			
Gorontalo	4,44	1,08	2,33	6,55	24,24	11,12	1,89	7,41	14,83	17,00	8,03	1,15	5,77	10,30	14,37			
Sulawesi Tengah	8,77	1,09	6,63	10,91	12,44	23,75	1,80	20,23	27,27	7,56	16,32	1,11	14,13	18,50	6,83			
Sulawesi Selatan	22,28	1,28	19,78	24,79	5,74	44,71	1,68	41,42	47,99	3,75	35,04	1,35	32,39	37,69	3,86			
Sulawesi Barat	20,80	2,91	15,10	26,49	13,97	44,04	3,68	36,83	51,25	8,36	33,61	2,89	27,94	39,28	8,60			
Sulawesi Tenggara	19,69	1,67	16,42	22,96	8,47	47,67	2,44	42,89	52,45	5,11	33,86	1,78	30,38	37,34	5,25			
Maluku	6,24	1,36	3,57	8,90	21,79	13,00	1,66	9,75	16,26	12,78	9,74	1,20	7,39	12,09	12,32			
Maluku Utara	11,15	1,42	8,38	13,93	12,70	28,87	2,31	24,33	33,40	8,02	20,11	1,48	17,21	23,01	7,35			
Papua	30,43	3,00	24,56	36,30	9,84	36,06	3,73	28,75	43,37	10,34	32,78	2,68	27,52	38,04	8,18			
Papua Barat	12,32	2,02	8,35	16,28	16,41	28,22	3,17	22,00	34,44	11,24	19,34	1,97	15,49	23,20	10,17			
INDONESIA	15,31	0,29	14,75	15,88	1,88	39,68	0,42	38,85	40,51	1,07	28,29	0,33	27,65	28,93	1,15			

Tabel 9.3 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tidak/Belum Tamat Sekolah Dasar menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan + Perdesaan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error			
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	22,83	1,90	19,10	26,56	8,33	34,69	1,31	32,12	37,27	3,79	31,35	1,10	29,20	33,51	3,51			
Sumatera Utara	26,47	1,66	23,21	29,72	6,28	38,65	1,21	36,28	41,02	3,13	32,66	1,21	30,29	35,02	3,69			
Sumatera Barat	31,24	2,12	27,07	35,40	6,80	49,29	1,25	46,85	51,74	2,53	42,30	1,41	39,54	45,06	3,33			
Riau	23,12	2,93	17,37	28,86	12,68	45,50	1,95	41,68	49,32	4,29	36,73	1,91	32,98	40,47	5,20			
Kepulauan Riau	21,17	2,99	15,31	27,02	14,11	38,73	6,77	25,47	52,00	17,47	24,40	2,78	18,94	29,86	11,41			
Jambi	28,94	2,76	23,53	34,34	9,53	41,46	1,63	38,26	44,67	3,94	37,62	1,60	34,48	40,76	4,26			
Sumatera Selatan	25,08	2,44	20,29	29,87	9,74	46,54	1,21	44,18	48,91	2,60	38,86	1,55	35,83	41,89	3,98			
Bangka Belitung	31,10	2,27	26,65	35,56	7,31	46,18	3,01	40,27	52,08	6,53	38,75	2,05	34,73	42,76	5,29			
Bengkulu	28,05	3,27	21,63	34,47	11,67	44,25	1,75	40,81	47,68	3,96	39,23	1,66	35,98	42,48	4,23			
Lampung	28,48	2,40	23,77	33,20	8,44	42,80	1,37	40,11	45,49	3,20	39,12	1,29	36,60	41,64	3,29			
DKI Jakarta	15,75	1,30	13,21	18,29	8,23	-	-	-	-	-	15,75	1,30	13,21	18,29	8,23			
Jawa Barat	30,21	1,21	27,84	32,58	4,00	39,62	1,34	36,99	42,24	3,38	33,44	0,92	31,62	35,25	2,77			
Banten	30,06	2,23	25,68	34,43	7,43	43,53	2,54	38,55	48,50	5,83	34,55	1,76	31,10	38,00	5,10			
Jawa Tengah	28,95	1,03	26,93	30,96	3,55	36,70	0,83	35,07	38,34	2,27	33,16	0,66	31,86	34,45	1,99			
DI Yogyakarta	23,44	2,01	19,50	27,39	8,59	27,14	1,91	23,38	30,89	7,05	24,69	1,48	21,79	27,59	5,99			
Jawa Timur	27,84	1,05	25,79	29,89	3,76	31,52	0,76	30,04	33,01	2,41	29,77	0,65	28,49	31,05	2,19			
Bali	22,32	1,54	19,30	25,34	6,90	29,26	1,72	25,89	32,64	5,88	25,09	1,18	22,78	27,40	4,70			
Nusa Tenggara Barat	21,89	2,13	17,72	26,06	9,71	28,35	2,42	23,61	33,10	8,54	25,66	1,67	22,39	28,93	6,50			
Nusa Tenggara Timur	28,17	2,92	22,44	33,89	10,37	38,82	1,24	36,38	41,26	3,20	36,81	1,18	34,49	39,12	3,21			
Kalimantan Barat	25,43	2,15	21,20	29,65	8,47	34,53	1,59	31,41	37,64	4,60	31,77	1,32	29,19	34,35	4,15			
Kalimantan Tengah	28,27	2,60	23,17	33,37	9,20	35,10	1,66	31,86	38,35	4,72	32,81	1,43	30,01	35,62	4,37			
Kalimantan Selatan	35,43	1,99	31,54	39,33	5,61	47,66	1,61	44,51	50,80	3,37	42,55	1,30	40,00	45,11	3,06			
Kalimantan Timur	23,04	1,96	19,20	26,89	8,51	35,57	2,51	30,64	40,50	7,07	27,82	1,67	24,54	31,10	6,02			
Sulawesi Utara	25,94	1,85	22,32	29,56	7,12	44,10	1,87	40,43	47,78	4,25	35,88	1,51	32,92	38,84	4,21			
Gorontalo	30,99	3,48	24,16	37,82	11,24	50,01	2,95	44,23	55,80	5,90	43,53	2,35	38,92	48,14	5,41			
Sulawesi Tengah	19,66	3,13	13,52	25,81	15,93	37,89	1,87	34,23	41,56	4,93	33,45	1,78	29,95	36,95	5,33			
Sulawesi Selatan	22,31	1,64	19,09	25,52	7,36	31,97	0,98	30,05	33,90	3,07	28,43	1,04	26,39	30,47	3,66			
Sulawesi Barat	25,13	4,14	17,01	33,24	16,48	33,32	1,97	29,45	37,19	5,92	31,38	1,78	27,90	34,87	5,66			
Sulawesi Tenggara	26,00	3,26	19,61	32,39	12,54	35,05	2,06	31,00	39,10	5,89	32,57	1,80	29,05	36,09	5,52			
Maluku	23,15	2,78	17,70	28,60	12,01	37,05	1,79	33,55	40,55	4,82	31,88	1,76	28,43	35,33	5,52			
Maluku Utara	26,45	4,72	17,20	35,70	17,84	35,28	1,84	31,68	38,88	5,20	32,89	1,88	29,21	36,57	5,71			
Papua	14,08	2,67	8,84	19,31	18,97	22,44	2,38	17,77	27,11	10,61	20,14	1,91	16,38	23,89	9,51			
Papua Barat	18,27	4,78	8,90	27,64	26,17	29,61	2,98	23,76	35,46	10,08	26,25	2,55	21,24	31,26	9,73			
INDONESIA	27,19	0,44	26,33	28,05	1,62	36,79	0,33	36,15	37,44	0,90	32,06	0,28	31,50	32,61	0,88			

Tabel 9.4 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tidak/Belum Tamat Sekolah Dasar menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki + Perempuan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error			
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	28,08	1,39	25,35	30,81	4,96	34,14	1,42	31,35	36,93	4,16	31,35	1,10	29,20	33,51	3,51			
Sumatera Utara	24,87	1,57	21,79	27,96	6,33	38,91	1,34	36,28	41,55	3,45	32,66	1,21	30,29	35,02	3,69			
Sumatera Barat	38,30	1,73	34,91	41,70	4,53	45,58	1,58	42,47	48,68	3,48	42,30	1,41	39,54	45,06	3,33			
Riau	35,44	2,30	30,93	39,94	6,48	38,17	2,24	33,77	42,56	5,87	36,73	1,91	32,98	40,47	5,20			
Kepulauan Riau	22,09	3,36	15,50	28,67	15,21	27,20	3,80	19,74	34,65	13,98	24,40	2,78	18,94	29,86	11,41			
Jambi	38,16	1,93	34,37	41,94	5,06	37,04	2,22	32,68	41,39	6,00	37,62	1,60	34,48	40,76	4,26			
Sumatera Selatan	38,13	1,67	34,85	41,40	4,38	39,53	1,90	35,80	43,26	4,81	38,86	1,55	35,83	41,89	3,98			
Bangka Belitung	36,17	2,67	30,94	41,40	7,37	41,05	2,41	36,32	45,77	5,87	38,75	2,05	34,73	42,76	5,29			
Bengkulu	37,95	2,32	33,41	42,49	6,10	40,43	2,16	36,19	44,67	5,35	39,23	1,66	35,98	42,48	4,23			
Lampung	40,55	1,62	37,37	43,74	4,01	37,66	1,67	34,39	40,93	4,43	39,12	1,29	36,60	41,64	3,29			
DKI Jakarta	11,69	1,30	9,15	14,24	11,09	19,46	2,08	15,38	23,54	10,69	15,75	1,30	13,21	18,29	8,23			
Jawa Barat	31,83	1,16	29,55	34,12	3,66	34,99	1,12	32,78	37,19	3,21	33,44	0,92	31,62	35,25	2,77			
Banten	35,27	2,49	30,39	40,14	7,05	33,86	1,97	29,99	37,72	5,82	34,55	1,76	31,10	38,00	5,10			
Jawa Tengah	35,69	0,84	34,05	37,34	2,35	30,99	0,80	29,42	32,56	2,58	33,16	0,66	31,86	34,45	1,99			
DI Yogyakarta	28,08	2,11	23,94	32,22	7,52	22,07	1,65	18,83	25,31	7,49	24,69	1,48	21,79	27,59	5,99			
Jawa Timur	32,62	0,86	30,93	34,30	2,64	27,52	0,75	26,05	28,99	2,72	29,77	0,65	28,49	31,05	2,19			
Bali	27,75	1,45	24,90	30,60	5,24	22,69	1,58	19,59	25,79	6,97	25,09	1,18	22,78	27,40	4,70			
Nusa Tenggara Barat	32,96	2,18	28,68	37,23	6,62	19,56	1,83	15,97	23,16	9,38	25,66	1,67	22,39	28,93	6,50			
Nusa Tenggara Timur	38,49	1,38	35,79	41,19	3,57	35,30	1,48	32,40	38,19	4,19	36,81	1,18	34,49	39,12	3,21			
Kalimantan Barat	36,84	1,68	33,55	40,12	4,55	26,46	1,66	23,20	29,72	6,28	31,77	1,32	29,19	34,35	4,15			
Kalimantan Tengah	31,02	1,67	27,75	34,28	5,37	34,91	2,03	30,93	38,89	5,81	32,81	1,43	30,01	35,62	4,37			
Kalimantan Selatan	36,08	1,87	32,40	39,75	5,19	47,39	1,77	43,91	50,86	3,74	42,55	1,30	40,00	45,11	3,06			
Kalimantan Timur	27,85	1,86	24,20	31,51	6,69	27,78	2,30	23,27	32,28	8,27	27,82	1,67	24,54	31,10	6,02			
Sulawesi Utara	30,52	1,72	27,16	33,88	5,62	40,72	1,83	37,14	44,31	4,49	35,88	1,51	32,92	38,84	4,21			
Gorontalo	43,62	3,19	37,36	49,88	7,32	43,46	2,77	38,02	48,89	6,38	43,53	2,35	38,92	48,14	5,41			
Sulawesi Tengah	31,65	2,03	27,67	35,63	6,42	35,23	2,23	30,86	39,59	6,32	33,45	1,78	29,95	36,95	5,33			
Sulawesi Selatan	30,76	1,44	27,93	33,59	4,69	26,67	1,19	24,33	29,00	4,47	28,43	1,04	26,39	30,47	3,66			
Sulawesi Barat	34,46	2,35	29,86	39,05	6,81	28,89	2,88	23,25	34,52	9,96	31,38	1,78	27,90	34,87	5,66			
Sulawesi Tenggara	32,36	2,04	28,36	36,35	6,30	32,78	2,31	28,25	37,31	7,05	32,57	1,80	29,05	36,09	5,52			
Maluku	29,89	2,03	25,92	33,87	6,78	33,73	2,24	29,34	38,13	6,65	31,88	1,76	28,43	35,33	5,52			
Maluku Utara	30,77	2,24	26,39	35,15	7,27	34,96	2,59	29,89	40,04	7,41	32,89	1,88	29,21	36,57	5,71			
Papua	17,20	2,17	12,95	21,46	12,62	24,23	2,98	18,40	30,07	12,28	20,14	1,91	16,38	23,89	9,51			
Papua Barat	21,43	3,18	15,20	27,67	14,84	32,34	3,60	25,28	39,39	11,13	26,25	2,55	21,24	31,26	9,73			
INDONESIA	32,59	0,36	31,87	33,30	1,11	31,60	0,34	30,93	32,26	1,07	32,06	0,28	31,50	32,61	0,88			

Tabel 9.5 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Dasar menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan + Perdesaan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error			
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	32,82	2,27	28,36	37,28	6,93	31,20	1,33	28,59	33,80	4,26	31,66	1,15	29,41	33,90	3,62			
Sumatera Utara	29,09	1,34	26,46	31,72	4,61	29,93	1,02	27,93	31,94	3,41	29,52	0,84	27,87	31,17	2,85			
Sumatera Barat	26,54	1,91	22,80	30,28	7,19	23,27	1,08	21,16	25,39	4,63	24,54	0,99	22,60	26,47	4,02			
Riau	27,75	2,60	22,65	32,86	9,38	24,56	1,62	21,38	27,75	6,61	25,81	1,42	23,03	28,59	5,49			
Kepulauan Riau	37,30	2,78	31,84	42,76	7,47	26,37	6,60	13,43	39,31	25,04	35,29	2,64	30,10	40,47	7,50			
Jambi	28,33	2,53	23,37	33,28	8,93	22,70	1,36	20,04	25,37	5,99	24,43	1,28	21,92	26,94	5,23			
Sumatera Selatan	29,96	1,92	26,20	33,72	6,40	26,24	1,17	23,95	28,52	4,45	27,57	0,99	25,63	29,51	3,59			
Bangka Belitung	29,61	2,00	25,70	33,52	6,74	18,74	2,18	14,47	23,01	11,62	24,10	1,52	21,12	27,08	6,31			
Bengkulu	23,77	2,45	18,97	28,57	10,30	18,30	1,43	15,50	21,10	7,80	20,00	1,24	17,57	22,42	6,18			
Lampung	31,50	1,90	27,78	35,23	6,03	22,37	1,29	19,84	24,89	5,76	24,72	1,16	22,44	26,99	4,69			
DKI Jakarta	21,88	1,29	19,35	24,40	5,88	-	-	-	-	-	21,88	1,29	19,35	24,40	5,88			
Jawa Barat	29,77	1,16	27,50	32,04	3,89	31,20	1,55	28,17	34,24	4,96	30,26	0,93	28,44	32,09	3,08			
Banten	17,75	1,74	14,34	21,16	9,79	18,38	1,78	14,89	21,88	9,69	17,96	1,31	15,40	20,52	7,28			
Jawa Tengah	21,97	0,74	20,51	23,43	3,39	19,95	0,65	18,68	21,23	3,26	20,88	0,49	19,92	21,84	2,35			
DI Yogyakarta	19,85	1,31	17,28	22,42	6,61	16,75	2,01	12,82	20,69	11,98	18,80	1,14	16,57	21,03	6,04			
Jawa Timur	22,48	0,74	21,03	23,92	3,28	17,47	0,67	16,16	18,78	3,84	19,85	0,50	18,88	20,83	2,51			
Bali	25,71	1,40	22,96	28,45	5,45	20,34	1,79	16,83	23,86	8,82	23,57	1,11	21,38	25,75	4,73			
Nusa Tenggara Barat	13,71	1,32	11,11	16,30	9,64	10,14	1,35	7,49	12,78	13,30	11,63	0,99	9,69	13,56	8,48			
Nusa Tenggara Timur	21,45	2,20	17,15	25,76	10,24	19,38	0,98	17,45	21,30	5,06	19,77	0,90	18,00	21,54	4,57			
Kalimantan Barat	21,40	2,03	17,42	25,38	9,48	15,05	1,05	12,99	17,11	6,99	16,97	0,96	15,08	18,86	5,68			
Kalimantan Tengah	30,27	3,19	24,02	36,51	10,53	35,24	2,02	31,29	39,20	5,73	33,58	1,72	30,21	36,94	5,11			
Kalimantan Selatan	26,29	2,14	22,10	30,48	8,13	22,17	1,36	19,50	24,84	6,13	23,89	1,18	21,58	26,21	4,94			
Kalimantan Timur	27,99	2,68	22,74	33,25	9,58	26,30	2,51	21,38	31,21	9,53	27,35	1,92	23,58	31,11	7,02			
Sulawesi Utara	24,78	1,94	20,97	28,59	7,85	31,20	1,49	28,27	34,13	4,79	28,29	1,25	25,84	30,75	4,43			
Gorontalo	27,27	2,66	22,06	32,48	9,74	29,14	2,64	23,97	34,32	9,06	28,50	1,97	24,64	32,36	6,91			
Sulawesi Tengah	29,91	2,53	24,95	34,87	8,46	31,94	1,83	28,36	35,53	5,72	31,45	1,51	28,48	34,42	4,82			
Sulawesi Selatan	22,97	1,24	20,55	25,39	5,38	16,56	0,77	15,05	18,06	4,63	18,91	0,70	17,54	20,27	3,69			
Sulawesi Barat	27,88	4,48	19,08	36,67	16,09	20,71	2,22	16,36	25,07	10,73	22,41	2,06	18,37	26,44	9,19			
Sulawesi Tenggara	18,20	2,22	13,85	22,56	12,20	17,16	1,62	13,97	20,34	9,46	17,44	1,33	14,84	20,05	7,61			
Maluku	33,56	3,38	26,93	40,19	10,07	38,34	1,74	34,93	41,75	4,54	36,56	1,70	33,24	39,89	4,64			
Maluku Utara	25,62	3,18	19,38	31,85	12,42	30,54	1,81	27,00	34,09	5,92	29,21	1,59	26,10	32,32	5,43			
Papua	27,45	2,98	21,60	33,29	10,86	22,32	2,57	17,29	27,35	11,50	23,73	2,02	19,77	27,69	8,51			
Papua Barat	32,52	4,69	23,33	41,72	14,42	26,54	2,46	21,72	31,37	9,28	28,32	2,22	23,97	32,67	7,84			
INDONESIA	24,85	0,37	24,13	25,58	1,49	21,97	0,31	21,36	22,58	1,42	23,39	0,24	22,92	23,86	1,03			

Tabel 9.6 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Dasar menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki + Perempuan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		(16)	(17)	(19)	
			Batas Bawah	Batas Atas				(4)	(5)				(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	38,45	1,56	35,40	41,51	4,05	25,86	1,27	23,37	28,36	4,92	31,66	1,15	29,41	33,90	3,62			
Sumatera Utara	32,25	1,23	29,85	34,65	3,80	27,32	1,04	25,30	29,35	3,79	29,52	0,84	27,87	31,17	2,85			
Sumatera Barat	27,73	1,42	24,94	30,52	5,12	21,92	1,17	19,63	24,21	5,33	24,54	0,99	22,60	26,47	4,02			
Riau	30,17	1,85	26,55	33,79	6,12	20,97	1,82	17,40	24,54	8,68	25,81	1,42	23,03	28,59	5,49			
Kepulauan Riau	38,55	4,08	30,55	46,54	10,58	31,35	4,54	22,44	40,25	14,49	35,29	2,64	30,10	40,47	7,50			
Jambi	29,35	1,89	25,64	33,06	6,45	19,12	1,50	16,18	22,06	7,83	24,43	1,28	21,92	26,94	5,23			
Sumatera Selatan	31,75	1,49	28,82	34,68	4,70	23,69	1,24	21,26	26,11	5,23	27,57	0,99	25,63	29,51	3,59			
Bangka Belitung	29,07	2,39	24,38	33,75	8,23	19,65	1,73	16,27	23,04	8,78	24,10	1,52	21,12	27,08	6,31			
Bengkulu	27,14	1,93	23,36	30,91	7,10	13,33	1,43	10,52	16,13	10,74	20,00	1,24	17,57	22,42	6,18			
Lampung	31,98	1,56	28,92	35,04	4,88	17,34	1,30	14,80	19,89	7,48	24,72	1,16	22,44	26,99	4,69			
DKI Jakarta	18,72	1,52	15,75	21,70	8,10	24,76	2,01	20,82	28,69	8,12	21,88	1,29	19,35	24,40	5,88			
Jawa Barat	34,83	1,13	32,61	37,04	3,24	25,85	1,11	23,67	28,03	4,31	30,26	0,93	28,44	32,09	3,08			
Banten	22,86	1,84	19,24	26,47	8,06	13,24	1,42	10,45	16,04	10,76	17,96	1,31	15,40	20,52	7,28			
Jawa Tengah	28,73	0,73	27,30	30,15	2,53	14,16	0,53	13,12	15,20	3,75	20,88	0,49	19,92	21,84	2,35			
DI Yogyakarta	25,92	1,59	22,81	29,03	6,12	13,29	1,39	10,57	16,02	10,46	18,80	1,14	16,57	21,03	6,04			
Jawa Timur	28,57	0,76	27,09	30,06	2,65	12,96	0,53	11,93	13,99	4,05	19,85	0,50	18,88	20,83	2,51			
Bali	30,98	1,75	27,56	34,41	5,64	16,87	1,40	14,13	19,60	8,27	23,57	1,11	21,38	25,75	4,73			
Nusa Tenggara Barat	15,47	1,55	12,43	18,50	10,00	8,42	1,03	6,41	10,43	12,19	11,63	0,99	9,69	13,56	8,48			
Nusa Tenggara Timur	23,14	1,26	20,67	25,61	5,44	16,75	1,03	14,72	18,77	6,17	19,77	0,90	18,00	21,54	4,57			
Kalimantan Barat	24,24	1,45	21,40	27,08	5,98	9,35	1,08	7,24	11,46	11,51	16,97	0,96	15,08	18,86	5,68			
Kalimantan Tengah	36,17	2,14	31,98	40,37	5,92	30,54	2,18	26,27	34,82	7,14	33,58	1,72	30,21	36,94	5,11			
Kalimantan Selatan	31,20	1,74	27,80	34,61	5,57	18,44	1,56	15,39	21,48	8,44	23,89	1,18	21,58	26,21	4,94			
Kalimantan Timur	28,10	2,16	23,87	32,33	7,68	26,42	2,53	21,45	31,38	9,59	27,35	1,92	23,58	31,11	7,02			
Sulawesi Utara	29,64	1,63	26,45	32,82	5,49	27,08	1,48	24,17	29,98	5,47	28,29	1,25	25,84	30,75	4,43			
Gorontalo	28,65	2,74	23,28	34,01	9,55	28,38	2,85	22,80	33,96	10,03	28,50	1,97	24,64	32,36	6,91			
Sulawesi Tengah	34,90	1,82	31,34	38,46	5,20	28,05	2,09	23,95	32,15	7,47	31,45	1,51	28,48	34,42	4,82			
Sulawesi Selatan	21,12	1,08	19,00	23,24	5,12	17,23	0,99	15,30	19,16	5,72	18,91	0,70	17,54	20,27	3,69			
Sulawesi Barat	26,33	3,14	20,18	32,49	11,93	19,21	2,32	14,66	23,76	12,08	22,41	2,06	18,37	26,44	9,19			
Sulawesi Tenggara	22,32	1,87	18,65	25,99	8,39	12,69	1,44	9,87	15,51	11,33	17,44	1,33	14,84	20,05	7,61			
Maluku	35,93	2,29	31,45	40,42	6,37	37,15	2,02	33,20	41,11	5,43	36,56	1,70	33,24	39,89	4,64			
Maluku Utara	33,67	2,27	29,22	38,12	6,74	24,85	2,16	20,61	29,08	8,70	29,21	1,59	26,10	32,32	5,43			
Papua	23,52	2,35	18,91	28,13	9,99	24,03	2,92	18,32	29,75	12,13	23,73	2,02	19,77	27,69	8,51			
Papua Barat	30,86	3,38	24,23	37,50	10,97	25,10	2,98	19,26	30,93	11,86	28,32	2,22	23,97	32,67	7,84			
INDONESIA	29,26	0,32	28,62	29,90	1,11	18,24	0,28	17,69	18,78	1,53	23,39	0,24	22,92	23,86	1,03			

Tabel 9.7 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Menengah Pertama menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan + Perdesaan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		(16)	(17)	(19)	
			Batas Bawah	Batas Atas				(4)	(5)				Batas Bawah	Batas Atas	(13)	(14)	(15)	(17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	13,27	1,63	10,07	16,47	12,29	5,83	0,60	4,65	7,01	10,34	7,93	0,65	6,65	9,21	8,24			
Sumatera Utara	12,07	0,65	10,80	13,34	5,36	9,22	0,70	7,85	10,59	7,59	10,62	0,49	9,67	11,58	4,58			
Sumatera Barat	12,28	1,53	9,27	15,29	12,50	8,60	0,68	7,26	9,95	7,95	10,03	0,74	8,58	11,47	7,35			
Riau	14,50	1,73	11,11	17,90	11,95	4,16	0,75	2,69	5,62	17,95	8,21	0,93	6,39	10,03	11,30			
Kepulauan Riau	10,70	1,66	7,44	13,95	15,53	7,22	4,77	-2,13	16,57	66,04	10,06	1,61	6,89	13,22	16,04			
Jambi	10,49	2,07	6,44	14,54	19,71	5,53	0,72	4,13	6,94	12,94	7,05	0,84	5,41	8,70	11,87			
Sumatera Selatan	10,21	1,44	7,39	13,03	14,09	4,16	0,52	3,15	5,17	12,43	6,33	0,64	5,07	7,58	10,10			
Bangka Belitung	11,48	1,55	8,45	14,52	13,49	3,97	1,16	1,69	6,25	29,30	7,67	1,02	5,68	9,67	13,28			
Bengkulu	11,30	1,91	7,55	15,05	16,92	4,03	0,78	2,50	5,57	19,43	6,28	0,87	4,58	7,99	13,87			
Lampung	9,88	1,15	7,62	12,13	11,64	2,77	0,43	1,93	3,60	15,41	4,59	0,51	3,60	5,59	11,03			
DKI Jakarta	14,19	1,02	12,20	16,19	7,17	-	-	-	-	-	14,19	1,02	12,20	16,18	7,17			
Jawa Barat	8,46	0,56	7,36	9,57	6,66	1,81	0,28	1,26	2,37	15,56	6,18	0,39	5,41	6,95	6,34			
Banten	8,08	0,98	6,15	10,00	12,15	1,41	0,46	0,52	2,31	32,32	5,85	0,69	4,49	7,21	11,85			
Jawa Tengah	7,75	0,43	6,90	8,59	5,57	2,58	0,24	2,11	3,04	9,24	4,94	0,24	4,47	5,42	4,90			
DI Yogyakarta	9,39	1,26	6,91	11,87	13,46	4,62	1,09	2,49	6,76	23,54	7,78	0,94	5,94	9,62	12,04			
Jawa Timur	8,84	0,65	7,57	10,11	7,32	1,70	0,18	1,34	2,06	10,70	5,10	0,36	4,38	5,81	7,13			
Bali	5,71	0,88	3,97	7,44	15,47	1,45	0,44	0,59	2,32	30,41	4,01	0,57	2,89	5,13	14,29			
Nusa Tenggara Barat	5,33	1,07	3,24	7,42	20,01	1,97	0,49	1,01	2,94	24,90	3,38	0,55	2,31	4,44	16,17			
Nusa Tenggara Timur	11,86	1,85	8,24	15,49	15,58	2,30	0,30	1,72	2,88	12,86	4,11	0,46	3,22	5,00	11,08			
Kalimantan Barat	6,41	1,13	4,19	8,62	17,63	2,55	0,55	1,49	3,62	21,35	3,72	0,53	2,68	4,76	14,28			
Kalimantan Tengah	8,58	1,46	5,71	11,45	17,07	5,32	0,81	3,74	6,90	15,15	6,41	0,73	4,98	7,84	11,37			
Kalimantan Selatan	10,04	1,18	7,73	12,36	11,75	2,45	0,53	1,41	3,50	21,72	5,62	0,65	4,35	6,90	11,56			
Kalimantan Timur	12,12	1,86	8,47	15,77	15,36	4,12	1,25	1,67	6,56	30,28	9,07	1,26	6,59	11,55	13,93			
Sulawesi Utara	18,13	1,19	15,79	20,47	6,57	12,20	1,03	10,17	14,22	8,47	14,88	0,79	13,34	16,43	5,30			
Gorontalo	14,20	2,26	9,76	18,63	15,93	5,39	1,09	3,26	7,52	20,17	8,39	1,12	6,20	10,58	13,30			
Sulawesi Tengah	10,25	1,97	6,37	14,12	19,27	6,43	0,75	4,97	7,89	11,60	7,36	0,75	5,88	8,83	10,22			
Sulawesi Selatan	11,15	1,85	7,51	14,78	16,64	3,14	0,32	2,52	3,76	10,08	6,07	0,86	4,38	7,76	14,17			
Sulawesi Barat	7,22	2,08	3,14	11,30	28,79	4,74	0,97	2,83	6,64	20,51	5,32	0,90	3,56	7,09	16,93			
Sulawesi Tenggara	7,90	1,86	4,24	11,55	23,60	4,30	0,76	2,82	5,79	17,58	5,29	0,75	3,82	6,75	14,15			
Maluku	14,15	2,06	10,10	18,20	14,59	6,00	0,88	4,29	7,72	14,58	9,03	1,05	6,97	11,10	11,66			
Maluku Utara	15,24	2,80	9,74	20,73	18,41	5,74	1,02	3,74	7,75	17,79	8,31	1,17	6,01	10,62	14,13			
Papua	11,79	2,11	7,65	15,93	17,92	4,84	1,17	2,54	7,14	24,25	6,76	1,02	4,75	8,76	15,13			
Papua Barat	13,37	3,60	6,30	20,43	26,97	5,90	1,05	3,84	7,97	17,82	8,11	1,32	5,53	10,70	16,25			
INDONESIA	9,35	0,23	8,89	9,80	2,50	3,23	0,10	3,04	3,42	3,00	6,25	0,13	5,99	6,51	2,12			

Tabel 9.8 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Menengah Pertama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki + Perempuan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error			
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	10,53	1,06	8,46	12,61	10,05	5,70	0,66	4,41	7,00	11,55	7,93	0,65	6,65	9,21	8,24			
Sumatera Utara	13,95	0,79	12,40	15,50	5,67	7,95	0,53	6,91	8,99	6,67	10,62	0,49	9,67	11,58	4,58			
Sumatera Barat	11,33	1,10	9,18	13,49	9,71	8,96	0,84	7,32	10,60	9,35	10,03	0,74	8,58	11,47	7,35			
Riau	10,54	1,25	8,10	12,99	11,82	5,62	1,12	3,43	7,80	19,85	8,21	0,93	6,39	10,03	11,30			
Kepulauan Riau	11,12	2,90	5,44	16,80	26,04	8,77	1,82	5,20	12,34	20,77	10,06	1,61	6,89	13,22	16,04			
Jambi	9,89	1,20	7,54	12,24	12,14	4,00	0,91	2,21	5,78	22,83	7,05	0,84	5,41	8,70	11,87			
Sumatera Selatan	8,82	1,00	6,86	10,78	11,34	4,02	0,72	2,61	5,43	17,91	6,33	0,64	5,07	7,58	10,10			
Bangka Belitung	11,59	1,66	8,34	14,83	14,28	4,17	0,93	2,34	6,00	22,41	7,67	1,02	5,68	9,67	13,28			
Bengkulu	8,50	1,26	6,04	10,96	14,78	4,21	0,92	2,40	6,03	21,92	6,28	0,87	4,58	7,99	13,87			
Lampung	5,74	0,70	4,37	7,11	12,20	3,43	0,58	2,30	4,56	16,76	4,59	0,51	3,60	5,59	11,03			
DKI Jakarta	15,68	1,45	12,85	18,52	9,23	12,83	1,39	10,10	15,55	10,83	14,19	1,02	12,20	16,18	7,17			
Jawa Barat	7,80	0,56	6,71	8,89	7,13	4,62	0,45	3,73	5,50	9,75	6,18	0,39	5,41	6,95	6,34			
Banten	6,68	0,94	4,83	8,52	14,09	5,06	0,91	3,27	6,85	18,04	5,85	0,69	4,49	7,21	11,85			
Jawa Tengah	7,09	0,40	6,31	7,87	5,59	3,10	0,25	2,61	3,60	8,14	4,94	0,24	4,47	5,42	4,90			
DI Yogyakarta	9,85	1,44	7,03	12,68	14,62	6,18	1,00	4,22	8,13	16,16	7,78	0,94	5,94	9,62	12,04			
Jawa Timur	7,03	0,50	6,04	8,01	7,14	3,57	0,35	2,89	4,25	9,74	5,10	0,36	4,38	5,81	7,13			
Bali	5,36	0,93	3,53	7,18	17,38	2,79	0,67	1,48	4,10	23,98	4,01	0,57	2,89	5,13	14,29			
Nusa Tenggara Barat	6,21	1,10	4,06	8,37	17,69	1,00	0,35	0,32	1,69	34,87	3,38	0,55	2,31	4,44	16,17			
Nusa Tenggara Timur	5,11	0,69	3,77	6,46	13,45	3,21	0,51	2,21	4,20	15,86	4,11	0,46	3,22	5,00	11,08			
Kalimantan Barat	5,19	0,80	3,62	6,76	15,45	2,18	0,60	1,00	3,36	27,68	3,72	0,53	2,68	4,76	14,28			
Kalimantan Tengah	8,88	1,18	6,57	11,20	13,28	3,53	0,87	1,83	5,23	24,59	6,41	0,73	4,98	7,84	11,37			
Kalimantan Selatan	8,48	1,27	6,00	10,96	14,91	3,49	0,67	2,17	4,80	19,21	5,62	0,65	4,35	6,90	11,56			
Kalimantan Timur	11,34	1,64	8,13	14,56	14,45	6,27	1,57	3,19	9,35	25,04	9,07	1,26	6,59	11,55	13,93			
Sulawesi Utara	16,76	1,13	14,54	18,98	6,77	13,19	1,16	10,91	15,47	8,81	14,88	0,79	13,34	16,43	5,30			
Gorontalo	9,75	1,66	6,50	13,00	17,01	7,22	1,29	4,70	9,75	17,85	8,39	1,12	6,20	10,58	13,30			
Sulawesi Tengah	9,54	1,17	7,25	11,83	12,24	5,21	0,88	3,48	6,94	16,94	7,36	0,75	5,88	8,83	10,22			
Sulawesi Selatan	8,39	1,13	6,17	10,61	13,52	4,31	0,88	2,58	6,05	20,46	6,07	0,86	4,38	7,76	14,17			
Sulawesi Barat	6,67	1,38	3,96	9,39	20,75	4,23	1,04	2,19	6,26	24,62	5,32	0,90	3,56	7,09	16,93			
Sulawesi Tenggara	8,09	1,24	5,66	10,52	15,33	2,56	0,70	1,18	3,94	27,55	5,29	0,75	3,82	6,75	14,15			
Maluku	10,40	1,53	7,39	13,41	14,76	7,76	1,53	4,75	10,76	19,76	9,03	1,05	6,97	11,10	11,66			
Maluku Utara	10,94	1,75	7,52	14,36	15,95	5,74	1,23	3,34	8,15	21,38	8,31	1,17	6,01	10,62	14,13			
Papua	7,10	1,45	4,25	9,95	20,46	6,27	1,44	3,45	9,10	22,98	6,76	1,02	4,75	8,76	15,13			
Papua Barat	9,32	1,78	5,84	12,80	19,05	6,59	2,05	2,57	10,61	31,14	8,11	1,32	5,53	10,70	16,25			
INDONESIA	8,20	0,19	7,83	8,58	2,32	4,53	0,14	4,25	4,81	3,16	6,25	0,13	5,99	6,51	2,12			

Tabel 9.9 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Menengah menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan + Perdesaan				
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas				(4)	(5)				(16)	(17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Aceh	14,54	1,63	11,34	17,73	11,22	4,58	0,55	3,49	5,66	12,08	7,38	0,64	6,12	8,64	8,70
Sumatera Utara	19,55	1,46	16,68	22,42	7,49	7,01	0,60	5,84	8,19	8,53	13,18	1,00	11,22	15,15	7,61
Sumatera Barat	19,23	2,32	14,68	23,78	12,08	6,64	0,66	5,34	7,93	9,93	11,51	1,21	9,13	13,89	10,54
Riau	19,12	2,78	13,66	24,57	14,56	3,09	0,58	1,95	4,23	18,78	9,37	1,42	6,59	12,15	15,14
Kepulauan Riau	16,15	3,21	9,85	22,45	19,89	1,05	0,61	-0,15	2,25	58,32	13,37	2,71	8,05	18,69	20,29
Jambi	14,02	2,30	9,51	18,54	16,44	3,86	0,61	2,66	5,06	15,84	6,98	0,96	5,10	8,86	13,77
Sumatera Selatan	14,64	1,42	11,86	17,43	9,70	2,47	0,34	1,79	3,14	13,97	6,83	0,90	5,06	8,60	13,23
Bangka Belitung	10,13	1,40	7,38	12,88	13,86	3,35	1,30	0,80	5,91	38,89	6,69	1,00	4,73	8,66	14,96
Bengkulu	13,03	2,05	9,01	17,05	15,72	2,41	0,51	1,40	3,42	21,36	5,70	0,82	4,09	7,30	14,37
Lampung	10,13	1,69	6,82	13,44	16,65	2,28	0,30	1,70	2,86	12,96	4,30	0,54	3,25	5,35	12,44
DKI Jakarta	25,06	1,47	22,17	27,95	5,88	-	-	-	-	-	25,06	1,47	22,17	27,95	5,88
Jawa Barat	10,17	0,79	8,62	11,71	7,76	2,01	0,32	1,38	2,65	16,01	7,37	0,55	6,29	8,44	7,44
Banten	11,52	1,39	8,79	14,25	12,08	1,81	0,50	0,83	2,79	27,72	8,28	0,96	6,40	10,16	11,59
Jawa Tengah	8,67	0,55	7,60	9,75	6,33	1,56	0,18	1,21	1,92	11,59	4,81	0,29	4,25	5,38	5,95
DI Yogyakarta	11,39	1,18	9,08	13,69	10,33	3,25	0,88	1,53	4,98	27,02	8,64	0,88	6,91	10,37	10,22
Jawa Timur	10,05	0,76	8,57	11,53	7,52	1,09	0,16	0,79	1,40	14,22	5,35	0,43	4,51	6,19	8,00
Bali	8,55	0,90	6,77	10,32	10,58	2,29	0,52	1,27	3,32	22,77	6,05	0,61	4,86	7,24	10,04
Nusa Tenggara Barat	5,76	1,08	3,64	7,87	18,72	2,25	0,55	1,16	3,34	24,63	3,71	0,54	2,65	4,78	14,67
Nusa Tenggara Timur	16,92	2,26	12,50	21,34	13,33	2,45	0,28	1,90	2,99	11,39	5,18	0,57	4,07	6,30	10,98
Kalimantan Barat	10,37	1,47	7,48	13,26	14,21	1,32	0,34	0,65	1,99	25,78	4,06	0,60	2,88	5,24	14,81
Kalimantan Tengah	14,08	1,89	10,37	17,80	13,45	4,13	1,01	2,15	6,10	24,40	7,46	0,98	5,55	9,38	13,09
Kalimantan Selatan	12,64	1,55	9,60	15,68	12,28	2,19	0,50	1,20	3,17	23,03	6,55	0,79	5,01	8,10	12,04
Kalimantan Timur	14,70	1,41	11,94	17,45	9,57	4,38	1,15	2,12	6,64	26,29	10,76	1,01	8,78	12,75	9,40
Sulawesi Utara	23,94	2,14	19,73	28,14	8,96	8,13	1,08	6,00	10,26	13,34	15,29	1,38	12,58	17,99	9,03
Gorontalo	18,44	3,29	11,98	24,90	17,86	4,70	1,05	2,64	6,75	22,30	9,38	1,51	6,43	12,33	16,06
Sulawesi Tengah	18,84	3,88	11,23	26,45	20,60	4,57	0,59	3,41	5,74	12,96	8,05	1,19	5,72	10,39	14,79
Sulawesi Selatan	17,11	2,09	13,01	21,20	12,21	3,04	0,30	2,45	3,64	9,95	8,20	1,06	6,12	10,27	12,91
Sulawesi Barat	11,69	2,48	6,83	16,55	21,20	3,36	0,85	1,68	5,03	25,46	5,33	0,95	3,47	7,18	17,78
Sulawesi Tenggara	18,79	3,42	12,09	25,49	18,19	3,71	0,60	2,54	4,87	16,07	7,84	1,21	5,48	10,20	15,38
Maluku	14,97	1,73	11,58	18,37	11,57	6,09	0,91	4,30	7,87	14,97	9,39	1,04	7,36	11,42	11,03
Maluku Utara	18,29	3,30	11,81	24,77	18,07	3,25	0,63	2,01	4,48	19,40	7,32	1,11	5,15	9,50	15,16
Papua	22,79	4,47	14,04	31,55	19,59	6,24	1,17	3,95	8,53	18,73	10,80	1,61	7,64	13,96	14,92
Papua Barat	19,98	4,04	12,06	27,90	20,22	10,50	2,42	5,76	15,24	23,04	13,31	2,10	9,20	17,42	15,74
INDONESIA	12,15	0,31	11,53	12,77	2,59	2,50	0,08	2,33	2,66	3,37	7,26	0,18	6,91	7,61	2,46

Tabel 9.10 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Sekolah Menengah menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki + Perempuan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error			
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	10,91	1,02	8,91	12,90	9,32	4,37	0,65	3,10	5,64	14,82	7,38	0,64	6,12	8,64	8,70			
Sumatera Utara	18,94	1,44	16,11	21,77	7,61	8,55	0,93	6,73	10,38	10,89	13,18	1,00	11,22	15,15	7,61			
Sumatera Barat	15,03	1,83	11,45	18,61	12,15	8,63	1,00	6,66	10,59	11,63	11,51	1,21	9,13	13,89	10,54			
Riau	12,04	1,94	8,24	15,84	16,11	6,40	1,24	3,97	8,84	19,41	9,37	1,42	6,59	12,15	15,14			
Kepulauan Riau	17,29	4,02	9,40	25,17	23,27	8,64	4,85	-0,87	18,16	56,16	13,37	2,71	8,05	18,69	20,29			
Jambi	9,82	1,42	7,03	12,60	14,47	3,92	0,90	2,14	5,69	23,08	6,98	0,96	5,10	8,86	13,77			
Sumatera Selatan	9,88	1,23	7,46	12,29	12,47	4,00	1,02	1,99	6,00	25,59	6,83	0,90	5,06	8,60	13,23			
Bangka Belitung	10,62	1,62	7,44	13,80	15,26	3,18	0,84	1,53	4,83	26,53	6,69	1,00	4,73	8,66	14,96			
Bengkulu	9,57	1,25	7,12	12,02	13,04	2,08	0,71	0,69	3,47	34,05	5,70	0,82	4,09	7,30	14,37			
Lampung	6,11	0,64	4,87	7,36	10,40	2,46	0,67	1,14	3,79	27,37	4,30	0,54	3,25	5,35	12,44			
DKI Jakarta	33,54	2,11	29,40	37,67	6,29	17,31	1,85	13,68	20,95	10,71	25,06	1,47	22,17	27,95	5,88			
Jawa Barat	10,34	0,74	8,89	11,79	7,15	4,50	0,52	3,49	5,51	11,45	7,37	0,55	6,29	8,44	7,44			
Banten	11,83	1,44	9,01	14,64	12,15	4,86	0,85	3,20	6,52	17,45	8,28	0,96	6,40	10,16	11,59			
Jawa Tengah	7,12	0,44	6,25	7,98	6,23	2,85	0,29	2,28	3,41	10,14	4,81	0,29	4,25	5,38	5,95			
DI Yogyakarta	12,82	1,38	10,11	15,52	10,76	5,41	0,71	4,01	6,80	13,19	8,64	0,88	6,91	10,37	10,22			
Jawa Timur	8,06	0,57	6,95	9,17	7,03	3,21	0,39	2,45	3,97	12,08	5,35	0,43	4,51	6,19	8,00			
Bali	9,56	1,11	7,38	11,74	11,64	2,88	0,53	1,85	3,91	18,25	6,05	0,61	4,86	7,24	10,04			
Nusa Tenggara Barat	5,75	0,93	3,92	7,57	16,21	2,02	0,49	1,06	2,97	24,08	3,71	0,54	2,65	4,78	14,67			
Nusa Tenggara Timur	8,69	0,98	6,76	10,62	11,31	2,04	0,37	1,32	2,76	17,93	5,18	0,57	4,07	6,30	10,98			
Kalimantan Barat	5,71	0,79	4,16	7,27	13,90	2,33	0,71	0,94	3,72	30,45	4,06	0,60	2,88	5,24	14,81			
Kalimantan Tengah	11,25	1,43	8,44	14,06	12,76	3,04	0,91	1,26	4,82	29,91	7,46	0,98	5,55	9,38	13,09			
Kalimantan Selatan	11,68	1,38	8,97	14,40	11,84	2,72	0,72	1,31	4,13	26,39	6,55	0,79	5,01	8,10	12,04			
Kalimantan Timur	15,37	1,46	12,50	18,23	9,51	5,09	1,31	2,51	7,67	25,82	10,76	1,01	8,78	12,75	9,40			
Sulawesi Utara	16,82	1,75	13,40	20,25	10,39	13,90	1,53	10,90	16,90	11,01	15,29	1,38	12,58	17,99	9,03			
Gorontalo	11,63	1,87	7,97	15,28	16,04	7,45	1,86	3,81	11,09	24,91	9,38	1,51	6,43	12,33	16,06			
Sulawesi Tengah	10,17	1,35	7,52	12,82	13,31	5,96	1,26	3,49	8,44	21,15	8,05	1,19	5,72	10,39	14,79			
Sulawesi Selatan	11,61	1,21	9,24	13,98	10,41	5,61	1,28	3,10	8,12	22,80	8,20	1,06	6,12	10,27	12,91			
Sulawesi Barat	8,63	1,80	5,09	12,16	20,92	2,64	0,83	1,01	4,27	31,52	5,33	0,95	3,47	7,18	17,78			
Sulawesi Tenggara	12,00	1,56	8,94	15,06	13,00	3,78	1,09	1,64	5,93	28,92	7,84	1,21	5,48	10,20	15,38			
Maluku	14,02	1,60	10,89	17,15	11,40	5,07	1,03	3,06	7,09	20,28	9,39	1,04	7,36	11,42	11,03			
Maluku Utara	9,91	1,46	7,05	12,77	14,72	4,79	1,15	2,54	7,04	23,98	7,32	1,11	5,15	9,50	15,16			
Papua	13,66	1,79	10,15	17,17	13,10	6,81	2,13	2,64	10,98	31,26	10,80	1,61	7,64	13,96	14,92			
Papua Barat	19,87	3,47	13,07	26,67	17,46	5,02	1,77	1,55	8,50	35,28	13,31	2,10	9,20	17,42	15,74			
INDONESIA	10,43	0,24	9,95	10,91	2,35	4,47	0,17	4,13	4,81	3,86	7,26	0,18	6,91	7,61	2,46			

Tabel 9.11 Sampling Error Penduduk Lansia yang Tamat Perguruan Tinggi menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan + Perdesaan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error			
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	4,18	0,90	2,42	5,94	21,49	1,18	0,34	0,51	1,85	28,93	2,02	0,36	1,32	2,73	17,73			
Sumatera Utara	4,82	0,81	3,22	6,41	16,90	1,24	0,26	0,73	1,76	21,18	3,00	0,46	2,10	3,90	15,34			
Sumatera Barat	4,89	0,70	3,51	6,26	14,36	1,51	0,27	0,99	2,04	17,68	2,82	0,35	2,14	3,50	12,37			
Riau	4,80	1,06	2,73	6,87	21,98	0,36	0,20	-0,04	0,76	57,40	2,10	0,46	1,20	3,00	21,88			
Kep. Riau	2,59	0,98	0,66	4,51	37,95	1,15	0,95	-0,71	3,01	82,55	2,32	0,82	0,72	3,92	35,14			
Jambi	5,98	1,31	3,42	8,54	21,86	0,50	0,23	0,05	0,94	46,01	2,18	0,48	1,23	3,13	22,17			
Sumatera Selatan	4,58	0,84	2,94	6,23	18,32	0,49	0,18	0,14	0,83	35,97	1,95	0,42	1,13	2,78	21,49			
Kep. Bangka Belitung	2,12	0,67	0,80	3,44	31,83	0,84	0,47	-0,08	1,76	55,94	1,47	0,41	0,66	2,28	27,98			
Bengkulu	9,93	1,87	6,27	13,60	18,82	0,88	0,30	0,28	1,47	34,56	3,68	0,79	2,13	5,23	21,51			
Lampung	3,60	0,88	1,87	5,33	24,49	0,93	0,26	0,42	1,44	28,08	1,61	0,31	1,01	2,22	19,25			
DKI Jakarta	12,30	1,24	9,87	14,74	10,10	-	-	-	-	-	12,30	1,24	9,87	14,74	10,10			
Jawa Barat	4,22	0,53	3,18	5,25	12,52	0,72	0,18	0,36	1,07	25,14	3,02	0,36	2,32	3,72	11,88			
Banten	6,39	1,15	4,14	8,65	18,00	0,82	0,46	-0,08	1,72	55,81	4,53	0,80	2,97	6,10	17,64			
Jawa Tengah	3,16	0,33	2,52	3,80	10,36	0,64	0,12	0,42	0,87	17,91	1,79	0,17	1,47	2,12	9,22			
DI Yogyakarta	8,11	1,08	6,00	10,22	13,26	2,34	1,19	0,01	4,68	50,81	6,16	0,84	4,51	7,81	13,66			
Jawa Timur	3,54	0,36	2,84	4,25	10,16	0,48	0,09	0,31	0,65	18,31	1,94	0,19	1,56	2,32	9,99			
Bali	4,86	0,74	3,42	6,31	15,19	1,39	0,38	0,64	2,15	27,63	3,48	0,49	2,51	4,44	14,14			
Nusa Tenggara Barat	2,98	0,89	1,23	4,73	29,98	0,76	0,40	-0,02	1,54	52,57	1,69	0,43	0,84	2,54	25,70			
Nusa Tenggara Timur	5,09	1,11	2,92	7,27	21,80	0,68	0,15	0,40	0,97	21,31	1,52	0,26	1,02	2,02	16,87			
Kalimantan Barat	2,98	0,80	1,40	4,55	26,96	0,12	0,08	-0,05	0,28	72,07	0,98	0,28	0,43	1,54	28,72			
Kalimantan Tengah	4,65	1,12	2,45	6,85	24,10	1,00	0,36	0,30	1,71	35,60	2,22	0,46	1,32	3,13	20,86			
Kalimantan Selatan	3,28	0,85	1,61	4,95	25,93	0,72	0,24	0,25	1,20	33,67	1,79	0,38	1,05	2,54	21,24			
Kalimantan Timur	6,00	1,42	3,21	8,79	23,74	0,72	0,55	-0,35	1,79	75,77	3,99	0,96	2,11	5,87	24,06			
Sulawesi Utara	5,90	0,81	4,31	7,49	13,75	1,47	0,29	0,90	2,04	19,91	3,48	0,44	2,61	4,34	12,65			
Gorontalo	4,77	1,34	2,14	7,40	28,08	0,81	0,45	-0,08	1,70	55,79	2,16	0,57	1,05	3,27	26,32			
Sulawesi Tengah	11,79	2,46	6,96	16,62	20,91	0,67	0,22	0,23	1,10	33,59	3,38	0,75	1,91	4,85	22,22			
Sulawesi Selatan	6,81	0,75	5,35	8,27	10,95	1,36	0,25	0,88	1,84	18,05	3,35	0,34	2,69	4,02	10,15			
Sulawesi Barat	5,98	1,61	2,83	9,12	26,87	0,70	0,38	-0,03	1,44	53,47	1,95	0,50	0,97	2,93	25,74			
Sulawesi Tenggara	7,57	1,60	4,43	10,70	21,11	1,27	0,35	0,59	1,96	27,48	3,00	0,54	1,94	4,06	18,00			
Maluku	7,08	1,58	3,98	10,18	22,30	1,21	0,32	0,58	1,85	26,51	3,40	0,68	2,06	4,73	20,05			
Maluku Utara	5,55	2,03	1,56	9,53	36,65	0,90	0,34	0,23	1,56	38,01	2,16	0,62	0,93	3,38	28,98			
Papua	15,78	3,52	8,87	22,68	22,33	2,00	0,80	0,43	3,56	39,93	5,79	1,24	3,37	8,22	21,38			
Papua Barat	5,45	2,48	0,59	10,31	45,48	4,33	1,18	2,03	6,64	27,15	4,66	1,10	2,51	6,81	23,52			
INDONESIA	4,79	0,19	4,42	5,16	3,94	0,79	0,05	0,69	0,89	6,43	2,76	0,10	2,56	2,96	3,66			

Tabel 9.12 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tamat Perguruan Tinggi menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki					Perempuan					Laki-Laki + Perempuan				
	Estimasi	Standard	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Aceh	3,25	0,56	2,16	4,35	17,16	0,98	0,29	0,40	1,56	30,17	2,02	0,36	1,32	2,73	17,73
Sumatera Utara	5,04	0,93	3,22	6,85	18,36	1,36	0,33	0,72	2,01	24,15	3,00	0,46	2,10	3,90	15,34
Sumatera Barat	3,64	0,56	2,54	4,74	15,41	2,15	0,42	1,32	2,97	19,64	2,82	0,35	2,14	3,50	12,37
Riau	3,36	0,77	1,85	4,86	22,84	0,70	0,35	0,01	1,39	50,23	2,10	0,46	1,20	3,00	21,88
Kep. Riau	2,61	0,97	0,71	4,51	37,14	1,97	0,88	0,26	3,69	44,39	2,32	0,82	0,72	3,92	35,14
Jambi	3,16	0,80	1,59	4,73	25,33	1,12	0,60	-0,06	2,31	53,77	2,18	0,48	1,23	3,13	22,17
Sumatera Selatan	3,12	0,79	1,57	4,66	25,27	0,88	0,37	0,16	1,60	41,92	1,95	0,42	1,13	2,78	21,49
Kep. Bangka Belitung	2,51	0,71	1,12	3,89	28,18	0,54	0,32	-0,09	1,18	59,60	1,47	0,41	0,66	2,28	27,98
Bengkulu	4,99	0,99	3,05	6,93	19,87	2,46	0,85	0,80	4,12	34,38	3,68	0,79	2,13	5,23	21,51
Lampung	2,18	0,49	1,22	3,14	22,41	1,04	0,29	0,47	1,61	27,83	1,61	0,31	1,01	2,22	19,25
DKI Jakarta	17,32	1,92	13,56	21,08	11,07	7,71	1,24	5,28	10,15	16,10	12,30	1,24	9,87	14,74	10,10
Jawa Barat	4,60	0,54	3,54	5,66	11,80	1,49	0,27	0,96	2,02	18,12	3,02	0,36	2,32	3,72	11,88
Banten	7,11	1,23	4,70	9,51	17,27	2,05	0,64	0,79	3,32	31,33	4,53	0,80	2,97	6,10	17,64
Jawa Tengah	2,74	0,27	2,22	3,27	9,79	0,98	0,15	0,69	1,28	15,50	1,79	0,17	1,47	2,12	9,22
DI Yogyakarta	9,17	1,29	6,65	11,69	14,02	3,84	0,75	2,38	5,30	19,44	6,16	0,84	4,51	7,81	13,66
Jawa Timur	2,86	0,32	2,23	3,49	11,25	1,21	0,17	0,88	1,53	13,81	1,94	0,19	1,56	2,32	9,99
Bali	6,18	0,82	4,57	7,79	13,28	1,03	0,41	0,23	1,84	39,52	3,48	0,49	2,51	4,44	14,14
Nusa Tenggara Barat	3,16	0,83	1,53	4,78	26,27	0,46	0,24	-0,02	0,94	53,08	1,69	0,43	0,84	2,54	25,70
Nusa Tenggara Timur	2,53	0,43	1,69	3,36	16,87	0,61	0,22	0,19	1,04	35,48	1,52	0,26	1,02	2,02	16,87
Kalimantan Barat	1,62	0,47	0,69	2,55	29,23	0,31	0,18	-0,05	0,68	58,70	0,98	0,28	0,43	1,54	28,72
Kalimantan Tengah	3,09	0,70	1,71	4,47	22,81	1,22	0,45	0,33	2,10	37,18	2,22	0,46	1,32	3,13	20,86
Kalimantan Selatan	3,06	0,68	1,73	4,39	22,13	0,84	0,35	0,15	1,54	42,18	1,79	0,38	1,05	2,54	21,24
Kalimantan Timur	6,32	1,43	3,51	9,13	22,68	1,11	0,65	-0,16	2,39	58,44	3,99	0,96	2,11	5,87	24,06
Sulawesi Utara	4,53	0,71	3,14	5,92	15,68	2,52	0,47	1,60	3,44	18,57	3,48	0,44	2,61	4,34	12,65
Gorontalo	1,92	0,69	0,56	3,28	36,22	2,37	0,75	0,90	3,84	31,69	2,16	0,57	1,05	3,27	26,32
Sulawesi Tengah	4,98	1,05	2,92	7,03	21,07	1,80	0,83	0,19	3,42	45,76	3,38	0,75	1,91	4,85	22,22
Sulawesi Selatan	5,84	0,64	4,58	7,09	10,96	1,47	0,28	0,93	2,01	18,71	3,35	0,34	2,69	4,02	10,15
Sulawesi Barat	3,12	0,98	1,19	5,05	31,58	1,00	0,48	0,05	1,95	48,54	1,95	0,50	0,97	2,93	25,74
Sulawesi Tenggara	5,55	0,98	3,64	7,46	17,60	0,51	0,27	-0,02	1,05	53,08	3,00	0,54	1,94	4,06	18,00
Maluku	3,52	0,97	1,61	5,43	27,63	3,28	1,00	1,32	5,24	30,49	3,40	0,68	2,06	4,73	20,05
Maluku Utara	3,56	0,91	1,77	5,34	25,61	0,78	0,53	-0,25	1,82	67,18	2,16	0,62	0,93	3,38	28,98
Papua	8,09	1,72	4,72	11,45	21,24	2,59	0,95	0,73	4,45	36,64	5,79	1,24	3,37	8,22	21,38
Papua Barat	6,19	1,70	2,85	9,53	27,50	2,73	1,29	0,21	5,25	47,03	4,66	1,10	2,51	6,81	23,52
INDONESIA	4,21	0,16	3,89	4,53	3,88	1,49	0,08	1,32	1,65	5,63	2,76	0,10	2,56	2,96	3,66

Tabel 9.13 Sampling Error Angka Buta Huruf Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan + Perdesaan				
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas				(4)	(5)				(16)	(17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Aceh	13,30	1,73	9,92	16,69	12,99	22,66	1,09	20,52	24,81	4,83	20,03	0,92	18,22	21,84	4,60
Sumatera Utara	9,16	0,99	7,22	11,11	10,82	16,33	1,10	14,17	18,50	6,76	12,80	0,80	11,25	14,36	6,21
Sumatera Barat	9,64	1,12	7,45	11,83	11,59	16,41	1,02	14,42	18,41	6,19	13,79	0,80	12,23	15,36	5,79
Riau	7,71	1,38	5,01	10,41	17,87	16,13	1,61	12,97	19,28	9,98	12,83	1,17	10,53	15,13	9,14
Kep. Riau	11,82	2,27	7,37	16,26	19,18	12,83	3,79	5,39	20,27	29,57	12,00	1,98	8,12	15,88	16,49
Jambi	11,99	1,99	8,10	15,89	16,57	25,98	1,85	22,35	29,62	7,13	21,69	1,52	18,70	24,68	7,03
Sumatera Selatan	12,52	1,22	10,13	14,90	9,73	17,10	1,02	15,10	19,10	5,98	15,46	0,79	13,90	17,02	5,14
Kep. Bangka Belitung	11,63	1,67	8,36	14,91	14,36	20,43	2,22	16,07	24,78	10,87	16,09	1,42	13,31	18,87	8,82
Bengkulu	14,28	2,39	9,59	18,97	16,75	32,89	1,79	29,38	36,41	5,45	27,13	1,71	23,78	30,48	6,29
Lampung	14,65	1,73	11,26	18,04	11,81	32,09	1,31	29,52	34,66	4,08	27,61	1,26	25,14	30,07	4,55
DKI Jakarta	4,45	0,74	3,01	5,90	16,53	-	-	-	-	-	4,45	0,74	3,01	5,90	16,53
Jawa Barat	16,40	1,16	14,12	18,68	7,10	24,44	1,60	21,29	27,58	6,57	19,16	0,94	17,32	20,99	4,89
Banten	19,67	1,66	16,41	22,93	8,46	30,07	2,05	26,05	34,08	6,82	23,14	1,30	20,59	25,68	5,61
Jawa Tengah	32,52	0,99	30,58	34,46	3,04	44,05	0,88	42,32	45,77	2,00	38,78	0,67	37,47	40,08	1,72
DI Yogyakarta	31,10	1,88	27,42	34,79	6,04	49,49	2,88	43,85	55,12	5,81	37,31	1,83	33,73	40,89	4,90
Jawa Timur	30,43	1,16	28,16	32,70	3,80	53,22	1,02	51,23	55,22	1,91	42,38	0,88	40,66	44,11	2,08
Bali	34,43	1,96	30,58	38,28	5,71	48,65	2,19	44,36	52,94	4,50	40,10	1,50	37,16	43,05	3,74
Nusa Tenggara Barat	50,28	2,88	44,64	55,92	5,72	60,99	3,11	54,89	67,09	5,10	56,52	2,21	52,18	60,86	3,92
Nusa Tenggara Timur	18,97	2,23	14,61	23,33	11,73	44,10	1,57	41,03	47,17	3,55	39,35	1,44	36,52	42,17	3,67
Kalimantan Barat	28,23	2,17	23,97	32,50	7,70	43,78	1,63	40,59	46,97	3,72	39,07	1,40	36,33	41,81	3,58
Kalimantan Tengah	13,51	2,71	8,21	18,82	20,02	16,77	1,56	13,70	19,84	9,33	15,68	1,38	12,97	18,38	8,80
Kalimantan Selatan	14,51	1,50	11,56	17,46	10,36	26,08	1,38	23,37	28,79	5,30	21,25	1,03	19,22	23,28	4,87
Kalimantan Timur	14,28	1,71	10,92	17,64	12,00	24,90	2,55	19,89	29,90	10,25	18,33	1,48	15,43	21,22	8,06
Sulawesi Utara	1,39	0,39	0,63	2,14	27,83	4,46	0,67	3,14	5,77	15,08	3,07	0,42	2,24	3,89	13,74
Gorontalo	6,06	1,34	3,44	8,69	22,05	17,78	2,04	13,78	21,77	11,47	13,79	1,55	10,75	16,82	11,22
Sulawesi Tengah	10,65	1,93	6,87	14,42	18,11	20,49	1,42	17,71	23,27	6,92	18,09	1,22	15,70	20,48	6,74
Sulawesi Selatan	22,37	1,70	19,04	25,70	7,59	48,01	1,11	45,84	50,19	2,31	38,62	1,42	35,84	41,40	3,67
Sulawesi Barat	25,15	3,40	18,49	31,81	13,50	41,45	3,06	35,45	47,44	7,37	37,60	2,68	32,34	42,85	7,14
Sulawesi Tenggara	24,90	2,58	19,85	29,95	10,34	44,78	1,99	40,88	48,69	4,45	39,33	1,72	35,97	42,70	4,37
Maluku	7,45	1,61	4,29	10,61	21,64	11,75	1,43	8,95	14,56	12,18	10,15	1,09	8,03	12,28	10,69
Maluku Utara	7,89	1,90	4,16	11,62	24,09	25,61	1,66	22,37	28,86	6,46	20,82	1,48	17,92	23,71	7,10
Papua	9,41	1,93	5,62	13,21	20,54	43,35	3,62	36,25	50,45	8,36	34,00	2,76	28,59	39,40	8,11
Papua Barat	12,66	4,01	4,80	20,52	31,66	27,62	2,62	22,49	32,75	9,47	23,18	2,12	19,02	27,35	9,16
INDONESIA	22,29	0,45	21,41	23,17	2,01	37,87	0,42	37,05	38,69	1,11	30,19	0,32	29,56	30,82	1,07

Tabel 9.14 Sampling Error Angka Buta Huruf Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki + Perempuan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error			
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	9,83	0,92	8,03	11,64	9,38	28,71	1,30	26,18	31,25	4,51	20,03	0,92	18,22	21,84	4,60			
Sumatera Utara	5,51	0,63	4,28	6,75	11,42	18,67	1,17	16,37	20,96	6,28	12,80	0,80	11,25	14,36	6,21			
Sumatera Barat	7,35	0,78	5,82	8,89	10,67	19,06	1,11	16,89	21,24	5,83	13,79	0,80	12,23	15,36	5,79			
Riau	7,05	1,01	5,08	9,03	14,27	19,25	2,02	15,28	23,22	10,52	12,83	1,17	10,53	15,13	9,14			
Kep. Riau	7,88	2,20	3,57	12,19	27,91	16,99	2,68	11,73	22,24	15,78	12,00	1,98	8,12	15,88	16,49			
Jambi	10,08	1,32	7,48	12,68	13,15	34,21	2,29	29,72	38,71	6,70	21,69	1,52	18,70	24,68	7,03			
Sumatera Selatan	7,38	0,85	5,72	9,04	11,47	22,96	1,22	20,57	25,35	5,31	15,46	0,79	13,90	17,02	5,14			
Kep. Bangka Belitung	6,93	1,40	4,18	9,68	20,23	24,29	2,06	20,25	28,33	8,49	16,09	1,42	13,31	18,87	8,82			
Bengkulu	11,68	1,37	9,00	14,36	11,69	41,56	2,58	36,50	46,62	6,21	27,13	1,71	23,78	30,48	6,29			
Lampung	14,23	1,09	12,08	16,37	7,69	41,18	1,92	37,41	44,95	4,67	27,61	1,26	25,14	30,07	4,55			
DKI Jakarta	1,93	0,56	0,83	3,03	28,96	6,76	1,14	4,53	8,99	16,84	4,45	0,74	3,01	5,90	16,53			
Jawa Barat	11,05	0,78	9,53	12,58	7,04	26,99	1,32	24,40	29,58	4,90	19,16	0,94	17,32	20,99	4,89			
Banten	14,13	1,67	10,85	17,40	11,83	31,82	1,94	28,02	35,63	6,10	23,14	1,30	20,59	25,68	5,61			
Jawa Tengah	22,86	0,69	21,51	24,21	3,01	52,39	0,84	50,75	54,02	1,59	38,78	0,67	37,47	40,08	1,72			
DI Yogyakarta	15,52	1,63	12,33	18,71	10,48	54,18	2,29	49,70	58,67	4,22	37,31	1,83	33,73	40,89	4,90			
Jawa Timur	24,09	0,83	22,46	25,72	3,46	56,85	1,04	54,82	58,89	1,82	42,38	0,88	40,66	44,11	2,08			
Bali	20,38	1,64	17,17	23,59	8,03	57,93	1,99	54,03	61,83	3,44	40,10	1,50	37,16	43,05	3,74			
Nusa Tenggara Barat	38,96	2,59	33,88	44,04	6,65	71,18	2,17	66,94	75,43	3,04	56,52	2,21	52,18	60,86	3,92			
Nusa Tenggara Timur	28,73	1,61	25,58	31,88	5,59	48,86	1,65	45,63	52,09	3,37	39,35	1,44	36,52	42,17	3,67			
Kalimantan Barat	22,81	1,52	19,84	25,78	6,65	56,13	1,82	52,56	59,71	3,25	39,07	1,40	36,33	41,81	3,58			
Kalimantan Tengah	9,40	1,38	6,69	12,11	14,70	23,01	2,21	18,68	27,34	9,59	15,68	1,38	12,97	18,38	8,80			
Kalimantan Selatan	8,47	1,00	6,50	10,44	11,85	30,78	1,57	27,71	33,86	5,09	21,25	1,03	19,22	23,28	4,87			
Kalimantan Timur	9,72	1,32	7,13	12,31	13,61	28,92	2,32	24,38	33,47	8,02	18,33	1,48	15,43	21,22	8,06			
Sulawesi Utara	1,80	0,38	1,06	2,54	20,84	4,21	0,64	2,96	5,46	15,19	3,07	0,42	2,24	3,89	13,74			
Gorontalo	10,62	1,79	7,12	14,13	16,84	16,50	2,20	12,19	20,81	13,32	13,79	1,55	10,75	16,82	11,22			
Sulawesi Tengah	10,52	1,24	8,10	12,94	11,74	25,54	1,81	22,00	29,09	7,08	18,09	1,22	15,70	20,48	6,74			
Sulawesi Selatan	26,33	1,42	23,54	29,11	5,40	47,93	1,65	44,69	51,16	3,44	38,62	1,42	35,84	41,40	3,67			
Sulawesi Barat	23,92	3,01	18,02	29,82	12,59	48,72	3,44	41,99	55,46	7,05	37,60	2,68	32,34	42,85	7,14			
Sulawesi Tenggara	23,54	1,92	19,76	27,31	8,18	54,73	2,28	50,27	59,20	4,16	39,33	1,72	35,97	42,70	4,37			
Maluku	6,24	1,25	3,78	8,69	20,11	13,81	1,63	10,60	17,01	11,84	10,15	1,09	8,03	12,28	10,69			
Maluku Utara	12,27	1,55	9,23	15,31	12,62	29,17	2,26	24,74	33,60	7,74	20,82	1,48	17,92	23,71	7,10			
Papua	31,18	3,10	25,11	37,25	9,93	37,93	3,79	30,51	45,36	9,99	34,00	2,76	28,59	39,40	8,11			
Papua Barat	15,72	2,31	11,19	20,25	14,69	32,62	3,48	25,79	39,44	10,67	23,18	2,12	19,02	27,35	9,16			
INDONESIA	17,16	0,29	16,59	17,73	1,69	41,63	0,42	40,81	42,45	1,01	30,19	0,32	29,56	30,82	1,07			

Tabel 9.15 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan + Perdesaan				
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas				(4)	(5)				(16)	(17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Aceh	63,59	2,15	59,38	67,81	3,38	66,56	1,70	63,22	69,90	2,56	65,73	1,37	63,04	68,41	2,08
Sumatera Utara	45,16	1,97	41,30	49,03	4,36	55,95	1,37	53,26	58,64	2,45	50,64	1,34	48,01	53,27	2,65
Sumatera Barat	53,60	2,16	49,37	57,82	4,02	58,55	1,53	55,55	61,56	2,62	56,63	1,31	54,07	59,19	2,31
Riau	47,35	2,58	42,30	52,41	5,44	52,68	2,02	48,73	56,63	3,83	50,59	1,60	47,45	53,74	3,17
Kep. Riau	40,64	3,64	33,50	47,78	8,96	52,10	7,02	38,34	65,87	13,48	42,75	3,32	36,24	49,26	7,77
Jambi	35,69	2,77	30,26	41,12	7,77	49,80	1,68	46,50	53,10	3,38	45,47	1,63	42,27	48,67	3,59
Sumatera Selatan	54,06	3,15	47,88	60,25	5,84	50,11	1,30	47,56	52,65	2,59	51,52	1,50	48,59	54,46	2,91
Kep. Bangka Belitung	57,11	3,11	51,01	63,22	5,45	68,95	3,02	63,02	74,87	4,38	63,11	2,20	58,80	67,43	3,48
Bengkulu	56,09	3,70	48,84	63,34	6,60	57,81	1,88	54,13	61,49	3,25	57,28	1,73	53,88	60,68	3,02
Lampung	45,96	2,44	41,17	50,75	5,31	54,56	1,24	52,14	56,99	2,27	52,35	1,20	50,00	54,70	2,29
DKI Jakarta	54,70	1,87	51,03	58,36	3,42	-	-	-	-	-	54,70	1,87	51,03	58,36	3,42
Jawa Barat	52,21	1,24	49,79	54,64	2,37	61,59	1,20	59,24	63,94	1,94	55,43	0,91	53,65	57,21	1,64
Banten	62,65	1,82	59,08	66,22	2,91	64,07	2,22	59,72	68,43	3,47	63,13	1,42	60,34	65,91	2,25
Jawa Tengah	51,81	1,01	49,82	53,79	1,95	49,39	1,02	47,40	51,39	2,06	50,50	0,72	49,08	51,91	1,43
DI Yogyakarta	53,97	1,94	50,17	57,77	3,59	50,15	1,86	46,50	53,79	3,70	52,68	1,43	49,86	55,49	2,72
Jawa Timur	49,42	0,91	47,63	51,21	1,85	46,83	0,75	45,36	48,30	1,60	48,06	0,58	46,92	49,20	1,21
Bali	56,55	2,69	51,28	61,82	4,75	66,65	2,57	61,60	71,70	3,86	60,58	1,98	56,70	64,46	3,27
Nusa Tenggara Barat	63,35	2,27	58,90	67,80	3,58	65,48	2,09	61,37	69,58	3,20	64,59	1,55	61,55	67,63	2,40
Nusa Tenggara Timur	60,37	2,59	55,28	65,45	4,30	62,42	1,13	60,20	64,64	1,81	62,03	1,04	59,99	64,07	1,68
Kalimantan Barat	53,75	2,75	48,35	59,15	5,12	58,00	1,67	54,72	61,28	2,88	56,72	1,44	53,89	59,54	2,54
Kalimantan Tengah	50,77	3,10	44,70	56,84	6,10	51,40	2,16	47,15	55,64	4,21	51,19	1,78	47,71	54,66	3,47
Kalimantan Selatan	59,86	2,01	55,91	63,80	3,36	61,30	1,74	57,88	64,72	2,84	60,70	1,31	58,12	63,27	2,17
Kalimantan Timur	42,59	2,31	38,05	47,13	5,43	54,44	2,53	49,47	59,41	4,66	47,11	1,87	43,44	50,77	3,97
Sulawesi Utara	39,78	2,35	35,18	44,38	5,90	49,48	1,79	45,97	52,99	3,62	45,09	1,57	42,02	48,16	3,47
Gorontalo	52,01	3,50	45,14	58,88	6,74	70,34	2,32	65,79	74,89	3,30	64,10	2,11	59,96	68,23	3,29
Sulawesi Tengah	56,27	3,03	50,34	62,21	5,38	59,97	1,72	56,60	63,34	2,86	59,07	1,50	56,12	62,01	2,54
Sulawesi Selatan	49,56	1,67	46,28	52,84	3,37	53,78	1,02	51,78	55,78	1,90	52,23	0,93	50,41	54,05	1,78
Sulawesi Barat	58,89	3,18	52,66	65,12	5,40	57,48	2,57	52,45	62,51	4,46	57,81	2,11	53,68	61,94	3,65
Sulawesi Tenggara	50,61	3,51	43,73	57,48	6,93	56,10	1,99	52,20	60,01	3,55	54,60	1,75	51,16	58,04	3,21
Maluku	50,63	2,45	45,82	55,44	4,85	52,67	2,06	48,64	56,71	3,91	51,92	1,58	48,83	55,00	3,03
Maluku Utara	41,49	3,65	34,33	48,65	8,80	53,11	2,42	48,37	57,84	4,55	49,96	2,09	45,86	54,06	4,19
Papua	37,23	4,18	29,03	45,43	11,23	49,63	3,03	43,68	55,58	6,11	46,21	2,57	41,18	51,24	5,55
Papua Barat	46,43	5,18	36,28	56,58	11,15	43,69	3,40	37,02	50,35	7,78	44,50	2,85	38,92	50,09	6,40
INDONESIA	51,84	0,45	50,96	52,72	0,87	53,82	0,35	53,14	54,51	0,65	52,85	0,28	52,29	53,40	0,54

Tabel 9.16 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki + Perempuan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error			
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	60,26	1,81	56,72	63,80	3,00	70,38	1,63	67,18	73,58	2,32	65,73	1,37	63,04	68,41	2,08			
Sumatera Utara	49,47	1,70	46,15	52,80	3,43	51,58	1,50	48,65	54,51	2,90	50,64	1,34	48,01	53,27	2,65			
Sumatera Barat	55,68	1,52	52,69	58,67	2,74	57,41	1,57	54,34	60,48	2,73	56,63	1,31	54,07	59,19	2,31			
Riau	48,93	2,29	44,43	53,43	4,69	52,44	2,12	48,28	56,60	4,05	50,59	1,60	47,45	53,74	3,17			
Kep. Riau	37,09	4,42	28,43	45,75	11,92	49,59	3,66	42,42	56,77	7,38	42,75	3,32	36,24	49,26	7,77			
Jambi	43,15	2,17	38,90	47,40	5,02	47,97	2,19	43,69	52,26	4,55	45,47	1,63	42,27	48,67	3,59			
Sumatera Selatan	49,37	1,86	45,72	53,01	3,76	53,53	1,78	50,04	57,02	3,33	51,52	1,50	48,59	54,46	2,91			
Kep. Bangka Belitung	61,02	2,83	55,47	66,57	4,64	64,99	2,84	59,42	70,56	4,37	63,11	2,20	58,80	67,43	3,48			
Bengkulu	55,56	2,26	51,13	59,99	4,06	58,89	2,21	54,57	63,21	3,75	57,28	1,73	53,88	60,68	3,02			
Lampung	52,61	1,66	49,36	55,87	3,16	52,08	1,38	49,39	54,78	2,64	52,35	1,20	50,00	54,70	2,29			
DKI Jakarta	51,98	2,62	46,85	57,11	5,04	57,18	2,37	52,53	61,83	4,15	54,70	1,87	51,03	58,36	3,42			
Jawa Barat	52,28	1,08	50,17	54,40	2,06	58,47	1,08	56,36	60,59	1,85	55,43	0,91	53,65	57,21	1,64			
Banten	60,32	1,92	56,56	64,08	3,18	65,83	1,91	62,09	69,56	2,89	63,13	1,42	60,34	65,91	2,25			
Jawa Tengah	48,45	0,91	46,66	50,24	1,88	52,24	0,82	50,63	53,85	1,57	50,50	0,72	49,08	51,91	1,43			
DI Yogyakarta	54,14	2,12	49,98	58,30	3,92	51,55	1,79	48,04	55,05	3,47	52,68	1,43	49,86	55,49	2,72			
Jawa Timur	47,16	0,82	45,55	48,77	1,74	48,77	0,73	47,34	50,21	1,50	48,06	0,58	46,92	49,20	1,21			
Bali	59,26	2,25	54,86	63,67	3,79	61,77	2,22	57,42	66,12	3,59	60,58	1,98	56,70	64,46	3,27			
Nusa Tenggara Barat	62,71	2,07	58,65	66,77	3,30	66,15	1,92	62,38	69,92	2,91	64,59	1,55	61,55	67,63	2,40			
Nusa Tenggara Timur	61,87	1,39	59,13	64,60	2,25	62,17	1,23	59,76	64,59	1,98	62,03	1,04	59,99	64,07	1,68			
Kalimantan Barat	55,66	1,82	52,09	59,23	3,27	57,82	1,91	54,08	61,57	3,30	56,72	1,44	53,89	59,54	2,54			
Kalimantan Tengah	47,90	2,08	43,82	51,97	4,34	55,03	2,50	50,13	59,92	4,54	51,19	1,78	47,71	54,66	3,47			
Kalimantan Selatan	58,27	1,97	54,41	62,12	3,38	62,51	1,76	59,06	65,96	2,81	60,70	1,31	58,12	63,27	2,17			
Kalimantan Timur	46,32	2,26	41,89	50,75	4,88	48,08	2,61	42,95	53,21	5,44	47,11	1,87	43,44	50,77	3,97			
Sulawesi Utara	45,11	1,79	41,61	48,62	3,96	45,07	2,05	41,04	49,10	4,56	45,09	1,57	42,02	48,16	3,47			
Gorontalo	66,91	2,43	62,14	71,67	3,64	61,68	2,85	56,09	67,26	4,62	64,10	2,11	59,96	68,23	3,29			
Sulawesi Tengah	56,59	2,14	52,39	60,79	3,78	61,51	1,80	57,97	65,04	2,93	59,07	1,50	56,12	62,01	2,54			
Sulawesi Selatan	50,44	1,26	47,97	52,92	2,50	53,59	1,14	51,36	55,82	2,12	52,23	0,93	50,41	54,05	1,78			
Sulawesi Barat	59,28	3,08	53,25	65,32	5,20	56,61	2,48	51,75	61,48	4,38	57,81	2,11	53,68	61,94	3,65			
Sulawesi Tenggara	51,26	2,40	46,55	55,97	4,69	57,85	2,14	53,66	62,04	3,69	54,60	1,75	51,16	58,04	3,21			
Maluku	52,22	2,13	48,04	56,40	4,08	51,63	2,06	47,60	55,67	3,98	51,92	1,58	48,83	55,00	3,03			
Maluku Utara	49,08	2,72	43,74	54,42	5,55	50,82	2,98	44,99	56,66	5,86	49,96	2,09	45,86	54,06	4,19			
Papua	41,63	2,83	36,08	47,17	6,79	52,61	3,73	45,31	59,92	7,08	46,21	2,57	41,18	51,24	5,55			
Papua Barat	45,55	3,70	38,30	52,79	8,11	43,18	3,87	35,60	50,76	8,95	44,50	2,85	38,92	50,09	6,40			
INDONESIA	51,14	0,36	50,44	51,85	0,70	54,34	0,34	53,67	55,01	0,63	52,85	0,28	52,29	53,40	0,54			

Tabel 9.17 Sampling Error Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan + Perdesaan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error			
			Batas Bawah	Batas Atas				(4)	(5)				(10)	(11)		(16)	(17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	37,27	2,19	32,98	41,57	5,87	43,49	1,41	40,73	46,25	3,24	41,74	1,19	39,41	44,07	2,84			
Sumatera Utara	24,91	1,35	22,26	27,56	5,43	34,39	1,20	32,05	36,74	3,48	29,73	1,01	27,75	31,70	3,39			
Sumatera Barat	26,34	1,76	22,89	29,78	6,68	31,12	1,18	28,80	33,45	3,81	29,27	1,01	27,30	31,24	3,44			
Riau	24,68	1,93	20,88	28,47	7,84	27,33	1,74	23,91	30,74	6,37	26,29	1,31	23,71	28,86	4,99			
Kep. Riau	23,17	3,10	17,09	29,26	13,40	31,06	5,89	19,52	42,60	18,95	24,62	2,82	19,10	30,15	11,45			
Jambi	22,70	2,27	18,25	27,14	9,99	30,41	1,58	27,32	33,50	5,18	28,05	1,38	25,35	30,74	4,90			
Sumatera Selatan	19,89	1,62	16,71	23,07	8,15	25,61	1,18	23,30	27,92	4,60	23,56	0,95	21,70	25,42	4,02			
Kep. Bangka Belitung	20,54	2,11	16,40	24,67	10,26	27,73	2,53	22,77	32,69	9,12	24,18	1,66	20,92	27,45	6,88			
Bengkulu	27,77	2,78	22,33	33,22	10,01	36,30	1,99	32,38	40,21	5,50	33,66	1,67	30,39	36,92	4,95			
Lampung	23,15	1,79	19,65	26,65	7,71	27,69	1,11	25,50	29,87	4,02	26,52	0,94	24,67	28,37	3,56			
DKI Jakarta	25,33	1,28	22,82	27,84	5,06	-	-	-	-	-	25,33	1,28	22,82	27,84	5,06			
Jawa Barat	27,32	0,86	25,63	29,00	3,14	32,74	1,04	30,71	34,77	3,17	29,18	0,67	27,87	30,49	2,29			
Banten	26,39	2,02	22,43	30,36	7,67	36,78	2,37	32,13	41,43	6,45	29,86	1,60	26,72	33,00	5,36			
Jawa Tengah	24,41	0,84	22,76	26,06	3,45	24,74	0,81	23,15	26,34	3,29	24,59	0,59	23,44	25,74	2,38			
DI Yogyakarta	21,07	1,66	17,82	24,33	7,88	24,40	1,22	22,02	26,79	4,98	22,20	1,19	19,87	24,52	5,34			
Jawa Timur	24,79	0,86	23,10	26,47	3,47	26,09	0,64	24,84	27,34	2,44	25,47	0,53	24,43	26,51	2,08			
Bali	30,27	1,94	26,48	34,07	6,39	43,68	2,66	38,46	48,90	6,10	35,62	1,68	32,33	38,91	4,71			
Nusa Tenggara Barat	34,89	2,05	30,88	38,91	5,86	42,27	2,00	38,34	46,20	4,74	39,19	1,49	36,27	42,12	3,81			
Nusa Tenggara Timur	26,69	2,42	21,94	31,43	9,07	39,83	1,14	37,60	42,06	2,86	37,34	1,06	35,25	39,43	2,85			
Kalimantan Barat	27,89	2,31	23,35	32,42	8,29	36,30	1,51	33,35	39,25	4,15	33,75	1,35	31,11	36,40	3,99			
Kalimantan Tengah	26,36	2,95	20,57	32,15	11,21	32,61	1,72	29,24	35,98	5,27	30,52	1,54	27,50	33,54	5,05			
Kalimantan Selatan	25,11	1,88	21,42	28,81	7,50	26,78	1,51	23,83	29,74	5,63	26,09	1,17	23,80	28,38	4,48			
Kalimantan Timur	22,83	2,11	18,68	26,98	9,26	35,59	2,54	30,61	40,57	7,14	27,69	1,78	24,21	31,18	6,42			
Sulawesi Utara	22,70	2,01	18,75	26,64	8,87	34,79	1,77	31,31	38,26	5,10	29,31	1,47	26,44	32,19	5,00			
Gorontalo	28,48	2,88	22,83	34,13	10,11	43,15	2,38	38,48	47,83	5,52	38,16	1,93	34,37	41,94	5,06			
Sulawesi Tengah	31,02	2,70	25,72	36,32	8,72	37,70	1,53	34,69	40,70	4,06	36,07	1,35	33,42	38,71	3,74			
Sulawesi Selatan	24,66	1,70	21,32	28,00	6,91	29,32	0,93	27,49	31,15	3,18	27,62	0,90	25,86	29,37	3,24			
Sulawesi Barat	26,25	3,65	19,10	33,40	13,90	27,62	2,38	22,96	32,28	8,61	27,30	2,00	23,37	31,22	7,34			
Sulawesi Tenggara	28,59	3,15	22,41	34,77	11,02	35,87	1,88	32,18	39,55	5,24	33,87	1,64	30,66	37,09	4,84			
Maluku	28,66	2,95	22,88	34,43	10,28	33,37	1,93	29,60	37,15	5,77	31,62	1,61	28,47	34,77	5,08			
Maluku Utara	27,45	3,63	20,34	34,56	13,22	39,91	2,36	35,29	44,53	5,91	36,54	2,05	32,51	40,56	5,62			
Papua	21,58	2,69	16,31	26,85	12,45	32,03	2,89	26,37	37,69	9,01	29,15	2,26	24,72	33,58	7,74			
Papua Barat	24,93	4,44	16,23	33,64	17,81	27,37	2,79	21,89	32,84	10,21	26,65	2,37	22,00	31,29	8,89			
INDONESIA	25,62	0,35	24,94	26,30	1,36	29,92	0,29	29,35	30,50	0,98	27,80	0,23	27,35	28,25	0,83			

Tabel 9.18 Sampling Error Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki + Perempuan					
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error			
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Aceh	38,66	1,60	35,52	41,81	4,15	44,37	1,66	41,12	47,61	3,73	41,74	1,19	39,41	44,07	2,84			
Sumatera Utara	29,84	1,34	27,22	32,46	4,48	29,64	1,28	27,12	32,15	4,33	29,73	1,01	27,75	31,70	3,39			
Sumatera Barat	31,08	1,37	28,40	33,77	4,41	27,79	1,31	25,23	30,35	4,70	29,27	1,01	27,30	31,24	3,44			
Riau	26,07	1,82	22,50	29,64	6,98	26,53	1,94	22,74	30,32	7,30	26,29	1,31	23,71	28,86	4,99			
Kep. Riau	21,77	3,76	14,40	29,15	17,27	28,07	4,06	20,12	36,02	14,45	24,62	2,82	19,10	30,15	11,45			
Jambi	26,15	1,75	22,71	29,58	6,70	30,09	2,06	26,06	34,12	6,83	28,05	1,38	25,35	30,74	4,90			
Sumatera Selatan	24,02	1,27	21,53	26,50	5,28	23,14	1,24	20,71	25,56	5,35	23,56	0,95	21,70	25,42	4,02			
Kep. Bangka Belitung	24,57	2,45	19,77	29,37	9,97	23,84	2,24	19,44	28,24	9,42	24,18	1,66	20,92	27,45	6,88			
Bengkulu	32,94	2,09	28,85	37,03	6,34	34,33	2,13	30,14	38,51	6,22	33,66	1,67	30,39	36,92	4,95			
Lampung	26,61	1,40	23,87	29,36	5,26	26,43	1,27	23,94	28,91	4,80	26,52	0,94	24,67	28,37	3,56			
DKI Jakarta	22,04	2,01	18,10	25,98	9,12	28,33	2,16	24,09	32,57	7,63	25,33	1,28	22,82	27,84	5,06			
Jawa Barat	28,31	0,87	26,60	30,02	3,08	30,02	0,87	28,30	31,73	2,91	29,18	0,67	27,87	30,49	2,29			
Banten	30,12	1,87	26,46	33,78	6,20	29,61	2,18	25,33	33,89	7,37	29,86	1,60	26,72	33,00	5,36			
Jawa Tengah	23,68	0,76	22,19	25,18	3,22	25,37	0,70	23,99	26,74	2,76	24,59	0,59	23,44	25,74	2,38			
DI Yogyakarta	23,36	1,50	20,41	26,30	6,43	21,30	1,54	18,28	24,32	7,23	22,20	1,19	19,87	24,52	5,34			
Jawa Timur	24,69	0,69	23,34	26,03	2,78	26,09	0,66	24,80	27,38	2,52	25,47	0,53	24,43	26,51	2,08			
Bali	35,66	1,99	31,76	39,56	5,58	35,59	1,98	31,70	39,48	5,57	35,62	1,68	32,33	38,91	4,71			
Nusa Tenggara Barat	38,37	1,90	34,65	42,10	4,95	39,88	1,87	36,21	43,54	4,69	39,19	1,49	36,27	42,12	3,81			
Nusa Tenggara Timur	38,06	1,38	35,36	40,76	3,62	36,70	1,29	34,16	39,23	3,52	37,34	1,06	35,25	39,43	2,85			
Kalimantan Barat	33,29	1,64	30,06	36,51	4,94	34,24	1,82	30,68	37,81	5,30	33,75	1,35	31,11	36,40	3,99			
Kalimantan Tengah	29,09	1,90	25,38	32,81	6,52	32,18	2,22	27,82	36,54	6,91	30,52	1,54	27,50	33,54	5,05			
Kalimantan Selatan	23,93	1,69	20,61	27,26	7,08	27,69	1,74	24,28	31,11	6,29	26,09	1,17	23,80	28,38	4,48			
Kalimantan Timur	26,42	1,97	22,56	30,28	7,45	29,26	2,51	24,35	34,18	8,57	27,69	1,78	24,21	31,18	6,42			
Sulawesi Utara	29,04	1,73	25,65	32,44	5,96	29,56	1,75	26,12	32,99	5,93	29,31	1,47	26,44	32,19	5,00			
Gorontalo	39,08	2,90	33,39	44,76	7,43	37,36	2,67	32,13	42,59	7,14	38,16	1,93	34,37	41,94	5,06			
Sulawesi Tengah	33,43	1,76	29,99	36,87	5,25	38,67	1,84	35,07	42,27	4,75	36,07	1,35	33,42	38,71	3,74			
Sulawesi Selatan	28,33	1,23	25,92	30,74	4,34	27,07	1,00	25,12	29,02	3,68	27,62	0,90	25,86	29,37	3,24			
Sulawesi Barat	27,22	2,73	21,87	32,56	10,02	27,36	2,45	22,56	32,16	8,95	27,30	2,00	23,37	31,22	7,34			
Sulawesi Tenggara	33,12	2,23	28,74	37,49	6,74	34,61	1,94	30,82	38,41	5,59	33,87	1,64	30,66	37,09	4,84			
Maluku	31,88	1,85	28,25	35,51	5,81	31,37	2,22	27,03	35,71	7,06	31,62	1,61	28,47	34,77	5,08			
Maluku Utara	35,63	2,72	30,30	40,96	7,63	37,42	2,63	32,27	42,58	7,02	36,54	2,05	32,51	40,56	5,62			
Papua	26,14	2,53	21,18	31,10	9,68	33,35	3,89	25,72	40,97	11,66	29,15	2,26	24,72	33,58	7,74			
Papua Barat	26,59	2,94	20,82	32,35	11,06	26,72	3,75	19,37	34,07	14,03	26,65	2,37	22,00	31,29	8,89			
INDONESIA	27,24	0,30	26,65	27,82	1,09	28,30	0,29	27,73	28,87	1,03	27,80	0,23	27,35	28,25	0,83			

Tabel 9.19 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan + Perdesaan				
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Aceh	40,19	2,78	34,74	45,63	6,91	37,55	1,89	33,84	41,25	5,03	38,26	1,58	35,17	41,35	4,12
Sumatera Utara	39,44	2,03	35,45	43,42	5,15	58,59	1,63	55,40	61,79	2,78	49,26	1,32	46,67	51,85	2,69
Sumatera Barat	32,79	2,60	27,70	37,87	7,92	41,70	1,60	38,56	44,83	3,84	38,37	1,39	35,64	41,10	3,63
Riau	31,79	3,29	25,34	38,23	10,34	55,17	2,86	49,56	60,79	5,19	46,17	2,22	41,81	50,52	4,81
Kep. Riau	39,58	4,59	30,57	48,58	11,60	34,66	3,92	26,98	42,33	11,30	38,75	3,89	31,12	46,38	10,05
Jambi	43,72	3,96	35,97	51,48	9,05	50,75	2,59	45,67	55,83	5,11	48,55	2,17	44,29	52,81	4,47
Sumatera Selatan	38,71	3,35	32,14	45,27	8,65	54,77	2,02	50,80	58,73	3,69	49,07	1,77	45,60	52,54	3,60
Kep. Bangka Belitung	34,64	3,27	28,24	41,05	9,43	44,90	4,32	36,43	53,37	9,63	39,91	2,75	34,51	45,31	6,90
Bengkulu	39,46	4,73	30,19	48,72	11,98	58,09	2,58	53,04	63,14	4,44	52,26	2,39	47,59	56,94	4,56
Lampung	36,59	3,17	30,38	42,80	8,66	51,59	2,07	47,54	55,64	4,01	47,90	1,74	44,49	51,31	3,63
DKI Jakarta	32,06	2,27	27,60	36,51	7,09	-	-	-	-	-	32,06	2,27	27,60	36,51	7,09
Jawa Barat	32,90	1,18	30,58	35,22	3,59	43,79	1,48	40,89	46,70	3,38	36,76	0,93	34,93	38,59	2,54
Banten	35,77	2,73	30,41	41,13	7,64	46,68	3,33	40,15	53,21	7,13	39,61	2,13	35,44	43,78	5,38
Jawa Tengah	42,98	1,03	40,96	45,01	2,40	51,33	1,00	49,36	53,30	1,96	47,59	0,72	46,18	49,00	1,51
DI Yogyakarta	44,38	3,10	38,30	50,45	6,98	50,21	2,69	44,95	55,48	5,35	46,36	2,21	42,03	50,69	4,77
Jawa Timur	44,19	1,07	42,08	46,29	2,43	54,13	0,97	52,22	56,04	1,80	49,44	0,73	48,02	50,87	1,47
Bali	47,74	2,31	43,20	52,27	4,85	57,93	2,23	53,55	62,30	3,85	51,90	1,64	48,68	55,12	3,16
Nusa Tenggara Barat	46,46	3,11	40,36	52,55	6,69	50,90	2,62	45,76	56,04	5,15	49,01	2,00	45,08	52,93	4,09
Nusa Tenggara Timur	29,05	3,52	22,14	35,95	12,12	56,12	1,39	53,39	58,85	2,48	51,23	1,35	48,59	53,87	2,63
Kalimantan Barat	32,37	2,14	28,17	36,56	6,61	60,27	2,26	55,84	64,70	3,75	51,76	1,78	48,27	55,25	3,44
Kalimantan Tengah	38,89	4,21	30,65	47,14	10,81	63,89	2,37	59,26	68,53	3,70	55,86	2,15	51,64	60,07	3,85
Kalimantan Selatan	44,55	3,60	37,49	51,62	8,09	48,96	2,50	44,05	53,86	5,11	47,20	2,07	43,14	51,26	4,39
Kalimantan Timur	39,11	2,96	33,31	44,92	7,57	50,78	3,87	43,20	58,37	7,62	43,56	2,36	38,94	48,18	5,41
Sulawesi Utara	39,69	2,96	33,90	45,49	7,45	50,36	1,79	46,86	53,87	3,55	45,55	1,66	42,29	48,81	3,65
Gorontalo	41,23	4,95	31,53	50,93	12,00	46,90	3,47	40,09	53,70	7,40	44,93	2,84	39,37	50,49	6,32
Sulawesi Tengah	32,70	3,89	25,06	40,33	11,91	60,32	2,25	55,90	64,73	3,73	53,82	2,08	49,74	57,90	3,87
Sulawesi Selatan	32,82	2,57	27,79	37,85	7,82	44,84	1,16	42,57	47,11	2,58	40,59	1,16	38,31	42,87	2,87
Sulawesi Barat	50,32	4,76	40,98	59,65	9,46	55,74	3,60	48,68	62,80	6,46	54,59	3,00	48,71	60,47	5,49
Sulawesi Tenggara	30,78	3,81	23,32	38,24	12,37	63,57	2,40	58,86	68,28	3,78	54,64	2,12	50,49	58,79	3,88
Maluku	42,03	4,51	33,20	50,86	10,72	62,19	2,39	57,52	66,87	3,84	54,46	2,42	49,72	59,19	4,44
Maluku Utara	34,92	5,39	24,35	45,48	15,44	51,45	3,15	45,26	57,63	6,13	46,79	2,73	41,43	52,15	5,84
Papua	47,60	6,12	35,62	59,59	12,85	62,33	3,53	55,42	69,24	5,66	58,48	3,03	52,55	64,42	5,18
Papua Barat	36,26	8,96	18,68	53,83	24,72	60,90	3,84	53,37	68,43	6,31	53,86	4,21	45,61	62,12	7,82
INDONESIA	38,99	0,48	38,05	39,93	1,23	51,46	0,41	50,67	52,26	0,79	45,41	0,31	44,79	46,02	0,69

Tabel 9.20 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki					Perempuan					Laki-Laki + Perempuan				
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				(14)	(15)	(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Aceh	57,22	2,16	52,99	61,46	3,77	22,79	1,77	19,31	26,27	7,78	38,26	1,58	35,17	41,35	4,12
Sumatera Utara	59,93	1,69	56,61	63,25	2,82	40,90	1,86	37,25	44,55	4,55	49,26	1,32	46,67	51,85	2,69
Sumatera Barat	56,66	1,86	53,00	60,31	3,29	24,55	1,58	21,46	27,65	6,44	38,37	1,39	35,64	41,10	3,63
Riau	66,56	2,78	61,11	72,00	4,18	26,06	2,59	20,99	31,13	9,92	46,17	2,22	41,81	50,52	4,81
Kep. Riau	55,47	4,73	46,21	64,73	8,52	19,95	6,41	7,38	32,52	32,14	38,75	3,89	31,12	46,38	10,05
Jambi	67,98	2,50	63,09	72,88	3,67	28,72	2,94	22,95	34,49	10,25	48,55	2,17	44,29	52,81	4,47
Sumatera Selatan	65,18	2,18	60,91	69,46	3,35	34,26	2,38	29,60	38,93	6,94	49,07	1,77	45,60	52,54	3,60
Kep. Bangka Belitung	56,18	3,79	48,75	63,61	6,75	25,39	3,36	18,80	31,98	13,24	39,91	2,75	34,51	45,31	6,90
Bengkulu	67,81	2,90	62,11	73,50	4,28	37,16	3,08	31,13	43,19	8,28	52,26	2,39	47,59	56,94	4,56
Lampung	67,10	2,05	63,08	71,12	3,05	26,81	2,06	22,78	30,84	7,67	47,90	1,74	44,49	51,31	3,63
DKI Jakarta	42,29	2,72	36,96	47,63	6,44	22,02	3,58	15,00	29,03	16,25	32,06	2,27	27,60	36,51	7,09
Jawa Barat	52,24	1,34	49,61	54,87	2,57	22,36	1,11	20,18	24,54	4,98	36,76	0,93	34,93	38,59	2,54
Banten	59,01	2,85	53,42	64,59	4,83	21,87	2,29	17,39	26,36	10,47	39,61	2,13	35,44	43,78	5,38
Jawa Tengah	62,39	1,00	60,43	64,34	1,60	35,13	0,94	33,30	36,97	2,67	47,59	0,72	46,18	49,00	1,51
DI Yogyakarta	58,40	2,85	52,82	63,99	4,88	36,80	2,60	31,70	41,90	7,07	46,36	2,21	42,03	50,69	4,77
Jawa Timur	67,05	1,00	65,09	69,01	1,49	35,12	0,95	33,26	36,97	2,69	49,44	0,73	48,02	50,87	1,47
Bali	62,91	2,03	58,94	66,88	3,22	42,10	2,06	38,05	46,15	4,90	51,90	1,64	48,68	55,12	3,16
Nusa Tenggara Barat	66,82	2,78	61,37	72,27	4,16	33,38	2,26	28,95	37,80	6,76	49,01	2,00	45,08	52,93	4,09
Nusa Tenggara Timur	67,61	1,65	64,38	70,85	2,44	36,41	1,69	33,10	39,72	4,63	51,23	1,35	48,59	53,87	2,63
Kalimantan Barat	61,87	2,26	57,43	66,30	3,66	41,29	2,39	36,60	45,98	5,79	51,76	1,78	48,27	55,25	3,44
Kalimantan Tengah	74,27	2,14	70,08	78,47	2,88	36,93	3,22	30,62	43,24	8,72	55,86	2,15	51,64	60,07	3,85
Kalimantan Selatan	60,98	2,63	55,82	66,14	4,32	36,04	2,35	31,43	40,65	6,53	47,20	2,07	43,14	51,26	4,39
Kalimantan Timur	62,11	3,41	55,42	68,80	5,50	22,97	2,53	18,00	27,93	11,04	43,56	2,36	38,94	48,18	5,41
Sulawesi Utara	65,34	2,01	61,41	69,27	3,07	29,27	2,09	25,18	33,36	7,13	45,55	1,66	42,29	48,81	3,65
Gorontalo	64,51	4,02	56,64	72,38	6,22	27,67	3,82	20,18	35,16	13,82	44,93	2,84	39,37	50,49	6,32
Sulawesi Tengah	68,74	2,46	63,91	73,57	3,58	38,51	2,86	32,90	44,11	7,43	53,82	2,08	49,74	57,90	3,87
Sulawesi Selatan	64,17	1,66	60,93	67,42	2,58	23,09	1,52	20,12	26,07	6,58	40,59	1,16	38,31	42,87	2,87
Sulawesi Barat	75,86	3,29	69,41	82,30	4,33	35,78	3,81	28,31	43,25	10,65	54,59	3,00	48,71	60,47	5,49
Sulawesi Tenggara	70,89	2,37	66,25	75,53	3,34	40,41	2,99	34,54	46,27	7,40	54,64	2,12	50,49	58,79	3,88
Maluku	70,99	3,74	63,65	78,32	5,27	38,19	2,94	32,43	43,96	7,71	54,46	2,42	49,72	59,19	4,44
Maluku Utara	59,88	3,27	53,47	66,28	5,46	33,73	3,51	26,86	40,61	10,39	46,79	2,73	41,43	52,15	5,84
Papua	71,43	3,42	64,72	78,13	4,79	38,45	3,88	30,86	46,05	10,08	58,48	3,03	52,55	64,42	5,18
Papua Barat	72,41	3,39	65,76	79,06	4,69	28,97	4,85	19,46	38,49	16,75	53,86	4,21	45,61	62,12	7,82
INDONESIA	61,47	0,43	60,63	62,31	0,70	31,39	0,40	30,61	32,17	1,27	45,41	0,31	44,79	46,02	0,69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2007 . *Laporan Survei Buta Aksara*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2008 . *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2009 . *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2010 . *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2011 . *Pedoman Pencacahan Susenas Kor 2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2011 . *Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2012 . *Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Mariyati, Sukarni. 1994 . *Kesehatan Keluarga dan Lingkungan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang *Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia*.
- PKBI.2001. *Prosiding Seminar dan Loka Karya Pengembangan Pusat Pelayanan Lanjut Usia*. Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Rully R. 2003 . *Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Lansia di Rumah Sakit Umum dalam Perspektif HAM*. Jakarta: Pusat Pengkajian Perlindungan Kelompok Rentan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Siti Partini Suardiman. *DIY Provinsi Lansia*. Yogyakarta: Kepala Pusat Studi Sumberdaya Lansia UNY.

TEMPO *Interaktif*. 2007 . *Pada 2025, Seperlima Penduduk Indonesia Lansia*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang *Kesejahteraan Lanjut Usia*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

